2025

PETA KETAHANAN & KERENTANAN PANGAN

(Food Security And Vulnerability Atlas – FSVA)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DATA INDIKATOR TAHUN 2024







PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS KETAHANAN PANGAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 500.1.1/6526 TAHUN 2024

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 2 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan menyebutkan bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan provinsi ditetapkan oleh Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari pada 28-10-2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K.,M.H.

KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Ketahanan pangan selalu menjadi isu strategis, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif. Salah satu fokus utama yang harus dilaksanakan adalah pengentasan daerah rentan rawan pangan dengan mengkoordinasikan kegiatan lintas sektor.

Ketahanan Pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Penanganan kegiatan ketahanan pangan apabila dilakukan dengan baik dan benar serta tepat waktu dan tepat sasaran diharapkan dapat menekan berbagai faktor pemicu kerawanan pangan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara (*Food Security And Vulnerability Atlas-FSVA*) yang telah dihasilkan hendaknya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memperkuat ketahanan Pangan wilayah masing-masing.

Sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten dan Kecamatan, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas– FSVA*) yang dihasilkan oleh Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas–FSVA*) Provinsi Sulawesi Tenggara mencakup 17 Kabupaten/Kota dan 221 Kecamatan yang merupakan hasil konsolidasi berbagai aspek yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan serta gizi dan kesehatan.

Untuk mengevaluasi pencapaian target ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas–FSVA*) yang di-update setiap tahun pada tingkat kecamatan, agar permasalahan dan tantangan yang menyebabkan terjadinya masalah pangan, kemiskinan dan

stunting dapat dilakukan intervensi program/kegiatan secara lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Tidak hanya itu, dengan FSVA, pemantauan dini dapat lebih ditingkatkan agar kejadian rawan pangan dapat dideteksi lebih dini.

Kami yakin bahwa buku FSVA ini dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi upaya-upaya penurunan kerawanan pangan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim kerja FSVA Provinsi Sulawesi Tenggara dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas kontribusinya dalam penyusunan FSVA 2025.

Kami berharap, dengan tersusunnya peta ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

KENDARI, 9 DESEMBER 2025 KEPALA

DINAS KETAHANAN PANGAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS KETAHANAN PANGAN

Ir. [illegible] SISMANTO
Pembina Utama Madya, Gol.IV/d
NIP. 19680226 199303 1 007

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGGARA

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR PETA viii

RINGKASAN EKSEKUTIF ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi 4

1.3 Indikator FSVA Provinsi 6

1.4 Penentuan Range Indikator Individu 15

1.5 Analisis Komposit 17

1.6 Pembacaan Hasil Analisis FSVA 20

BAB II SITUASI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 22

2.1 Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara 22

2.2 Perubahan Status Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara 29

BAB III KETERSEDIAAN PANGAN 32

3.1 Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita Terhadap Produksi 39

3.2 Capaian Ketersediaan Pangan 43

3.3 Tantangan Ketersediaan Pangan 44

BAB IV AKSES TERHADAP PANGAN 49

4.1 Akses Terhadap Listrik 50

4.2 Kemiskinan 51

4.3 Pangsa Pengeluaran Pangan 53

4.4 Tantangan Peningkatan Akses Pangan 57

BAB V PEMANFAATAN PANGAN 61
5.1 Kecukupan Tenaga Kesehatan 62
5.2 Akses ke Air Bersih 66
5.3 Lama Sekolah Perempuan Berusia di Atas 15 Tahun 69
5.4 Persentase Balita Stunting 72
5.5 Angka Kesakitan 75
5.6 Tantangan Peningkatan Pemanfaatan Pangan 79
BAB VI SUMBER DAYA ALAM DAN KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA 86
6.1 Bencana Alam..... 87
6.2 Variabilitas Iklim 89
6.3 Kehilangan Produksi Akibat Kekeringan, Banjir dan OPT 91
BAB VII REKOMENDASI KEBIJAKAN 93
7.1 Pengentasan Wilayah Kecamatan Rentan Rawan Pangan Per Kabupaten 96
7.2 Pengentasan Wilayah Kecamatan Rentan Rawan Pangan di Perkotaan 98
7.3 Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor.....100
LAMPIRAN.....103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator FSVA Provinsi 2025 7
Tabel 1.2 Range Indikator..... 16
Tabel 1.3 Bobot Indikator Individu..... 19
Tabel 1.4 Pembacaan Hasil Analisis FSVA..... 21
Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan per Prioritas Komposit di masing-masing Kabupaten..... 24
Tebel 2.2 Jumlah Kecamatan per Prioritas Komposit di masing-masing Kota..... 25
Tabel 3.1 Produksi Padi dan Produksi Beras di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2024..... 34
Tabel 3.2 Produksi Jagung di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2024..... 36
Tabel 3.3 Produksi Ubi Kayu di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2024..... 37
Tabel 3.4 Produksi Ubi Jalar di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2024 38
Tabel 4.1 Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik per Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 – 2024..... 50
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2024 53
Tabel 5.1 Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap

Kepadatan Penduduk 2023 - 2024.....64
Tabel 5.2 Perbandingan Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Ke Air Bersih Tahun 2021-2024.....68
Tabel 5.3 Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di atas 15 tahun.....71
Tabel 5.4 Klasifikasi WHO untuk Underweight, Stunting dan Wasting dalam Populasi.....73
Tabel 5.5 Prevalensi Stunting Pada Balita per Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024.....75

Tabel 5.6 Angka Kesakitan tingkat Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2023.....78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi 5
Gambar 2. Sebaran Jumlah Kecamatan Rentan Rawan Pangan Prioritas 2 sampai Prioritas 3 Hasil Analisis Komposit Per Kecamatan di setiap Kab./kota Tahun 2024.....26
Gambar 3. Sebaran Jumlah Kecamatan Tahan Terhadap Rentan Rawan Pangan Prioritas 4 dan Prioritas 6 Hasil Analisis Komposit Per Kecamatan di Setiap Kab./Kota Tahun 2024 29
Gambar 4. Kerangka Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan.....96
Gambar 5. Kerangka Intervensi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Kabupaten Per Kecamatan 98
Gambar 6. Kerangka Intervensi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Kecamatan di Perkotaan 100
Gambar 7. Peran Aktif Pemangku Kepentingan dalam Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan.....101

DAFTAR PETA

1. PETA PRIORITAS KOMPOSIT.....31
2. PETA RASIO KONSUMSI NORMATIF TERHADAP KETERSEDIAAN PANGAN.....48
3. PETA RUMAH TANGGA TANPA AKSES TERHADAP LISTRIK.....58
4. PETA PENDUDUK DI BAWAH GARIS KEMISKINAN.....59
5. PETA RUMAH TANGGA DENGAN PROPORSI PENGELUARAN UNTUK PANGAN LEBIH DARI 65% TERHADAP TOTAL PENGELUARAN.....60
6. PETA RASIO JUMLAH PENDUDUK PER TENAGA KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK.....81
7. PETA PERSENTASE RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH.....82
8. PETA RATA-RATA LAMA SEKOLAH PEREMPUAN DI ATAS 15 TAHUN.....83
9. PETA PREVALENSI STUNTING.....84
10. PETA ANGKA KESAKITAN.....85

RINGKASAN EKSEKUTIF
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA) 2024

1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) disusun dalam bentuk peta tematik sebagai suatu inovasi dan transformasi penyajian data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan rawan pangan menurut wilayah di Indonesia. FSVA disusun untuk menjadi alat bantu melakukan analisis situasi dan perencanaan strategi (strategic tools) bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan mewujudkan ketahanan pangan serta mencegah dan menangani secara tepat kerentanan rawan pangan di seluruh wilayah tanah air. Data dan informasi yang dihasilkan juga merupakan rujukan penting bagi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi di bidang pangan di wilayah masing-masing.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)* merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis berdasarkan 6 kelas status ketahanan pangan yaitu: Prioritas I merupakan wilayah sangat rentan, Prioritas 2 merupakan wilayah rentan, Prioritas 3 merupakan wilayah agak rentan, Prioritas 4 merupakan wilayah agak tahan, Prioritas 5 merupakan wilayah tahan, dan Prioritas 6 merupakan wilayah sangat tahan.
3. Sebagai tindak lanjut penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)* Nasional, disusun pula peta Provinsi tahun 2025 mencakup 15 kabupaten dan 2 kota. FSVA kecamatan disusun dengan

menggunakan 6 indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Data indikator yang digunakan dalam analisis adalah data tahun 2024.

4. Situasi ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Tenggara di beberapa Kabupaten/Kota berdasarkan hasil komposit tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024 dengan jumlah 221

Kecamatan. Kecamatan yang masuk kategori rentan rawan pangan yaitu Prioritas 1-3 sebanyak 33 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten dan untuk wilayah perkotaan tidak terdapat kecamatan yang masuk kategori rentan rawan pangan.

Adapun wilayah kabupaten dari 202 kecamatan yang masuk prioritas-1 (sangat rentan) sebanyak 2 kecamatan prioritas-2 (rentan) sebanyak 9 kecamatan, dan prioritas-3 sebanyak 22 kecamatan (agak rentan).

5. Kabupaten rentan rawan pangan yang masuk dalam Prioritas-1 sampai dengan Prioritas-3 yaitu:
   a. Prioritas-1 berjumlah 2 kecamatan yang tersebar di kabupaten Muna (kecamatan Marobo) dan di kabupaten Buton Selatan (kecamatan Batu Atas),
   b. Prioritas-2 berjumlah 9 kecamatan yang tersebar di kabupaten Muna (kecamatan Towea), kabupaten Konawe Selatan (kecamatan Wolasi), kabupaten Wakatobi (kecamatan Binongko, Togo Binongko, dan Tomia Timur), kabupaten Kolaka Timur (kecamatan Ueesi) dan kabupaten Buton Selatan (kecamatan Kadatua dan Lapandewa).
   c. Prioritas-3 berjumlah 22 kecamatan tersebar di kabupaten Buton (kecamatan Kapontori, Lasalimu Selatan, dan Wolowa), Muna (kecamatan Lohia dan Tongkuno), kabupaten Konawe Selatan (kecamatan Andoolo Barat, Kolono Timur, dan Moramo), kabupaten Wakatobi (kecamatan Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, dan Wangi-wangi Selatan), kabupaten Kolaka Timur (kecamatan Uluiwoi), kabupaten Konawe Kepulauan (kecamatan Wawonii Tengah, Wawonii Tenggara dan Wawonii Timur), kabupaten Buton Tengah (kecamatan Gu dan Talaga Raya), dan

kabupaten Buton Selatan (kecamatan Batauga, Sampolawa, Siompu, dan Siompu Barat).

6. Kota rentan rawan pangan prioritas 1-3 tidak terdapat kecamatan yang tergolong kategori rentan rawan pangan.
7. Karakteristik kecamatan wilayah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara rentan rawan pangan ditandai dengan tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, tingginya presentase

penduduk miskin, tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, tingginya angka kesakitan, tingginya presentase jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, dan tingginya lama sekolah perempuan di atas 15 tahun. Sementara untuk karakteristik Kota per kecamatan rentan rawan pangan tidak ada.

8. Berdasarkan karakteristik wilayah rentan rawan pangan, maka fokus pengentasan kerentanan pangan di wilayah kecamatan yang berada di kabupaten/kota diprioritaskan pada :
   a. Kecamatan-kecamatan dengan daerah rentan rawan pangan terbesar.
   b. Kecamatan-kecamatan di kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
   c. Kecamatan-kecamatan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan terutama dalam hal stabilisasi pasokan dan daya beli masyarakat.
   d. Kecamatan-kecamatan yang memiliki keterbatasan dalam hal pemanfaatan pangan dikarenakan oleh pemahaman/pengetahuan yang terbatas ataupun karena buruknya sanitasi.
9. Program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan wilayah kecamatan diarahkan pada kegiatan sebagai berikut:
   a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra pangan dengan mengoptimalkan lahan marginal dan ruang terbuka untuk produksi sesuai potensi sumberdaya lokal;
   b. Penyediaan lapangan kerja, padat karya, restribusi lahan, pemanfaatan lahan kosong untuk peningkatan ketahanan pangan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit dan sarana penunjang lainnya) dan pemberian

bantuan sosial; serta pembangunan produktif/ UMKM/ padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan menurunkan kemiskinan;

c. Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan;
d. Sosialisasi penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak; penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan peningkatan kualitas

dan sanitasi untuk menurunkan prevalensi stunting dan peningkatan gizi masyarakat;

e. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih;
f. Program Gerakan Pangan Murah dalam rangka penanganan inflasi;
g. Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah;
h. Program Sosialisasi dan edukasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan (B2SA);
i. Program Promosi Keamanan pangan;
j. Program penanganan balita stunting, dan;
k. Program-program lainnya yang menyentuh masyarakat;
l. Program penanganan kerawanan pangan.

10. Program-program pengentasan kerentanan pangan di daerah perkotaan diarahkan pada kegiatan;
    a. Peningkatan ketersediaan pangan keluarga melalui pengembangan urban farming;
    b. Penanganan balita stunting melalui intervensi program gizi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Intervensi spesifik dilakukan untuk mendukung kesehatan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) diantaranya adalah untuk pemberian vitamin yang dilengkapi zat besi, yodium, asam folat untuk ibu hamil; mendukung pemberian ASI esklusif bayi usia 0-6 bulan; dan pemberian MP ASI untuk 7-23 bulan. Intervensi gizi sensitif yang diarahkan untuk penyediaan bahan pangan yang cukup dan beragam , akses air bersih, sanitasi, akses layanan kesehatan, pendidikan gizi, jaringan pengaman sosial, dan peningkatan

pendapatan keluarga;

c. Sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
d. Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan daya beli;

e. Peningkatan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi dan penyuluhan;
f. Peningkatan akses terhadap air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih.

11. Sinergi antar lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat secara konvergen melalui program pembangunan ketahanan pangan dan gizi diperlukan dalam upaya pengentasan daerah rawan pangan agar berdampak pada penguatan ketahanan pangan wilayah secara berkelanjutan seperti:
    a. Memastikan dan monitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 bahan pangan;
    b. Melakukan pemantauan dan pengawasan komoditi pangan pokok dan strategi terhadap tindakan penimbunan oleh pedagang dan distributor/grosir;
    c. Melakukan pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
    d. Melakukan pemantauan dan evaluasi harga pangan pokok dan pangan strategis dalam mengantisipasi terjadi kenaikan harga;
    e. melakukan pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
    f. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar serta distribusi pangan lintas kabupaten/kota.

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan tujuh Agenda Pembangunan Nasional, yaitu: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

(2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan (polhukhankam) serta transformasi pelayanan publik.

Target Tujuan Pembangunan Pertanian (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan SDG-1 adalah pengentasan kemiskinan dan tujuan SDG-2 adalah mengakhiri kelaparan melalui ketahanan pangan, perbaikan gizi dan sistem pertanian berkelanjutan. Indikator tercapainya tujuan ini adalah apabila setiap orang, khususnya warga miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk ibu hamil, bayi, lansia. dan disabilitas memiliki akses atas pangan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Target menghilangkan kelaparan dan menjamin akses pangan bagi semua orang, dan target menghilangkan segala

bentuk kekurangan gizi dapat dicapai atau merupakan hasil dari pembangunan sistem pangan, perbaikan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. Data dan informasi tentang ketahanan pangan dan gizi yang komprehensif, akurat dan mutakhir dapat menjadi salah satu dasar bagi para pembuat keputusan dalam penetapan kebijakan dan program intervensi serta lokus program, baik di tingkat pusat maupun tingkat wilayah. Diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Indonesia, khususnya dalam mengentaskan kerawanan pangan dan gizi. Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam penentuan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi.

Oleh karena itu, pengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi mutlak diperlukan untuk mendukung peran tersebut. salah satunya melalui penyediaan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun untuk menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan

pangan dan gizi, sehingga dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan *(Food Security and Vulnerability Atlas)* atau FSVA sebagai instrumen untuk

monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme* (WFP). Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan *(Food Insecurity Atlas-FIA)* pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2009 diluncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan *(Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA)*, selanjutnya sejak tahun 2018 FSVA di-update setiap tahun. Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah.

Mengingat pentingnya FSVA sebagai dasar bagi penyusunan kebijakan dan program ketahanan pangan, maka pemutakhiran FSVA perlu dilakukan secara rutin agar mencerminkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan terbaru sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilakukan, tidak hanya pada tingkat nasional tetapi hingga tingkat kabupaten/kota. Sejalan dengan itu, pembangunan ketahanan pangan dan penanganan masalah kerawanan pangan perlu dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan sumber daya manusia berkualitas, tidak hanya pembangunan infrastruktur semata. FSVA diharapkan dapat menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, di mana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Berdasarkan Dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi

Tenggara adalah melakukan penyesuaian akibat terjadinya perubahan yang mendasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: perubahan kebijakan nasional dan bencana non alam Covid-19 sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan daerah salah satunya masalah pangan dan gizi. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan

sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, RPJMD ke-4 ditujukan untuk **"Terwujudnya Sultra Maju, Aman, Sejahtera dan Religius"** melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya berkualitas dan berdaya saing.

1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan Dan Gizi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pengertian ketahanan pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. berkelanjutan.

Kerangka konseptual ketahanan pangan dalam penyusunan FSVA 2025 (Gambar-1) dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan: ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan keamanan pangan di dalam keseluruhan pilar tersebut. Pilar **ketersediaan pangan** didefinisikan sebagai **kondisi tersedianya pangan** dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta impor dan bantuan pangan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi

Pilar **akses atau keterjangkauan pangan** didefinisikan sebagai **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan** yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Dalam kerangka ketahanan pangan, akses menjadi penting karena pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah bisa jadi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan fisik, ekonomi atau sosial.

Pilar pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan metabolisme zat gizi**. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan keamanan makanan dan minuman, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama

untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Untuk mendukung berjalannya ketiga pilar tersebut secara konvergen, diperlukan lingkungan strategis di tingkat nasional dan daerah yang kondusif, diantaranya: situasi politik dan ekonomi makro yang kondusif; perdagangan internasional dan domestik yang berkeadilan bagi pelaku usaha pangan (termasuk petani) dan konsumen (terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah); ketersediaan sumber daya alam yang pengelolaannya mengacu para prinsip pembangunan berkelanjutan; kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan kondisi iklim; serta ketersediaan infrastruktur dan teknologi serta inovasi yang mendukung bagi peningkatan aneka ragam produksi dan pengolahan pangan dengan pertumbuhan yang berlanjut setiap tahun. Untuk itu diperlukan sumberdaya dan lingkungan strategis diantaranya situasi politik dan ekonomi makro yang kondusif, perdagangan internasional dan domestik yang berkeadilan bagi produsen dan konsumen, ketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, kondisi iklim dan agro ekologi serta ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung peningkatan produksi pangan. Memadainya sumberdaya dan lingkungan strategis akan memudahkan kinerja ketiga pilar ketahanan pangan untuk mewujudkan tujuan akhirnya yaitu meningkatnya status pangan dan gizi rumah tangga maupun nasional. Status pangan dan gizi rumah tangga dan nasional tercermin dari sumberdaya manusianya yang dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

1.3. Indikator FSVA Provinsi

Indeks Ketahanan Pangan adalah Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

dapat digolongkan ke dalam dua komponen: Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Kronis, yang mencerminkan aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan serta pemanfaatan pangan (9 indikator). Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Transien, dicerminkan melalui indikator kerentanan terhadap bencana alam dan bencana lainnya (3 indikator).

Indikator yang digunakan dalam FSVA Provinsi terdiri dari 9 (sembilan) indikator kronis dan tiga indikator transien. Data yang digunakan dalam penyusunan FSVA Provinsi dapat disesuaikan dengan ketersediaan data dan kesepakatan Tim FSVA Provinsi.

Tabel 1.1 Indikator FSVA Provinsi 2025

Aspek	Indikator
A. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Kronis	
Ketersediaan Pangan	1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih (beras + jagung + ubi kayu + ubi jalar + sagu + stok + bantuan pangan beras CPP).
Keterjangkauan Pangan	2. Persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan.
	3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 (enam puluh lima) persen terhadap total pengeluaran.
	4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
Pemanfaatan Pangan	5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun (lima belas)
	6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
	7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk
	8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar

	9. Persentase angka kesakitan
B. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Transien	
Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Transien	1. Bencana alam yang terkait iklim
	2. Variabilitas curah hujan
	3. Kehilangan produks

1) **Aspek Ketersediaan Pangan**

Aspek ketersediaan Pangan dalam penyusunan FSVA diwakili oleh indikator rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. Ketersediaan Pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan Pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan Pangan dari pemerintah atau organisasi lain. Dalam penyusunan FSVA, ketersediaan Pangan didekati dari produksi Pangan wilayah, cadangan Pangan pemerintah di wilayah tersebut, dan bantuan Pangan, sementara untuk data perdagangan Pangan dan stok pedagang dapat digunakan apabila tersedia data pada tingkat kecamatan.

Pangan meliputi produk serealia, kacang-kacangan, minyak nabati, sayur-sayuran, buah-buahan, rempah, gula, dan produk hewani. Karena porsi utama dari kebutuhan kalori harian berasal dari sumber Pangan karbohidrat, yaitu sekitar separuh dari kebutuhan energi per orang per hari, maka yang digunakan dalam analisa kecukupan Pangan, yaitu karbohidrat yang bersumber dari produksi Pangan pokok serealia, yaitu padi, jagung, dan umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar) yang digunakan untuk memenuhi tingkat kecukupan Pangan pada tingkat provinsi maupun kecamatan. Bagi provinsi yang memiliki data komoditas sagu, dapat menambahkan komoditas tersebut dalam proses analisis.

A. Penghitungan Produksi Netto Pangan Serealia

1. Padi

- Kumpulkan data produksi padi untuk seluruh kecamatan pada satu provinsi (P). Biasanya bersumber dari Angka

Tetap (ATAP) dari BPS atau Dinas Pertanian.

- Kurangi dengan data Benih (s), Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan Padi (Pnet), nilai konversi untuk benih, pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Rumus 1. Perhitungan Netto Ketersediaan Padi

Benih (s)	= P x 0,90%
Pakan Ternak (f)	= P x 0,44%
Tercecer (w)	= P x 5,4%

$$Pnet = P - (s + f + w)$$

Faktor konversi untuk benih, pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) (Badan Pangan Nasional 2023).

- Kalikan data netto padi dengan Faktor Konversi (c) di masing-masing kecamatan untuk mendapatkan Produksi bersih beras (Rnet). Untuk seluruh kecamatan menggunakan Faktor Konversi masing-masing provinsi sesuai dengan Gambar 2.

Rumus 2. Perhitungan Produksi Bersih Beras

$$Rnet = c * Pnet$$

- Kurangi dengan data Benih (sr), Pakan (fr) dan Tercecer (wr) untuk mendapatkan data produksi bersih beras konsumsi (Rc), nilai konversi untuk benih, pakan, dan tercecer untuk beras masing- masing adalah:

Rumus 3. Perhitungan Susut Beras

Benih (sr)	= Rnet x 0%
Pakan Ternak (fr)	= Rnet x 0,17%
Tercecer (wr)	= Rnet x 2,5%

Rumus 4. Perhitungan Produksi Bersih Beras Konsumsi

$$Rc = Rnet - (sr + fr + wr)$$

2. **Jagung**

- Ambil data produksi jagung untuk seluruh kecamatan pada satu provinsi yang bersumber dari Angka Tetap (ATAP) dari BPS atau Dinas Pertanian. Angka produksi dikalikan 73,85% (tujuh puluh tiga koma delapan puluh lima persen) untuk mendapatkan angka produksi siap pakai/konsumsi (M).

Rumus 5. Perhitungan Angka Produksi Siap Pakai/Konsumsi

$$\text{Produksi Jagung (M)} = \text{Produksi} \times 73{,}85\%$$

- Kurangi dengan data Benih (s), Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan Jagung (Mnet), nilai konversi untuk benih, pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Rumus 6. Perhitungan Susut Jagung

Benih (s)	= M x 0,44%
Pakan Ternak (f)	= M x 64,38%v
Tercecer (w)	= M x 4,62%

Faktor konversi untuk benih, pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca NBM (Badan Pangan Nasional 2023).

- Produksi Netto Jagung (Mnet) dihitung dengan cara sebagai berikut:

Rumus 7. Perhitungan Produksi Netto Jagung

$$Mnet = M - (s + f + w)$$

3. **Umbi-umbian**

- **Ubi Kayu**

- Ambil data produksi ubi kayu untuk seluruh kecamatan pada satu provinsi (C). Biasanya bersumber dari Angka Tetap (ATAP) dari BPS atau Dinas Pertanian.

- ❖ Kurangi dengan data benih (s), Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan
- ❖ data netto ketersediaan Ubi Kayu (Cnet), nilai konversi untuk pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Rumus 8. Perhitungan Susut Ubi Kayu

Benih (s)	= C x 0,00%
Pakan Ternak (f)	= C x 0,43%
Tercecer (w)	= C x 0,05%

Faktor konversi untuk pakan ternak dan tercecer diambil dari NBM (Badan Pangan Nasional 2023).

- ❖ Produksi Netto Ubi Kayu (Cnet) dihitung dengan cara sebagai berikut:

Rumus 9. Perhitungan Produksi Netto Ubi Kayu

$$Cnet = C - (s + f + w)$$

- **Ubi Jalar**
  - ❖ Ambil data produksi ubi jalar untuk seluruh kecamatan pada satu provinsi (SP). Biasanya bersumber dari Angka Tetap (ATAP) dari BPS atau Dinas Pertanian.
  - ❖ Kurangi dengan data Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan ubi jalar (SPnet), nilai konversi untuk pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Rumus 10. Perhitungan Susut Ubi Jalar

Benih (s)	= SP x 00%
Pakan Ternak (f)	= SP x 0,77%

Faktor konversi untuk pakan ternak dan tercecer diambil dari NBM (Badan Pangan Nasional 2023).

❖ Produksi Netto Ubi Jalar (SPnet) dihitung dengan cara sebagai berikut:

Rumus 11. Perhitungan Produksi Netto Ubi Jalar

$$SPnet = SP - (f + w)$$

Untuk produksi bersih rata-rata ubi kayu dan ubi jalar (Tnet) agar setara dengan beras, maka harus dikalikan dengan 1/3 (satu per tiga) (1 (satu) kilogram beras atau jagung ekivalen dengan 3 (tiga) kilogram ubi kayu dan ubi jalar dalam hal nilai kalori), dengan perhitungan sebagai berikut:

Rumus 12. Perhitungan Produksi Bersih Rata-Rata Ubi Kayu dan Ubi Jalar

$$Tnet = 1/3 - (Cnet + SPnet)$$

- **Sagu**
  - ❖ Data produksi sagu untuk seluruh kecamatan pada satu provinsi (S) bersumber dari Dinas Pertanian.
  - ❖ Data produksi sagu dikurangi dengan data Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan Sagu (Snet), nilai konversi untuk tercecer adalah:

Rumus 13. Perhitungan Susut Sagu

Benih (s)	= S x 00%
Pakan Ternak (f)	= S x 00%
Tercecer (w)	= S x 0,72%

Faktor konversi untuk tercecer diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) (Badan Pangan Nasional 2023).

❖ Produksi Netto Sagu (S_{net}) dihitung dengan cara sebagai berikut:

Rumus 14. Perhitungan Produksi Netto Sagu

$$Snet = S - (s + f + w)$$

Maka, Produksi Netto Pangan Serealia (Padi, Jagung, umbi-umbian dan Sagu) atau P_{food}:

Rumus 15. Perhitungan Produksi Netto Pangan Serealia

$$Pfood = Rc + Mnet + Tnet + Snet$$

B. Penghitungan Ketersediaan Pangan Serealia Per Kapita Per Hari

Ketersediaan Pangan serealia per kapita per hari dihitung dari produksi netto pangan serealia (P_{food}) ditambah stok Pangan serealia (ST_{food}) dan bantuan pangan (B_{food}) lalu dibagi dengan jumlah penduduk (t_{pop}) yang ada di masing-masing wilayah kecamatan dalam 1 (satu) tahun. Data total penduduk tahun tengah (t_{pop}) kecamatan bersumber dari BPS.

Ketersediaan Pangan serealia per kapita per hari (F) dihitung dengan cara sebagai berikut:

Rumus 16. Perhitungan Ketersediaan Pangan serealia per kapita per hari

$$F = \frac{P_{food} + ST_{food} + B_{food}}{t_{pop} * 365}$$

Satuan untuk perhitungan ini adalah dalam Gram.

Perhitungan produksi Pangan tingkat kecamatan dilakukan dengan menggunakan data produksi untuk komoditas padi,

jagung, ubi kayu, ubi jalar dan atau sagu karena sumber energi utama dari asupan energi makanan berasal dari serealia dan umbi-umbian. Pola

konsumsi Pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan total kalori berasal dari tanaman serealia. Data rata-rata bersih dari komoditi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan atau sagu dihitung dengan menggunakan faktor konversi baku. Bantuan Pangan beras bersumber dari bantuan cadangan pangan pemerintah dan sumber data diperoleh dari Badan Pangan Nasional, OPD yang menangani urusan di bidang Pangan atau Bulog. Data total penduduk menggunakan data tengah tahun 2023.

C. Konsumsi Normatif

Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto Pangan serealia per kapita per hari adalah merupakan petunjuk kecukupan pangan pada satu wilayah. Konsumsi Normatif (C_{norm}) didefinisikan sebagai jumlah Pangan serealia yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi dari serealia. Pola konsumsi Pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan total kalori berasal dari serealia. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2.100 (dua ribu seratus) kilo kalori (WNPG IX, 2018), dan untuk mencapai 50% (lima puluh persen) kebutuhan kalori dari serealia dan umbi-umbian (menurut angka Pola Pangan Harapan), maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 (tiga ratus) gram serealia per hari. Oleh sebab itu dalam analisis ini, kita memakai 300 (tiga ratus) gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Perlu dijelaskan bahwa dalam analisis ini dipilih penggunaan

konsumsi normatif daripada penggunaan konsumsi aktual sehari- hari; karena konsumsi aktual (konsumsi sehari-hari) dipengaruhi oleh banyak hal di luar aspek ketersediaan Pangan itu sendiri (misalnya: daya beli, pasar dan infrastruktur jalan, kemampuan penyerapan serealia, kebiasaan/budaya, dan lain-lain).

D. Penghitungan Rasio Ketersediaan Pangan

Rasio Ketersediaan Pangan/Food consumption - availability ratio (IAV):

Rumus 17. Perhitungan Rasio Ketersediaan Pangan

$$\mathbf{I_{AV}} = \frac{C_{norm}}{F}$$

dimana,

C_{norm} : Konsumsi Normatif (300 gram);

dan F : Ketersediaan Pangan.

Jika nilai 'I_{AV}' lebih dari 1 (satu), maka daerah tersebut defisit Pangan, atau kebutuhan konsumsi normatif tidak bisa dipenuhi dari ketersediaan Pangan yang tersedia di daerah tersebut. Dan bila nilai 'I_{AV}' kurang dari 1 (satu), maka menunjukkan kondisi surplus Pangan di daerah tersebut.

1.4 Penentuan Range Indikator Individu

Penentuan jumlah range indikator individu menggunakan metode sebaran empiris atau mengikuti pengelompokkan yang sudah ditetapkan aturan nasional atau internasional yang berlaku. Penetapan range delapan indikator mengikuti pola sebaran empiris. Satu indikator, yaitu persentase balita stunting mengikuti aturan world health organization (WHO). Klasifikasi penentuan range indikator tercantum pada tabel 3.

Tabel 1.2. Range Indikator

INDIKATOR	RANGE
I. Ketersediaan Pangan	
1. Rasio konsumsi normatif karbohidrat terhadap ketersediaan Pangan	≥ 1,50
	1,25 - <1,50
	1,00 - <1,25
	0,75 - <1,00
	0,50 - <0,75
	< 0,50
II. Akses terhadap Pangan	
2. Persentase penduduk miskin	≥ 35
	25 - < 35
	20 - < 25
	15 - < 20
	10 - < 15
	<10
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk Pangan lebih dari 65 (enam puluh lima) persen terhadap total pengeluaran	≥ 70
	60 - <70
	50 - <60
	40 - <50
	30 - <40
	<30
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	≥ 50
	40 - < 50
	30 - < 40
	20 - < 30
	10 - < 20
	< 10

INDIKATOR	RANGE
III. Pemanfaatan Pangan	
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 (lima belas) tahun	< 6
	6 - < 6,5
	6,5 - < 7,5
	7,5 - < 8,5
	8,5 - < 9
	≥ 9
6. Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih	≥ 70
	60 - <70
	50 - <60
	40 - <50
	30 - <40
	< 30
7. Rasio jumlah Penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	≥ 30
	20 - < 30
	15 - < 20
	10 - < 15
	5 - < 10
	< 5
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*)	≥ 40
	30 - < 39
	20 - < 29
	< 20
9. Angka Kesakitan	>=17
	14 - <17
	12 - <14
	10 - <12
	7 - <10
	> 7

1.5 Analisis Komposit

Berdasarkan kesepakatan dalam kelompok kerja teknis FSVA, pendekatan metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek Ketahanan Pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang

dikembangkan oleh The Economist Intelligence

Unit (EIU) dalam penyusunan Global Food Security Index (EIU 2016 dan 2017) dan International Food Policy Research Institute (IFPRI) dalam penyusunan Gobal Hunger Index (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale 0 – 100 (nol sampai dengan seratus).
2. Menghitung skor komposit kecamatan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

Rumus 18. Perhitungan Rasio Ketersediaan Pangan

$$Y(j) = \sum_{i=1}^{9} a_i X_{ij} \quad \ldots\ldots (1)$$

Dimana:

Y_j	: Skor komposit kecamatan ke-j
a_i	: Bobot masing-masing indikator ke-i
X_{ij}	: Nilai standarisasi masing-masing *indicator* ke-i pada kecamatan ke-j
i	: Indikator ke 1, 2, ..., 9
j	: Kecamatan ke 1, 2, ...dst

Besaran bobot masing-masing indikator berdasarkan rekomendasi para ahli (expert judgement) yang berasal dari akademisi dan pemerintah (Tabel 4). Khusus untuk analisis wilayah kecamatan di perkotaan hanya menggunakan 8 (delapan) indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan Pangan, mengingat ketersediaan Pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antarwilayah. Oleh karena itu, pada perhitungan komposit wilayah

kecamatan di perkotaan indikator rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih tidak digunakan. Nilai bobot 0,30 (nol

koma tiga puluh) dari indikator aspek ketersediaan Pangan kemudian dialihkan kepada 8 (delapan) indikator lain secara proporsional berdasarkan

masing-masing aspek. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat Ketahanan Pangan suatu wilayah.

Tabel 1.3. Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kecamatan di Kabupaten	Kecamatan di Kota
Aspek Ketersediaan Pangan			
1.	Rasio kosumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	0,30	-
	Sub Total	**0,30**	-
Aspek Keterjangkauan Pangan			
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15	0,20
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk Pangan lebih dari 65% (enam puluh lima) terhadap total pengeluaran	0,075	0,125
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075	0,125
	Sub Total	**0,30**	0,45
Aspek Pemanfaatan Pangan			
5.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15	0,18
6.	Angka kesakitan	0,10	0,13
7.	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 (lima belas) tahun	0,05	0,08
8.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05	0,08
9.	Prevalensi balita stunting	0,05	0,08
	Sub Total	**0,40**	**0,55**

3. Mengelompokan kecamatan ke dalam 6 (enam) kelompok prioritas berdasarkan cut off point komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam

6 (enam) kelompok berdasarkan cut off point komposit. Cut off point komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator

individu dengan cut off point indikator individu hasil standarisasi z-score dan distance to scale 0-100 (nol sampai dengan seratus).

Rumus 19. Perhitungan Cut off point komposit ke-j

$$K(j) = \sum_{i=1}^{9} a_i C_{ij} \quad \text{..... (2)}$$

Dimana:
K_j : *cut off point* komposit ke-j
a_i : Bobot indikator ke-i
C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-i komposit ke-j
i : indikator ke 1,2,3,.....9
j : komposit ke 1,2,3,.....6

FSVA komposit menggunakan 6 (enam) prioritas. Pengelompokan prioritas komposit Ketahanan Pangan didasarkan pada sebaran nilai komposit dari masing-masing provinsi. Nilai cut off point komposit FSVA provinsi sebelumnya (tahun dasar/baseline) dapat dijadikan dasar pengelompokan nilai komposit di FSVA 2024. Prioritas 1 (satu) merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat Kerentanan Pangan wilayah yang paling tinggi (sangat rentan), sedangkan prioritas 6 (enam) menunjukkan wilayah dengan tingkat Ketahanan Pangan yang paling baik (sangat tahan). Dengan kata lain, wilayah prioritas 1 (satu) memiliki tingkat risiko kerawanan Pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah lain, sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah yang berada pada prioritas 1 (satu) tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rentan rawan

Pangan, juga sebaliknya wilayah pada prioritas 6 (enam) tidak berarti semua penduduknya tahan Pangan.

1.6 Pembacaan Hasil Analisis FSVA

Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam

gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gradasi hijau menggambarkan variasi ketahanan pangan. Warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan. Prioritas 1

(sangat rentan) digambarkan oleh warna merah tua, sedangkan prioritas 6 (sangat tahan) digambarkan dengan warna hijau tua.

Tabel 1.4 Pembacaan Hasil Analisis FSVA

Warna	Keterangan Warna
1	Sangat Rentan
2	Rentan
3	Agak Rentan
4	Agak Tahan
5	Tahan
6	Sangat Tahan

BAB II

SITUASI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2.1 Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil Analisis Kecamatan pada Wilayah Kabupaten

Peta ketahanan terhadap kerawanan pangan komposit ditetapkan melalui Analisis Pembobotan Ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara tahun 2024 dilihat dari peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA menunjukkan peningkatan di mana wilayah-wilayah yang rentan rawan pangan menjadi tahan pangan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mana masih terdapat wilayah yang rentan rawan pangan.

Dari total 202 kecamatan hasil analisis wilayah kabupaten tahun 2025, sebanyak 33 kecamatan (16,33%) masuk ke dalam Prioritas 1-3 (rentan rawan pangan) dan sebanyak 169 kecamatan (83,66%) lainnya telah masuk Prioritas 4-6 (tahan pangan) dengan rincian sebagai berikut: 2 kecamatan (0,99%) Prioritas 1 (sangat rentan), 9 kecamatan (4,45%)
prioritas 2 (rentan), 22 kecamatan (10,89%)Prioritas 3 (agak rentan), 41 kecamatan (20,21%) Prioritas 4 (agak tahan), 18 kecamatan (8,9%) Prioritas 5 (tahan), dan 110 kecamatan (54,45%) Prioritas 6 (sangat tahan).

Kabupaten di Sulawesi Tenggara secara umum, indikator yang menyebabkan kerentanan terhadap kerawanan pangan di 202 kecamatan adalah:

a. Tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan bersih per kapita.
b. Tingginya rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan

terhadap tingkat kepadatan penduduk

c. Tingginya angka kesakitan Tingginya persentase penduduk dibawah garis kemiskinan.
d. Tingginya persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.
e. Masih terdapat wilayah yang kekurangan air bersih

Secara umum kecamatan di wilayah kabupaten yang berada di kepulauan memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan lebih tinggi dibandingkan wilayah kecamatan yang bukan wilayah kepulauan dengan penyebab/karakteristik yang sama. Sebaran kecamatan rentan rawan pangan sebagai berikut:

a. Kecamatan yang masuk dalam **Prioritas 1** di **Kabupaten Muna** (Kec. Marobo) dan **Kabupaten Buton** Selatan (Kec. Batu Atas)
b. Kecamatan yang masuk **Prioritas 2** di **Kabupaten Muna** (Kec. Towea), **Kab. Konawe Selatan** (Kec. Tinanggea), **Kab. Wakatobi** (Kec. Binongko, Kec. Togo Binongko, Kec. Tomia Timur), **Kab Kolaka Timur** (Kec Ueesi), **Kab. Muna Barat** (Kec. Tiworo Utara) dan **Kab. Buton** Selatan (kec. Kadatua dan kec. lapandewa.
c. Kecamatan yang masuk **Prioritas 3** di **Kabupaten Buton** (Kec. Kapontori, Kec.Lasalimu Selatan, Kec. Wolowa), di **Kabupaten Muna** (Kec. Lohiya, Kec. Tongkuno), **Kab. Konawe Selatan** (Kec. Andolo Barat, Kec. Kolono Timur, Kec.Moramo), **Kabupaten Wakatobi** (Kec.Kaledupa, **Kec. Kaledupa Selatan**, Kec. Tomia dan Kec. Wangi- Wangi Selatan), **Kabupaten Kolaka Timur** (Kec. Uluiwoi), **Kabupaten Konawe Kepulauan** (Kec. Wawonii Tengah, Kec. Wawonii Tenggara dan Kec. Wawonii Timur), di **Kabupaten Buton Tengah** (Kec. Gu, Kec. Talaga Raya, Kec.Batauga, Kec. Sampolawa, Kec Siompu dan Kec. Siompu Barat),

Tabel. 2.1. Jumlah Kecamatan per Prioritas Komposit di Masing-masing Kabupaten

Nama Kabupatan	Prioritas Komposit						Total Kecamatan
	1	2	3	4	5	6	
Buton			3	3		1	7
Muna	1	1	2	6	5	7	22
Konawe					1	27	28
Kolaka				2	1	9	12
Konawe Selatan		1	3	11	2	8	25
Bombana				12		10	22
Wakatobi		3	4	1			8
Kolaka Utara						15	15
Butan Utara					3	3	6
Konawe Utara					1	12	13
Kolaka Timur		1	1			10	12
Konawe Kepulauan			3	1	2	1	7
Muna Barat		1		2	2	6	11
Buton Tengah			2	3	1	1	7
Buton Selatan	1	2	4				7
Total	**2**	**9**	**22**	**41**	**18**	**110**	**202**

Sumber. Hasil Analisis FSVA tahun 2025

Kabupaten yang memiliki wilayah kecamatan dengan tingkat kerentanan sangat rawan kerawanan pangan tinggi (Prioritas 1) adalah kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Selatan (0,99%). Sebaliknya wilayah kecamatan dengan kategori sangat tahan (Prioritas 6) berada di 16 Kabupaten atau 110 kecamatan (54,45%).

Wilayah Kecamatan yang masuk dalam Prioritas 1-3 (3 mm2 kecamatan) perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten.

Hasil Analisis Wilayah Perkotaan

Secara umum dari hasil analisis wilayah kecamatan di perkotaan memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah kecamatan di kabupaten. Dari 2 kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kota Kendari dan Kota Bau-bau, tidak terdapat kecamatan masuk rentan terhadap kerawanan

pangan, ke 2 kota tersebut masuk kelompok Prioritas 5 dan 6 (tahan terhadap kerawanan pangan).

Faktor Indikator yang berpengaruh di daerah rentan rawan pangan perkotaan di Sulawesi Tenggara adalah Tingginya persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Tabel. 2.2. Jumlah Kecamatan per Prioritas Komposit di Masing-masing Kota

Nama Kota	Prioritas Komposit						Total Kecamatan
	1	2	3	4	5	6	
Kendari						11	11
Bau-bau					1	7	8
Total					1	18	19

Sumber. Hasil Analisis FSVA tahun 2025

Hasil Analisis Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 dengan jumlah kecamatan 221, yang masuk dalam kategori Prioritas 1 sebanyak 2 kecamatan (0,99%), Prioritas 2 sebanyak 9 kecamatan (4,45%) dan Prioritas 3 yaitu sebanyak 22 kecamatan (10,89%), tersebar di beberapa Kabupaten dan kota.

Adapun wilayah kecamatan di beberapa Kabupaten yang masuk Prioritas 2 dan Prioritas 3 di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu:

a. **Prioritas 2**
   1. Buton Selatan (kecamatan Kadatua)
   2. Muna (kecamatan Towea)

b. **Prioritas 3**
   1. Bombana (kecamatan Poleang Selatan);
   2. Konawe Kepulauan (kecamatan Wawonii Timur Laut dan Wawonii Tengah);
   3. Muna Barat (kecamatan Maginti).

Gambar. 2. Sebaran Jumlah Kecamatan Rentan Rawan Pangan Prioritas 1 sampai Prioritas 3 Hasil Analisis Komposit Per Kecamatan di Setiap Kab./Kota Tahun 2024



Sumber. Hasil Analisis FSVA tahun 2024

Adapun wilayah kecamatan di beberapa Kabupaten/Kota yang masuk Prioritas 4 dan Prioritas 6 tahan terhadap kerawanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu:

a. **Prioritas 4**
   1. Buton (kecamatan Lasalimu Selatan, Siotapina dan Wabula);
   2. Muna (kecamatan Batalaiworu, Maligano, Napabalano, Pasir Putih, Tongkuno Selatan dan Watopute);
   3. Kolaka (kecamatan Latambaga dan Taori);
   4. Konawe Selatan (kecamatan Andoolo, Baito, Benua, Buke, Kolono, Landono, Laonti, Moramo Utara, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Sabulakoa dan Wolasi);
   5. Bombana (kecamatan Kabaena, Kabaena Utara, Kabaena Selatan, Kabaena Barat, Kabaena Timur, Kabaena Tengah, Kep. Masaloka Raya, Poleang, Poleang Barat, Poleang Selatan, dan Poleang Tengah);

6. Wakatobi (kecamatan Wangi-wangi);
7. Konawe Kepulauan (kecamatan Wawonii Barat);

8. Muna Barat (kecamatan Barangka dan Maginti);
9. Buton Tengah (kecamatan Mawasangka Timur, Sangia Wambulu, dan Talaga Raya);

b. Prioritas 5

1. Muna (kecamatan Kabangka, Kabawo, Kontunaga, Lasalepa dan Wakorumba Selatan);
2. Konawe (kecamatan Latoma);
3. Kolaka (kecamatan Iwoimendaa);
4. Konawe Selatan (kecamatan Angata, Lainea);
5. Buton Utara (kecamatan Kambowa, Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara);
6. Konawe Utara (kecamatan Asera);
7. Konawe Kepulauan (kecamatan Wawonii Selatan dan Wawonii Utara);
8. Muna Barat (kecamatan Kusambi, Sawerigadi);
9. Buton Tengah (kecamatan Mawasangka);
10. Kota Bau-Bau (Kelurahan Sorawolio).

c. Prioritas 6

1. Muna (kecamatan, Batukara, Bone, Kabawo, Katobu, Lasalepa, Lohia, Maligano, Marobo, Napabalano, Parigi, Pasi kolaga);
2. Konawe (kecamatan Abuki, Amonggedo, Aanggaberi, Asinua, Besilutu, Bondoala, Kapoiala, Konawe, Lalonggasumeeto, Lambuya, Meluhu, Morosi, Onembute, Padangguni, Pondidaha, Puriala, Routa, Sampara Soropia, Tongauna, Tongauna Utara, Uepai, Unaaha, Wawotobi, Wonggeduku, Wonggeduku Barat);
3. Kolaka (kecamatan Baula, Kolaka, Polinggona, Pomalaa, Samaturu, Tanggetada, Watubangga, Wolo, dan Wundulako);
4. Konawe Selatan (kecamatan Andoolo, Andoolo Barat,Angata,

Baito, Basala, Buke, Konda, Laeya, Lainea, Lalembuu, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, dan Tinanggea);

5. Bombana (kecamatan Lantari Jaya, Mata Oleo, Mata Usu, Poleang Tenggara, Poleang Timur, Poleang Utara, Rarowatu, Rarowatu Utara, Rumbia, dan Tontonunu);
6. Kolaka Utara (kecamatan Batu putih, Katoi, Kodeoha, Lambai, Lasusua, Ngapa, Pakue, pakue Tengah, Pakue Utara, porehu, rante Angin, Tiwu, Tolala, Watunoha dan Wawo);
7. Buton Utara (kecamatan Bonegunu, Kulisusu, Wakorumba);
8. Konawe Utara (kecamatan Andowia, Landawe, Langgikima, Lasolo Kepulauan, Lembo, Molawe, Motui, Oheo, Sawa, Wawolesea, dan Wiwirano);
9. Kolaka Timur (kecamatan Aere, Dangia, Ladongi, Lalolae, Lambandia, Loea, Mowewe, Poli-polia, Tinondo dan Tirawuta,);
10. Konawe Kepulauan (kecamatan Wawonii Timur Laut);
11. Muna Barat (kecamatan Lawa, Napano kusambi, Tiworo Kepulauan, Tiworo Selatan dan Tiworo Tengah);
12. Buton Tengah (kecamatan Lakudo);
13. Kendari (kecamatan Abeli, Baruga, Kadia, Kambu, Kendari, Kendari Barat, Mandonga, Nambo, Poasia, Puuwatu, dan Wua-wua);
14. Baubau (kecamatan Batupoaro, Betomabari, Bungi, Kokalakuna, Lea-lea, Murhum, dan Wolio).

Gambar. 3 Sebaran Jumlah Kecamatan Tahan Terhadap Rentan Rawan Pangan Prioritas 4 dan Prioritas 6 Hasil Analisis Komposit Per Kecamatan di Setiap Kab./Kota Tahun 2024



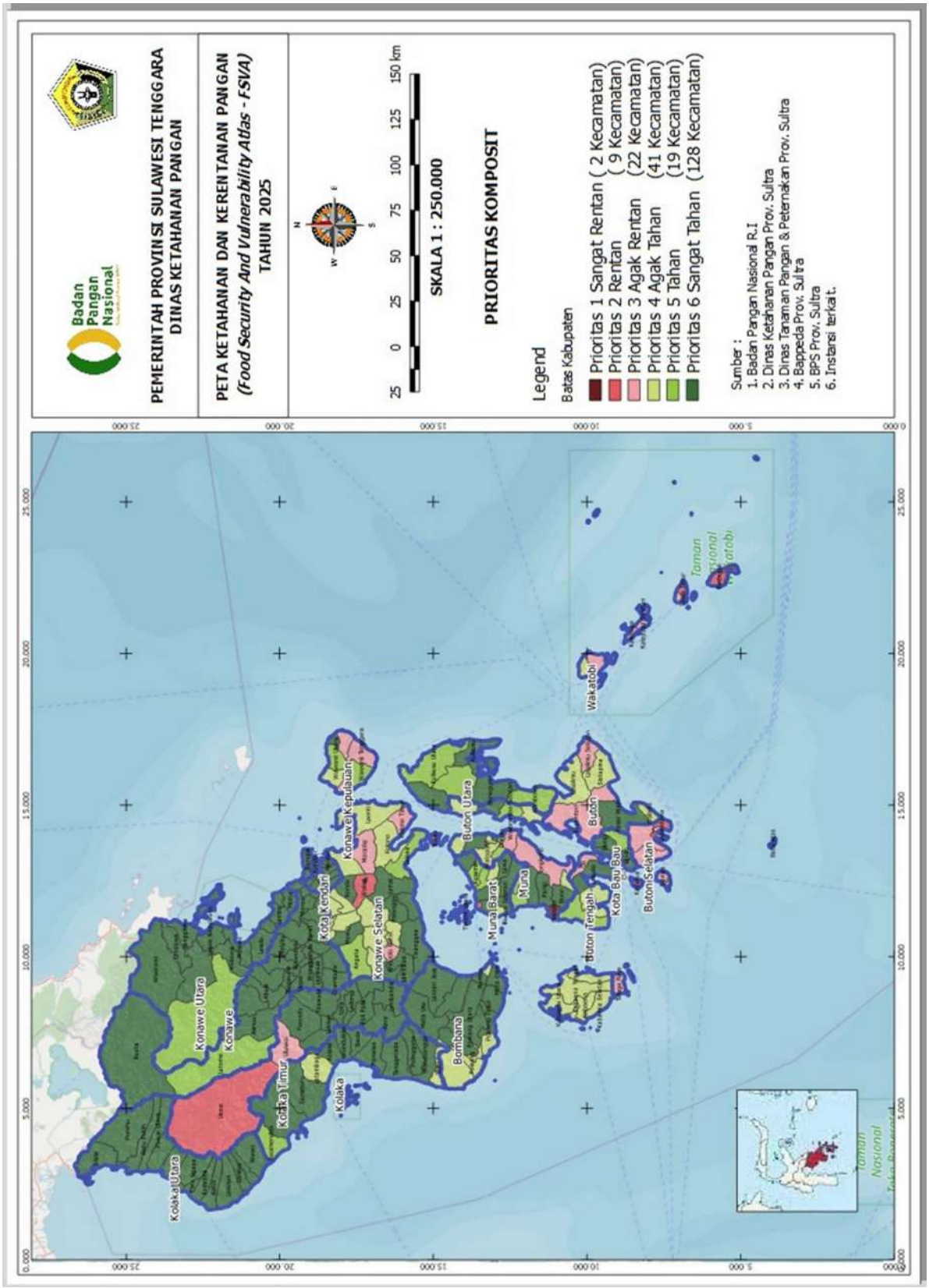
Sumber. Hasil Analisis FSVA tahun 2024

2.2 Perubahan Status Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Perubahan status ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara tidak terlepas dengan ada perubahan situasi pangan global dan terjadinya inflasi di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, ini merupakan tantangan yang luar biasa besar. Semua ini mempengaruhi ketahanan pangan, baik secara global, nasional, bahkan sampai di tingkat rumah tangga, khususnya bagi rumah tangga miskin. Kondisi ini telah menyebabkan berbagai gangguan pada sistem pangan yang bermuara pada kenaikan harga pangan, yang mengakibatkan kesulitan sebagian penduduk Sulawesi Tenggara mendapatkan pangannya. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal menghadapi Kondisi perubahan iklim global, geopolitik, serta terjadinya inflasi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara mengharuskan

mempersiapkan diri untuk ketersediaan dan ketahanan pangan dengan mengembangkan komoditas pertanian strategis yang akan ditanam di wilayah Sulawesi Tenggara adalah padi, jagung, bawang merah, cabe rawit, cabe besar dan kedelai. Sulawesi Tenggara memiliki potensi yang tinggi di

sektor pertanian, namun belum dikelola dengan baik. Di samping itu, program-program pengentasan daerah rentan rawan pangan terus digalakkan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah seperti:

1. Program Gerakan Pangan Murah dalam rangka penanganan inflasi;
2. Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah;
3. Program Sosialisasi dan edukasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan (B2SA);
4. Program Promosi Keamanan pangan;
5. Program penanganan balita stunting, dan
6. Program-program lainnya yang menyentuh masyarakat
7. Program penanganan kerawanan pangan.


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA)
TAHUN 2025
SKALA 1 : 250.000
PRIORITAS KOMPOSIT
Legend
Batas Kabupaten
Prioritas 1 Sangat Rentan (2 Kecamatan)
Prioritas 2 Rentan (9 Kecamatan)
Prioritas 3 Agak Rentan (22 Kecamatan)
Prioritas 4 Agak Tahan (41 Kecamatan)
Prioritas 5 Tahan (19 Kecamatan)
Prioritas 6 Sangat Tahan (128 Kecamatan)
Sumber :
1. Badan Pangan Nasional R.I
2. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra
3. Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Prov. Sultra
4. Bappeda Prov. Sultra
5. BPS Prov. Sultra
6. Instansi terkait.
Kolaka Utara
Kolaka Timur
Kolaka
Konawe Utara
Konawe
Kota Kendari
Konawe Kepulauan
Konawe Selatan
Bombana
Muna Barat
Muna
Buton Utara
Buton
Buton Tengah
Kota Bau Bau
Buton Selatan
Wakatobi
Taman Nasional Wakatobi

BAB III
KETERSEDIAAN PANGAN

Dalam penyusunan FSVA, aspek ketersediaan pangan diwakili oleh indikator rasio konsumsi normatif karbohidrat terhadap ketersediaan pangan yang didekati dari aspek produksi dan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan definisi tersebut, data impor atau perdagangan antar wilayah tidak digunakan karena terbatasnya ketersediaan data sampai dengan level kecamatan. Selain itu, wilayah yang mengandalkan penyediaan pangannya dari wilayah lain juga rentan terhadap gangguan/shock akibat perubahan harga, bencana alam maupun gangguan lain yang mempengaruhi distribusi bahan pangan. Maka dari itu pendekatan produksi domestik dipandang masih relevan untuk mewakili indikator aspek ketersediaan pangan. Apabila data aliran pangan impor ke daerah atau perdagangan antar wilayah tersedia di masa depan, maka penggunaannya dapat menyempurnakan hasil analisis FSVA.

Ketersediaan Pangan adalah ketersediaan pangan secara fisik di suatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik (netto), perdagangan pangan dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Aspek ketersediaan pangan dalam penyusunan FSVA didekati hanya pada aspek produksi pangan wilayah dan cadangan pangan pemerintah di wilayah tersebut, sementara itu data perdagangan pangan, stok

pedagang, dan bantuan pangan tidak semua tersedia pada tingkat kecamatan.

Dalam penyusunan Peta FSVA, aspek ketersediaan pangan diwakili oleh indikator Rasio Konsumsi Normatif karbohidrat terhadap ketersediaan pangan yang didekati dari aspek produksi dan cadangan pangan pemerintah daerah. Berdasarkan definisi di tersebut, selain produksi domestik ketersediaan pangan juga dapat dipenuhi dari cadangan pangan dan impor

atau perdagangan antar wilayah. Hanya beberapa kabupaten/kota yang mempunyai data cadangan pangan karena keterbatasan data ketersediaan data sampai level kecamatan. Selain itu, kabupaten/kota yang mengandalkan pangannya dari wilayah lain juga rentan terhadap gangguan akibat perubahan harga, bencana alam maupun gangguan lain yang mempengaruhi distribusi bahan pangan. Sehingga, pendekatan produksi domestik dipandang masih relevan untuk mewakili indikator aspek ketersediaan pangan. Apabila data cadangan pangan dan perdagangan antar kabupaten/kota level kecamatan tersedia di masa depan, maka penggunaannya dapat menyempurnakan hasil analisis FSVA.

Analisis indikator Rasio Konsumsi Normatif terhadap ketersediaan pangan diwakili oleh kelompok bahan pangan karbohidrat yang bersumber dari produksi pangan pokok serealia terdiri dari padi, jagung, dan umbi- umbian (ubi kayu dan ubi jalar) yang digunakan untuk memenuhi tingkat kecukupan pangan pada tingkat provinsi maupun kecamatan. Bagi provinsi yang memiliki data komoditas sagu, dapat menambahkan komoditas tersebut dalam proses analisis. Penggunaan sumber karbohidrat juga didasarkan pada fakta bahwa pangan sumber karbohidrat menyumbang 50% dari angka kecukupan konsumsi energi harian yang direkomendasikan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Adapun ditingkat ketersediaan angka kecukupan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari. Produksi Pangan sumber karbohidrat lainnya tidak dianalisis karena data hingga level kecamatan masih sangat terbatas.

Padi

Data produksi padi Sulawesi Tenggara selama dua tahun terakhir

mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 41,52% tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebesar 40,50% dengan pertumbuhan rata-rata 3%. Untuk ketersediaan produksi komoditas pangan berupa beras masih tercukupi untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Walaupun capaian produksi lebih tinggi dari produksi rata-rata selama tahun terakhir, akan tetapi rata-rata pertumbuhan komoditas relatif kecil jika dibandingkan

dengan rata-rata pertumbuhan penduduk. Perlu upaya-upaya dalam peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk.

Produksi padi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 sebanyak 555.836,08 ton, meningkat dibanding produksi padi tahun 2023 sebanyak 479.407,25 ton.

Tabel 3.1 Produksi Padi dan Produksi Beras di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota	Produksi Padi (ton)		Produksi Beras (ton)		Persentase (%)	Persentase (%)
	2023	2024	2023	2024	2024	2024
Buton	6.429,67	6.041,31	3.692,43	3.469,41	-6,04	-6,43
Muna	2.369,05	2.466,08	1.360,49	1.416,23	4,10	3,94
Konawe	151.057,72	216.342,48	86.749,30	124.240,99	43,22	30,18
Kolaka	52.616,99	47.443,66	30.216,85	27.245,91	-9,83	-10,90
Konawe Selatan	78.908,27	83.804,30	45.315,38	48.127,06	6,20	5,84
Bombana	69.129,34	77.222,41	39.699,54	44.347,24	11,71	10,48
Wakatobi	-	-	-	-	-	-
Kolaka Utara	5.897,75	6.283,48	3.386,95	3.608,48	6,54	6,14
Buton Utara	2.540,79	2.842,28	1.459,12	1.632,28	11,87	10,61
Konawe Utara	8.272,57	7.037,23	4.653,38	4.041,34	-14,93	-15,14
Kolaka Timur	84.435,84	88.841,86	48.489,74	50.813,29	5,22	4,57
Konawe Kepulauan	482,30	632,18	276,99	363,05	31,08	23,70
Muna Barat	5.742,29	5.461,96	3.297,67	3.136,69	-4,88	-5,13
Buton Tengah	27,39	17,04	15,73	9,79	-37,79	-60,67
Buton Selatan	69,10	112,33	64,51	64,51	62,56	38,47
Kota Kendari	2.165,79	2.190,22	1.243,78	1.257,79	1,13	1,11
Kota Baubau	9.431,98	9.457,26	5.416,58	5.431,09	0,27	0,27
Sulawesi Tenggara	**479.407,25**	**555.836,08**	**275.313,62**	**319.205,15**		

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Kerangka Sampel Area (KSA) dan Survei Ubinan Tahun 2023 – 2024

Jagung

Di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun untuk komoditas jagung mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan yaitu dari 67.629,46 ton dibanding dengan tahun 2023 naik menjadi sebesar

124.981,35. Sebagian besar produksi jagung digunakan sebagai konsumsi

pangan karbohidrat dan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Upaya peningkatan produksi jagung melalui beberapa strategi yaitu:

1. Penggunaan teknologi pertanian modern: Penggunaan traktor, mesin panen, dan sistem irigasi yang efisien, meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
2. Pengembangan varietas unggul: Pengembangan varietas jagung yang tahan terhadap hama dan penyakit, serta adaptif dengan perubahan iklim.
3. Peningkatan kualitas benih: Penggunaan benih berkualitas tinggi dan sertifikasi benih untuk memastikan kualitas tanaman.
4. Pengelolaan tanah yang baik: Penggunaan pupuk organik, pengelolaan air yang efektif, dan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah.
5. Pelatihan dan pendampingan: Pelatihan dan pendampingan petani untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang teknologi pertanian modern.

Tabel 3.2 Produksi Jagung di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota		Produksi (Ton) Tahun 2023	Produksi (Ton) Tahun 2024
1		*2*	*3*
1	Buton	1.292,33	1.494,47
2	Muna	11.567,78	22.702,60
3	Konawe	2.712,61	2.169,35
4	Kolaka	3.046,85	6.730,91
5	Konsel	10.349,01	29.420,94
6	Bombana	506,80	2.862,29
7	Wakatobi	112,31	82,24
8	Kolaka Utara	4.341,25	8.409,68
9	Buton utara	3.702,85	3.462,73
10	Konawe Utara	1.033,00	4.418,90
11	Kolaka Timur	3.567,59	21.084,70
12	Konawe Kepulauan	94,62	0,00
13	Muna Barat	20.969,20	17.599,34
14	Buton Tengah	1.812,71	1.032,18
15	Buton Selatan	1.695,09	2.220,50
16	Kota Kendari	622,01	1.055,80
17	Kota Bau-Bau	203,47	234,71
	Sulawesi Tenggara	**67.629,46**	**124.981**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Kerangka Sampel Area (KSA) dan Survei Ubinan Tahun 2023 - 2024

Ubi Kayu

Ubi kayu merupakan salah satu komoditas pangan strategis di Indonesia, yang memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan bahan baku industri. Produksi ubi kayu masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan lahan, perubahan iklim dan kualitas benih. Dengan penggunaan teknologi pertanian modern, pengembangan varietas unggul dan pengelolaan tanah yang baik, produksi ubi kayu meningkat signifikan. Hal ini berdampak positif pada ketahanan pangan nasional, pendapatan petani dan pengurangan impor. Ubi kayu menjadi simbol ketahanan pangan Indonesia. Petani dengan gigih mengembangkan tanaman ini,

meningkatkan produksi dan kualitas. Mereka membuktikan bahwa kerja keras dan inovasi dapat mengubah kehidupan dan membangun masa depan yang lebih baik.

Produksi ubi kayu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 sebanyak 112.450,97 ton. Ubi kayu merupakan salah satu pangan lokal sumber karbohidrat yang disukai oleh masyarakat sehingga menjadi salah satu alternatif komoditas unggulan untuk diversifikasi pangan terutama di kabupaten-kabupaten kepulauan di Sulawesi Tenggara.

Tabel 3.3 Produksi Ubi Kayu di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2024

	Kabupaten/Kota	Produksi (Ton) Tahun 2023	Produksi (Ton) Tahun 2024
1	Buton	5.790,86	4.209,77
2	Muna	11.219,26	17.262,11
3	Konawe	4.832,10	2.348,56
4	Kolaka	5.479,49	4.466,48
5	Konsel	17.206,21	25.245,73
6	Bombana	1.406,78	3.381,50
7	Wakatobi	7.408,88	5.721,49
8	Kolaka Utara	527,53	393,33
9	Buton utara	18.156,73	19.600,27
10	Konawe Utara	237,96	471,05
11	Kolaka Timur	2.451,96	2.426,62
12	Konawe Kepulauan	1.483,09	663,44
13	Muna Barat	3.851,60	4.434,50
14	Buton Tengah	5.998,03	7.717,23
15	Buton Selatan	22.029,06	11.078,89
16	Kota Kendari	3.667,53	2.348,53
17	Kota Bau-Bau	515,65	681,47
	Sulawesi Tenggara	**112.262,71**	**112.450,97**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023 - 2024

Ubi Jalar

Ubi jalar, tanaman yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia selama ribuan tahun, kini menjadi simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal. Dengan berbagai varietas yang unik dan kaya akan nutrisi, ubi jalar menjadi sumber pangan yang

sehat dan berkelanjutan. Petani ubi jalar dengan gigih mengembangkan tanaman ini, meningkatkan produksi

dan kualitas, serta mempertahankan tradisi dan kearifan lokal. Ubi jalar menjadi lambang ketahanan dan kekuatan. Petani yang dengan setia merawat tanaman ini membuktikan bahwa kerja keras, kesabaran dan kearifan lokal dapat mengubah kehidupan dan membangun masa depan yang lebih baik. Ubi jalar, lebih dari sekadar pangan, menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi generasi mendatang.

Produksi ubi jalar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 19.994,67 ton dibandingkan tahun 2023 mencapai sebesar 14.040,15 ton, dengan produksi tertinggi dihasil oleh Kabupaten Buton Utara dengan total produksi 11.818,81 ton, selanjutnya diikuti oleh Kabupaten-Kabupaten lain. Produksi ubi jalar dimanfaatkan untuk konsumsi pangan lokal dan dijadikan olahan makanan seperti keripik serta olahan makanan lainnya.

Tabel 3.4 Produksi Ubi Jalar di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2024

	Kabupaten/Kota	Produksi (Ton) Tahun 2023	Produksi (Ton) Tahun 2024
1	Buton	788,14	810,56
2	Muna	1.454,65	1.167,54
3	Konawe	1.003,61	556,66
4	Kolaka	566,97	466,33
5	Konsel	938,50	1.013,80
6	Bombana	373,01	668,01
7	Wakatobi	143,24	99,35
8	Kolaka Utara	321,71	254,02
9	Buton utara	11.818,81	6.401,88
10	Konawe Utara	17,50	161,15
11	Kolaka Timur	582,43	393,73
12	Konawe Kepulauan	73,79	3,58
13	Muna Barat	624,86	463,86
14	Buton Tengah	482,83	803,49
15	Buton Selatan	342,56	228,21
16	Kota Kendari	385,85	295,63
17	Kota Bau-Bau	76,21	91,42

	Sulawesi Tenggara	19.994,67	13.879,23

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2024

3.1. Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita terhadap Produksi

Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi dihitung dengan cara membagi konsumsi normatif per kapita per hari (300 g) terhadap rata-rata ketersediaan bersih serealia dan umbi-umbian utama per kapita per hari. Ketersediaan bersih serealia dan umbi-umbian utama merupakan produksi yang tersedia untuk pangan, yaitu produksi total dikurangi dengan penggunaan untuk pakan, bibit dan komponen tercecer, dan telah dihitung konversi yang berlaku untuk masing-masing komoditas pangan. Angka konversi yang digunakan dalam perhitungan ketersediaan bersih menggunakan angka konversi dalam Neraca Bahan Makanan Tahun 2022. Ketersediaan bersih per kapita per hari dihitung dengan cara membagi ketersediaan bersih serealia dan umbi-umbian utama terhadap jumlah penduduk suatu wilayah lalu dikalikan 365 hari. Sebagai catatan, nilai kalori ubi kayu dan ubi jalar masing-masing 1/3 dari nilai kalori beras atau jagung, sehingga produksi ubi kayu dan ubi jalar masing-masing dibagi 3 untuk mendapatkan nilai yang ekuivalen dengan serealia.

Hasil analisis rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealia tahun 2025 untuk wilayah kabupaten menunjukkan dari 202 kecamatan bahwa Kecamatan yang masuk Prioritas 1 sampai 3 dalam analisis rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealia sebanyak 110 kecamatan (54,45%) tahun 2025, dibandingkan
dengan tahun 2024 sebanyak 102 kecamatan (50,5%), ini menunjukkan bahwa rasio konsumsi normatif per kapita terhadap

produksi bersih wilayah kecamatan rentan terhadap rawan pangan mengalami peningkatan. Sedangkan kecamatan yang masuk dalam Prioritas 4 sampai 6 sebanyak 92 kecamatan (45,54%) tahun 2025 dan dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 100 kecamatan (49,5%) ini menunjukkan bahwa wilayah tahan terhadap rawan pangan mengalami Penurunan. Adapun Kecamatan yang masuk dalam Prioritas 1 sampai 3 terdapat di Kabupaten sebagai berikut:

1. **Prioritas 1;**
   - Kabupaten Buton sebanyak 6 (Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Siontapina, Wabula, Wolowa).
   - Kabupaten Muna sebanyak 16 (Kecamatan Batalaiworu, Batukara, Bone, Duruka, Kabangka, Kontunaga, Lohiya, Maliogano, Marabo, Napabalano, Parigi, Pasi Kolaga, Pasir Putih, Tongkuno, Tongkuno Selatan, Towea, Wakorumba Selatan, Watopute).
   - Kabupaten Kolaka sebanyak 3 (Kecamatan Kolaka, Latambaga, Taori).
   - Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 21 (Kecamatan Andoolo, Andoolo Barat, Angata, Baito, Benua, Buke, Kolono, Kolono Timur, Konda, Linea, Landono, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Palangga, Palangga Selatan, Ranoomeeto, Ranomeeto Barat, Sabulakoa, Tinanggea, Wolasi).
   - Kebupaten Bombana sebanyak 15 (Kecamatan Kabaena, Kabaena Barat, Kabaena Selatan, Kabaena Tengah, Kabaena Timur, Kabaena Utara, Kep. Masoloka Raya, Mata Oleo, Poleang, Poleang Barat, Poleang Selatan, Poleang Tengah, Poleang Tenggara, Rarowatu, Rumbia Tengah).
   - Kabupaten Wakatobi sebanyak 8 (Kecamatan Binongko, Kedupa, Kaledupa Selatan, Togo Binongko, Tomia, Tomia Timur, Wangi-wangi Selatan, Wangi-Wangi).
   - Kabupaten Buton Utara sebanyak 3 (Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Wakorumba Utara).
   - Kabupaten Konawe Utara sebanyak 3 (Kecamatan Andowia, Asera, Langgikima).
   - Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 2 (Kecamatan Ueesi dan Uluiwoi).
   - Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 5 (Kecamatan Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Tenggara, Wawonii Timur dan

Wawonii Utara).

- Kabupaten Muna Barat sebanyak 5 (Kecamatan Barangka, Kusambi, Maginti, Toiworo Tengah dan Tiworo Utara).

- Kabupaten Buton Tengah sebanyak 7 (Kecamatan Gu, Lakudo, Mawasangka, mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Sangia Wambulu, Talaga Raya).
- Kabupaten Buton Selatan sebanyak 7 (Kecamatan Batauga, Batu Atas, Kadatua, Lapandewa, Sampolawa, Siompu dan Siompu Barat).

2. **Prioritas 2;**
   - Kabupaten Bombana sebanyak 1 (Kecamatan Tontonunu).
   - Kabupaten Buton Utara sebanyak 1 (Kecamatan Kambowa).
   - Kabupaten Muna Barat sebanyak 1 (Kecamatan Lawa).
   - Kota Bau-Bau sebanyak 1 (Kel. Betoambari)

3. **Prioritas 3;**
   - Kabupaten Buton Sebanyak 1 (Kecamatan Pasar Wajo)
   - Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 2 (Kecamatan Laeya, Mowia).
   - Kabupaten Buton Utara sebanyak 2 (Kecamatan Bonegunu dan Kulisusu Barat).
   - Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 1 (Kecamatan Wawonii Selatan)

Adapun wilayah kecamatan yang masuk dalam Prioritas 4 sampai 6 berada di beberapa kabupaten sebagai berikut:

a. **Prioritas 4;**
   1. Kabupaten Muna sebanyak 4 (Kecamatan Bone, Kabawo, Lasalepa, Parigi).
   2. Kabupaten Kolaka sebanyak 1 (Kecamatan Pomalaa).
   3. Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 1 (Kecamatan Lalembuu).
   4. Kabupaten Bombana sebanyak 1 (Kecamatan Matausu).

5. Kabupaten Konawe Utara sebanyak 1 (Kecamatan Landawe).
6. Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 1 (Kecamatan Wawonii Timur Laut).

b. **Prioritas 5;**

1. Kabupaten Muna sebanyak 1 (Kecamatan iKontukowuna).
2. Kabupaten Kolaka sebanyak 1 (Kecamatan Iweimondaa).
3. Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 1 (Keccamatan Basala).
4. Kabupaten Bombana sebanyak 1 (Kecamatan Rumbia).
5. Kabupaten Konawe Utara sebanyak 1 (Kecamatan Lasolo).
6. Kabupaten Muna Barat sebanyak 5 (Kecamatan Napabalano, Sawerigadi, Tiworo Kepulauan, Tiworo Selatan dan Wadaga)

c. **Prioritas 6;**

1. Kabupaten Muna sebanyak 1 (Kecamatan Katobu).
2. Kabupaten Konawe sebanyak 28 (Kecamatan Abuki, Amonggedo, Anggaberi, Anggalomoare, Asinua, Besulutu, Bondoala, Kapolala, Konawe, Lalonggosumeeto, Lambuya, Latoma, Meluhu, Morosi, Onembute, Padangguni, Pondidaha, Puriala, Routa, Sampara, Soropia, Tongauna, Tongauna Utara, Uepai, Unaaha, Wawotobi, Wonggeduku).
3. Kabupaten Kolaka sebanyak 7 (Kecamatan Baula, Samaturu, Tanggetada, Watubangga, Wolo dan Wundulaka).
4. Kabupaten Bombana sebanyak 4 (Kecamatan Lantari Jaya, Poleang Timur, Poleang Utara).
5. Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 2 (Kecamatan Batu Putih, Katoi, Kadeoha, Lambai, Lasusua, Ngapa, Pakue, Pakue Tengah, Pakue Utara, Porehu, Rante Angin, Tiwu, Tolala, Watunoha, Wawo).
6. Kabupaten Konawe Utara sebanyak 8 (Kecamatan Lasolo Kepulauan, Lembo, Molawe, Motui, Oheo, Sawa, Wawolesa, Wiwirano).

7. Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 10 (Kecamatan Aere, Dangia, Ladongi, Lalolae, Lambadia, Loea, Mowewe, Poli Polia, Tinondo, Tirawuta).

Untuk perhitungan rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih perkotaan Produksi wilayah tidak kecamatan digunakan. di

ketersediaan pangan tersebut antara lain disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi serealia dan umbi-umbian, ketidaksesuaian dan/ atau kurangnya ketersediaan lahan untuk produksi serealia dan umbi-umbian, perluasan areal perkebunan, pertambangan dan penambahan areal untuk perumahan. Selain itu juga jumlah sagu maupun sumber karbohidrat lainnya yang dikonsumsi penduduk di beberapa Kabupaten/kota seperti kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, dan sebagian kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara hanya sebahagian kabupaten yang diikutsertakan dalam perhitungan FSVA karena keterbatasan ketersediaan data pada level kecamatan. Selanjutnya tahun berikutnya penyediaan data sumber karbohidrat lain selain beras, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar perlu dioptimalkan, agar rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan bagi wilayah-wilayah yang konsumsi sumber karbohidratnya lebih beragam dapat disampaikan dengan akurat.

Penyediaan pangan sebagian besar kecamatan di perkotaan mengalami defisit. Hal ini terjadi karena umumnya kecamatan yang ada di perkotaan sebagian tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan memenuhi ketersediaan pangannya.

3.2 Capaian Ketersediaan Pangan

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan diperlukan strategi yang tepat dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penanggulangan dampak Perubahan Iklim. Upaya pengendalian serangan OPT baik dengan cara

fisik/mekanik, biologis, kimiawi dan kultur teknis dilakukan terhadap komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, aneka umbi dan aneka kacang sehingga tidak menjadi puso. Selain dari sisi produksi, penyediaan pangan juga tidak lepas dari sisi keamanan pangan.

Capaian ketersediaan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2024 mengalami Peningkatan produksi, rata-rata produksi pangan terutama Ketersediaan beras mencapai 319.205,15 ribu ton dibandingkan dengan rata-rata produksi tahun 2022 sebesar 275.313,62 ribu ton. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjamin keamanan pangan dengan penyediaan beras pemerintah adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana usaha pertanian seperti ketersediaan air irigasi, alat dan mesin pertanian, serta luas baku lahan pertanian yang lebih baik.

3.3 Tantangan Ketersediaan Pangan

Tantangan ketersediaan pangan yaitu Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, produktivitas, dan penanganan pasca panen serta pengendalian ***food loss and waste*** merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan pangan di masa mendatang. Hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk di proyeksikan akan meningkat. Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti oleh peningkatan pendapatan dan proporsi kelompok usia produktif berbanding lurus dengan peningkatan permintaan pangan.

Selain jumlahnya yang meningkat, pergeseran preferensi masyarakat terhadap makanan akan meningkatkan standar kualitas pangan dan permintaan jenis-jenis pangan tertentu. Pergeseran preferensi pangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan, pengetahuan, dan informasi terutama pada kelas pendapatan menengah di perkotaan sehingga lebih peduli pada

kesehatan dan gaya hidup *(lifestyle).*

Sebagai negara agraris, Indonesia telah mengekspor hasil pertanian terutama tanaman tahunan, yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan kakao dalam beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan pengimpor beberapa komoditas pangan seperti gandum, daging sapi, buah-buahan, sayuran dan susu. Pemanfaatan sumber karbohidrat alternatif pangan lokal seperti sagu, ubi kayu jagung, kentang, talas dan

sumber protein alternatif seperti daging ayam, telur dan ikan harus terus diupayakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras, impor gandum dan daging sapi.

Permasalahan tingginya kehilangan pangan (*food loss)* dan pemborosan pangan (*food waste)* dalam sistem pangan juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan pangan. Berdasarkan *the State of Food and Agriculture* (SOFA) FAO 2019, empat belas persen dari makanan yang diproduksi secara global diperkirakan hilang selama tahap pasca panen sebelum mencapai ritel. Buah-buahan dan sayur-sayuran menjadi komoditas dengan tingkat kehilangan dan pemborosan pangan yang lebih tinggi dibandingkan komoditas serealia dan kacang-kacangan untuk seluruh rantai pasokan pangan. Secara umum, penyebab kehilangan pangan antara lain karena waktu panen tidak tepat, penanganan pasca panen tidak tepat, kondisi penyimpanan yang tidak memadai, serta pengemasan dan distribusi yang tidak sesuai. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal teknis telah menyediakan dan memperbaharui alat-alat pasca panen seperti *combine harvester*, mesin pengering, mesin penggiling, *screen house*, mesin pendingin dan lain-lain telah berkontribusi terhadap penurunan kehilangan pangan. Pemborosan pangan terjadi karena perilaku/ kebiasaan yang tidak tepat sehingga makanan yang masih layak konsumsi menjadi terbuang sia-sia. Untuk memperbaiki sikap dan kebiasaan seseorang dalam memperlakukan makanan, membutuhkan waktu dan pemahaman yang tepat. Oleh karena itu edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya menghargai makanan dan mengelola bahan pangan harus terus dilakukan dan diarahkan sejak dini. Diperlukan pula upaya yang lebih masif untuk mendorong penurunan *food loss*

and waste ditingkat produsen, distributor, retail, industri pangan dan rumah tangga. Pertanian Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara juga dihadapkan pada persoalan sumber daya manusia. Selain itu juga jumlah tenaga kerja sektor pertanian juga terus menurun, banyak tenaga kerja lebih memilih ke sektor pertambangan dan sektor jasa.

Tantangan lain yang masih dihadapi dalam penyediaan pangan adalah:

- Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian terus menerus akibat persaingan penggunaan lahan terutama dengan sektor perumahan dan industri, perkebunan dan pertambangan;
- Meningkatnya kekeringan dan banjir sebagai dampak dari perubahan iklim global;
- Penurunan kualitas tanah dan kesuburan karena kerusakan lingkungan;
- Hama dan penyakit pada tanaman pangan yang dapat berpotensi mengurangi tingkat produksi;
- Produktivitas petani yang masih rendah disebabkan oleh kurangnya akses ke pasar untuk menjual hasil produksi dan kurangnya akses ke fasilitas modal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang merupakan salah satu prioritas strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara (RPJMP Sulawesi Tenggara) Tahun 2018-2023.

Kebijakan pembangunan pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara berkaitan dengan pembangunan ketahanan pangan, yaitu:

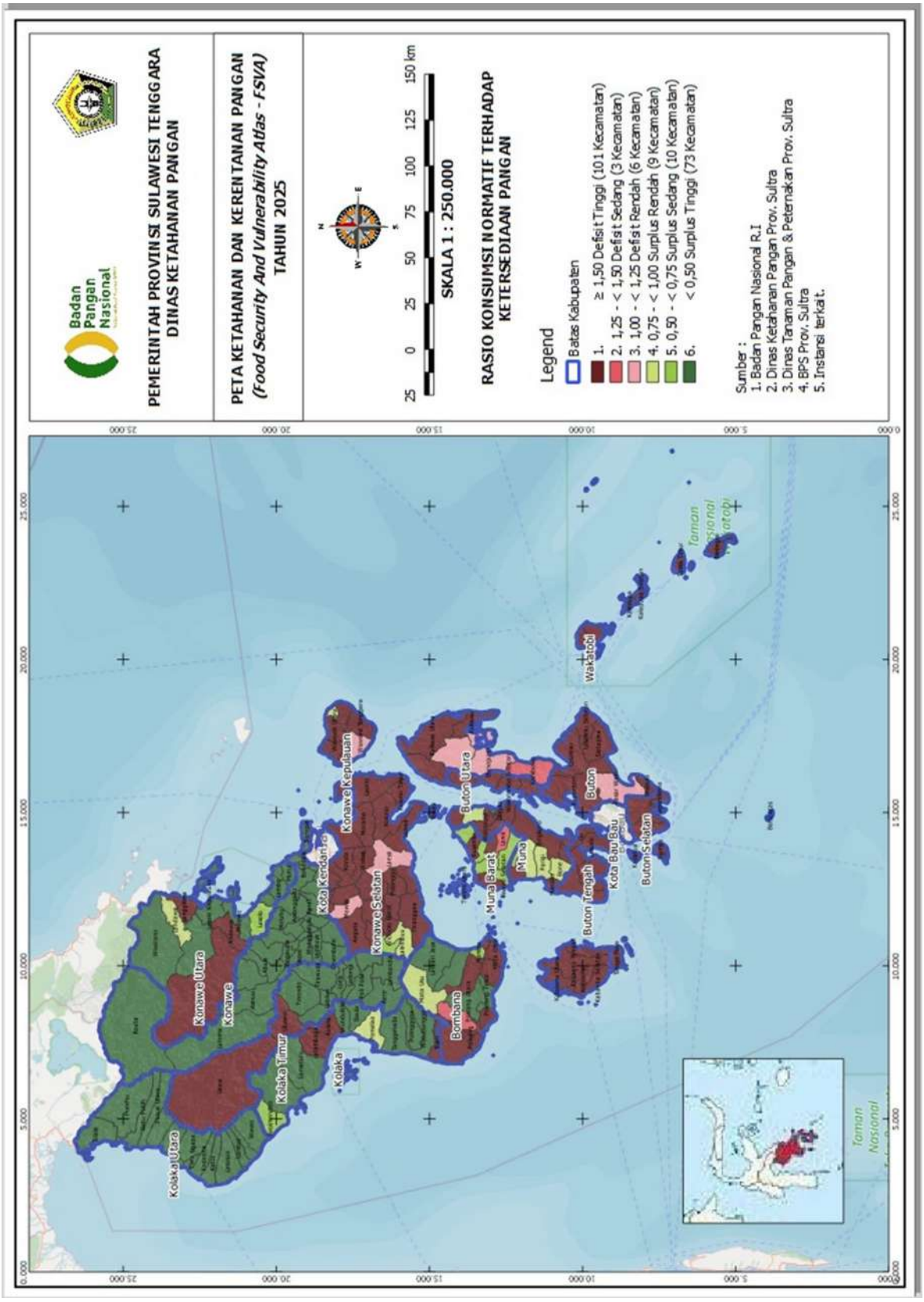
1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, *al sintan*, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT);
2. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang

berkelanjutan;

3. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas *public goods* melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usaha tani;
5. Pembukaan lahan baru untuk lahan pertanian;

6. Jaminan penguasaan lahan produktif;
7. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani;
8. Penguatan kelembagaan perbenihan dan pembibitan nasional;
9. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan;
10. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah;
11. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif;
12. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usaha tani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional;
13. Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi;
14. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu;
15. Penguatan sistem perkarantinaan pertanian;
16. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani;
17. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota;

18. Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
19. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akun tabel dan *good governance*.


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA)
TAHUN 2025
SKALA 1 : 250.000
RASIO KONSUMSI NORMATIF TERHADAP
KETERSEDIAAN PANGAN
Legend
Batas Kabupaten
1. ≥ 1,50 Defisit Tinggi (10 Kecamatan)
2. 1,25 - < 1,50 Defisit Sedang (3 Kecamatan)
3. 1,00 - < 1,25 Defisit Rendah (6 Kecamatan)
4. 0,75 - < 1,00 Surplus Rendah (9 Kecamatan)
5. 0,50 - < 0,75 Surplus Sedang (10 Kecamatan)
6. < 0,50 Surplus Tinggi (73 Kecamatan)
Sumber :
1. Badan Pangan Nasional R.I
2. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra
3. Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Prov. Sultra
4. BPS Prov. Sultra
5. Instansi terkait.
Kolaka Utara
Konawe Utara
Konawe
Kolaka Timur
Kolaka
Konawe Kepulauan
Kota Kendari
Konawe Selatan
Bombana
Buton Utara
Muna Barat
Muna
Buton Tengah
Buton
Kota Baubau
Buton Selatan
Wakatobi
Taman Nasional

BAB IV
AKSES TERHADAP PANGAN

Tujuan utama dari penyelenggaraan pangan adalah untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. Akses pangan berhubungan dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, cadangan, pembelian, barter, hadiah, sajian dalam suatu pertemuan, pinjaman dan bantuan pangan.

Akses Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Akses terhadap pangan terkait dengan permasalahan fisik, ekonomi, sosial. Di suatu daerah pangan dapat tersedia dengan cukup, namun secara fisik tidak dapat diakses oleh suatu rumah tangga tertentu karena secara fisik terpencil sehingga akses fisik terbatas, secara ekonomi tidak memiliki akses karena daya beli atau pendapatan rendah, atau secara sosial pangan yang tersedia tidak sesuai dengan preferensinya. Aspek fisik yang membatasi akses pangan diantaranya terkait sarana dan prasarana distribusi, infrastruktur daerah dan tingkat produksi pangan. Pada aspek ekonomi faktor yang terkait akses yaitu pendapatan, harga pangan dan non pangan, serta kesempatan kerja. Sementara pada aspek sosial faktor terkait akses adalah preferensi terhadap makanan, pendidikan dan pengetahuan tentang pangan dan gizi, serta konflik sosial/perang. Berdasarkan beberapa faktor tersebut, aspek akses pangan bagi rumah tangga pada FSVA diperkirakan atau didekati (proksi) melalui tiga indikator.

Indikator-indikator yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah:

- Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
- Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan; dan
- Persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.

4.1 Akses Terhadap Listrik

Listrik merupakan salah satu infrastruktur dasar yang perlu dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi pada seluruh wilayah yang ada di Indonesia terutama di kawasan timur Indonesia terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana beberapa wilayah yang memerlukan akses terhadap listrik. Keberadaan infrastruktur ketenagalistrikan di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar akses pekerjaan. Hal ini merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthi et al. 2014; Sabarella 2005; dan Sofiati 2009). Perkembangan rumah tangga tanpa akses listrik selama lima tahun terakhir cenderung menurun yang menunjukkan upaya untuk peningkatan rasio elektrifikasi listrik oleh pemerintah berjalan dengan cukup baik. Rasio rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh positif terhadap kerentanan pangan dan gizi.

Investasi pemerintah provinsi dalam penyediaan fasilitas listrik terus meningkat, di mana rumah tangga berdampak pada peningkatan ketahanan pangan. Akses rumah tangga terhadap listrik merupakan indikator pendekatan yang baik untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi, peningkatan peluang penghidupan suatu daerah dan peluang bagi kondisi kehidupan rumah tangga yang lebih baik.

Tabel. 4.1. Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik per Kabupaten tahun 2023 - 2024

No.	Nama KAB_KOTA	Jumlah Kecamatan	NoELECTRIC/ TANPA LISTRIK	
			TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	BUTON	7	0	0
2	MUNA	22	0	0

3	KONAWE	28	0	0
4	KOLAKA	12	0	0
5	KONAWE SELATAN	25	0	0
6	BOMBANA	22	0	0

No.	Nama KAB_KOTA	Jumlah Kecamatan	NoELECTRIC/ TANPA LISTRIK	
7	WAKATOBI	8	0	0
8	KOLAKA UTARA	15	0	0
9	BUTON UTARA	6	0	0
10	KONAWE UTARA	13	0	0
11	KOLAKA TIMUR	12	0	0
12	KONAWE KEPULAUAN	7	0	0
13	MUNA BARAT	11	0	0
14	BUTON TENGAH	7	0	0
15	BUTON SELATAN	7	0	0
16	KENDARI	11	0	0
17	BAUBAU	8	0	0
	Prov. Sulawesi Tenggara	**221**	**0**	**0**

Sumber: SUSENAS yang diestimasi dengan SAE, 2024.

Akses listrik rumah tangga tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara semua rumah tangga yang ada di 221 wilayah kecamatan hampir semua tersedia layanan fasilitas listrik.

4.2 Kemiskinan

Penduduk miskin adalah bagian dari populasi penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri dan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerentanan pangan. Tanpa akses ekonomi yang memadai, rumah tangga dan individu cenderung memiliki pilihan yang terbatas untuk mendapatkan pangan beragam.

Kerentanan pangan, ditinjau dari sisi akses ekonomi, salah satunya disebabkan karena rendahnya kemampuan atau daya beli pangan yang terkait erat dengan kemiskinan. Kemampuan daya beli yang rendah yang diindikasikan oleh angka kemiskinan

menyebabkan rumah tangga dan

individu cenderung memiliki pilihan yang terbatas untuk mendapatkan pangan yang beragam dan bergizi.

Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi kerawanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015; Kavosi et al. 2014; Riyadi et al. 2011; Ramli et al. 2009; Lubis 2010; Sofiati 2009; dan Misselhorn 2005).

Pada rumah tangga yang masuk kategori miskin, proporsi pengeluaran untuk makanan mendominasi dengan proporsi terbesar untuk konsumsi karbohidrat, seperti beras dan pangan berbahan baku terigu. Standar kemiskinan secara global mengacu pada *Purchasing Power Parity* Bank Dunia dimana seseorang yang hidup di bawah ambang batas US$ 1,25-per hari dikategorikan sebagai penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS 2024).

Dari hasil analisis FSVA Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 dengan data Indikator tahun 2024 Prioritas Kemiskinan kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota yang masuk kategori prioritas 1, 2 sampai dengan prioritas 3 yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas 1
   - Kabupaten Wakatobi sebanyak 8 (Kecamatan Binongko,

Kaledupa, Kaledupa Selatan, Togo Binongko, Tomia, Wangi-wangi Selatan, dan Wangi-wangi).

- Kota Bau-bau sebanyak 3 (Kecamatan Kokalukuna, Murhum, dan Wolio).

2. Prioritas 2
   - Kabupaten Konawe sebanyak 4 (Kecamatan Amonggedo, Asinua, Latoma, dan Routa).
   - Kabupaten Buton Utara sebanyak 4 (Kecamatan Bonegunu, Kambowa, Kulisusu, dan Kulisusu Utara).
   - Kabupaten Buton Selatan sebanyak 1 (Kecamatan Kadatua).
   - Kota Bau-bau sebanyak 1 (Kecamatan Betoambari).

3. Prioritas 3
   - Kabupaten Konawe sebanyak 2 (Kecamatan Besulutu, dan Onembute).
   - Kabupaten Buton Utara sebanyak 1 (Kecamatan Kulisusu Barat).

Tabel. 4.2 Persentase Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2024

Tahun	Presentase Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan
2015	12,90
2016	12,88
2017	12,81
2018	11,63
2019	11,24
2020	11,00
2021	11,98
2022	15,56
2023	11,43
2024	11,21

Sumber: SUSENAS, SAE, BPS

4.3 Pangsa Pengeluaran Pangan

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, maka porsi

pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap

makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori *Engel* menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. *Shan* (1994) menyatakan bahwa pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk pendapatan permanen, selain itu juga merupakan Indikator yang penting untuk melihat malnutrisi kronis dalam jangka panjang. Menurut Suhardjo (1996) dan Azwar (2004) pangsa pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, makin besar pangsa pengeluaran untuk pangan berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil, demikian sebaliknya (Deaton dan Muellbauer 1980). Apabila distribusi pengeluaran untuk pangan lebih besar dari 65 persen dari total pengeluaran maka distribusi pengeluaran rumah tangga tersebut dikategorikan buruk (BKP dan WFP 2010; WFP 2009). Kerentanan pangan wilayah ditentukan oleh persentase jumlah rumah tangga yang memiliki distribusi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran pada katagori buruk (lebih dari 65 persen).

Hasil Analisis Persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan >65% di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 dengan Indikator tahun 2024, dimana kabupaten/Kota dengan persentase tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Buton Selatan sebesar 36,51% , hal ini terjadinya penurunan pangsa pengeluaran pangan >65% disebabkan oleh adanya perbaikan daya beli masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan pangannya. Adapun kecamatan yang masuk dalam prioritas 1 sampai dengan prioritas 3, hanya satu kecamatan (Prioritas-1) berada di Kabupaten Buton Selatan kecamatan Batu Atas.

Hasil analisis tahun 2025 dengan indikator tahun 2024, persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan 65% Jumlah kecamatan yang

masuk dalam klasifikasi baik 220, adapun kecamatan yang masuk dalam prioritas 4 sampai dengan prioritas 6 berada di beberapa Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Prioritas-5;
   - Kabupaten Muna sebanyak 3 (Kecamatan Marobo, Pasir Putih dan Towea).
   - Kabupaten Muna Barat sebanyak 1 (Kecamatan Tiworo Utara).
   - Kabupaten Wakatobi sebanyak 2 (Kecamatan Binongko dan Togo Binongko).
   - Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 6 (Kecamatan Aere, Lalolae, Mowewe, Tinondo, Tirawuta, dan Uluiwoi).
   - Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 1 (Kecamatan Wawonii Timur Laut)
   - Kabupaten Buton Selatan sebanyak 5 (Kecamatan Batauga, Kadatua, Sampolawa, Siompu, dan Siompu Barat).
2. Prioritas-6;
   - Kabupaten Buton sebanyak 7 (Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasar Wajo, Siotapina, Wabula, dan Wolowa)
   - Kabupaten Muna sebanyak 19 (Kecamatan Batalaiworu, Batukara, Bone, Duruka, Kabangka, Kabawo, Katobu, Kontu Kowuna, Kontunaga, Lasalepa, Lohia, Moligano, Napabalano, Parigi, Pasi Kolaga, Tongkuno, Tongkuno Selatan, Wakorumba Selatan, dan Watopute).
   - Kabupaten Konawe 28 (Kecamatan Abuki, Amonggedo, Anggaberi, Anggolomoare, Asinua, Besulutu, Bondoala, Kapoiala, Konawe, Lalonggasumeeto, Lambuya, Latoma, Meluhu, Morosi, Onembute, Pandangguni, Pondidaha, Puriala,

Routa, Sampara, Soropia, Tongauna, Tongauna Utara, Uepai, Unaaha, Wawotobi, Wonggeduku, dan Wonggeduku Barat).

- Kabupaten Kolaka sebanyak 12 (Kecamatan Baula, Iwoimendaa, Kolaka, Latambaga, Polinggona, Toari, Watubangga, Wolo, dan Wundulako).

- Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 25 (Kecamatan Andoolo, Andoolo Barat, Angata, Baito, Basala, Benua, Buke, Kolono, Kolono Timur, Konda, Laeya, Lainea, Lalembuu, Landono, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Sabulakoa, Tinanggea dan Wolasi).
- Kabupaten Bombana sebanyak 22 (Kecamatan Kabaena, Kabaena Utara, Kabaena Selatan, Kabaena Timur, Kabaena Barat, Kabaena Tengah, Rumbia, Mata Oleo, Kep. Masaloka Raya, Rumbia Tengah, Rarowatu, Rarowatu Utara, Mata Usu, Lantari Jaya, Poleang Timur, Poleang Utara, Poleang Selatan, Poleang Tenggara, Poleang, Poleang Barat, tontonunu, dan Poleang Tengah).
- Kabupaten Wakatobi sebanyak 6 (Kecamatan Tomia, Tomia Timur, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Wangi-wangi, dan Wangi-wangi Selatan).
- Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 15 (Kecamatan Rante Angin, Lambai, Wawo, Lasusua, Katoi, Kodeoha, Tiwu, Ngapa, Watunohu, Pakue, Pakue Utara, Pakue Tengah, Batu Putih, Porehu, dan Tolala).
- Kabupaten Buton Utara sebanyak 6 (Kecamatan Bonegunu, Kambowa, Wakorumba, Kulisusu, Kulisusu Barat, dan Kulisusu Utara).
- Kabupaten Konawe Utara sebanyak 13 (Kecamatan Andowia, Asera, Landawe, Langgikima, Lasolo, Lembo, Lasolo Kepulauan, Molawe, Motui, Oheo, Sawa, Wawolesea, dan Wiwirano).
- Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 6 (Kecamatan Dangia,

Ladongi, Lambandia, Loea, Aere, Poli-polia, dan Ueesi).

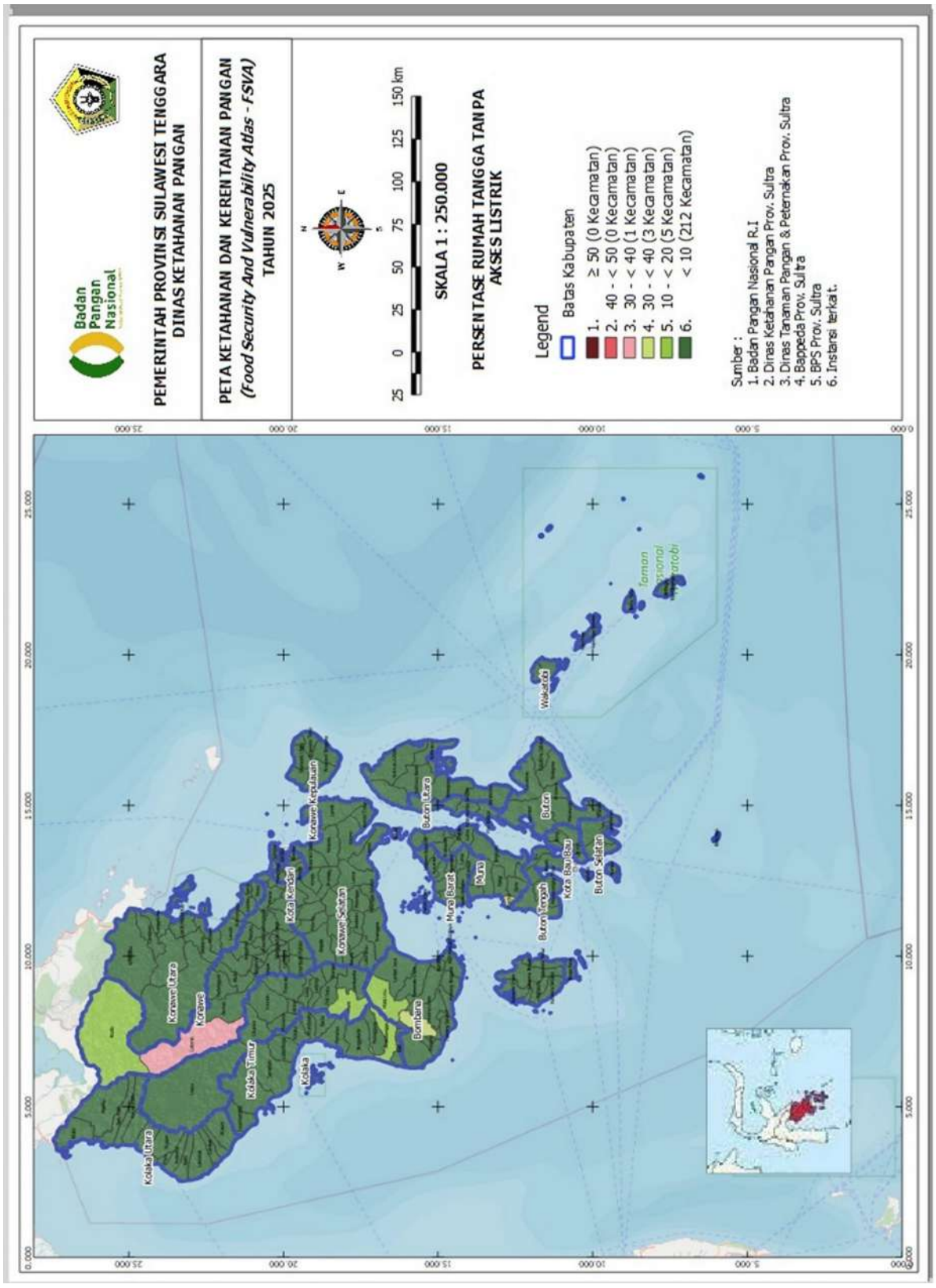
- Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 6 (Kecamatan Wawonii Tenggara, Wawonii Timur, Wawonii Utara, Wawonii Selatan, Wawonii Tengah, dan Wawonii Barat).
- Kabupaten Muna Barat sebanyak 10 (Kecamatan Barangka, Kusambi, Lawa, Maginti, Napano Kusambi, Sawerigadi, Tiworo Kepulauan, Tiworo Selatan, Tiworo Utara, dan Wadaga).

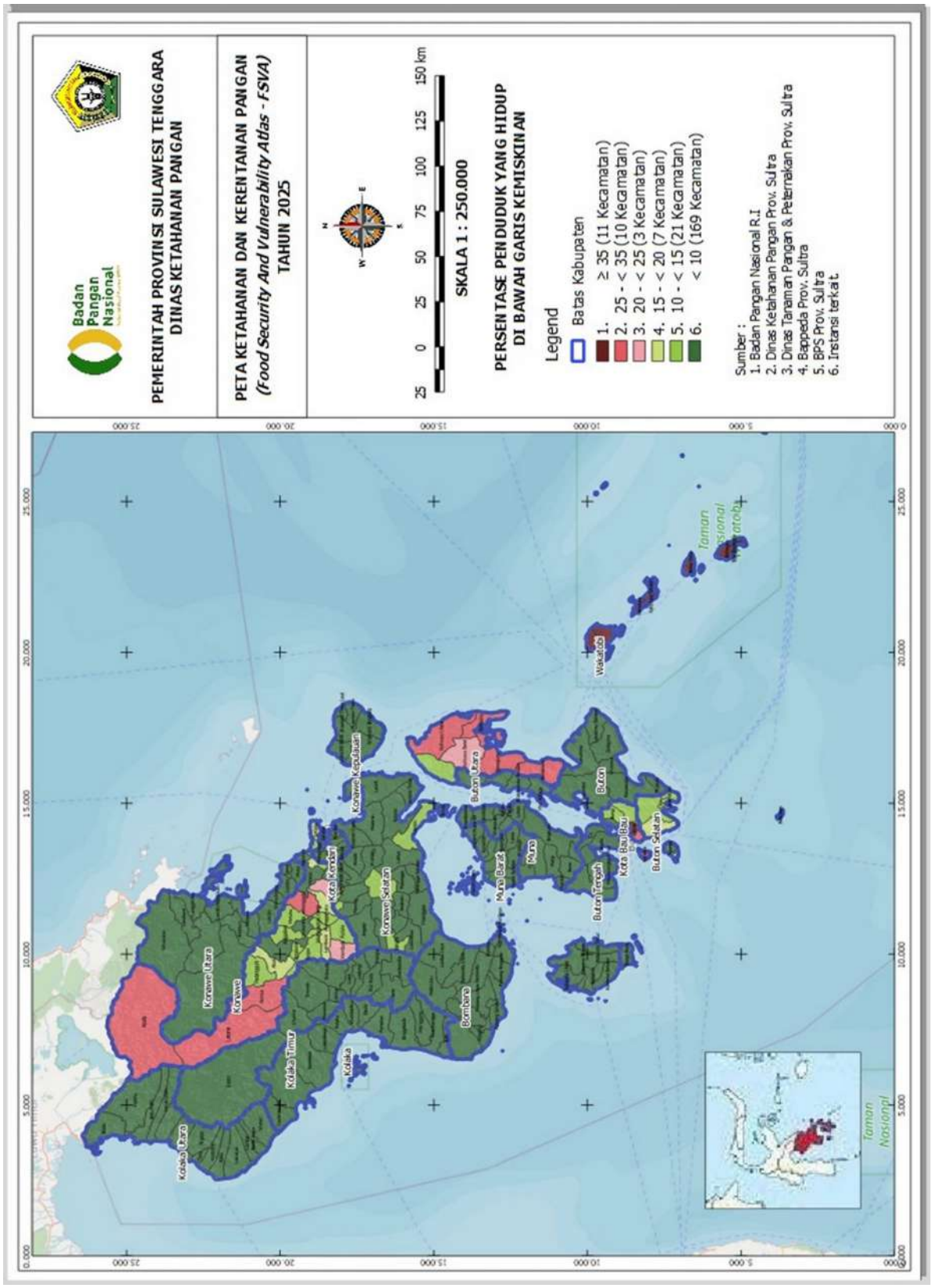
- Kabupaten Buton Tengah sebanyak 7 (Kecamatan Talaga Raya, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Lakudo, GU, dan Sangia Wambulu).
- Kabupaten Buton Selatan sebanyak 1 (Kecamatan Lapandewa).
- Kota Kendari sebanyak 11 (Kecamatan Mandonga, Baruga, Puuwatu, Kadia, Wua-wua, Poasia, Abeli, Kambu, Kendari, Nambo, dan Kendari Barat).
- Kota Baubau sebanyak 8 (Kecamatan Betoambari, Murhum, Batupuaro, Wolio, Kokalukuna, Sorawolio, Lea-lea, dan Bungi).

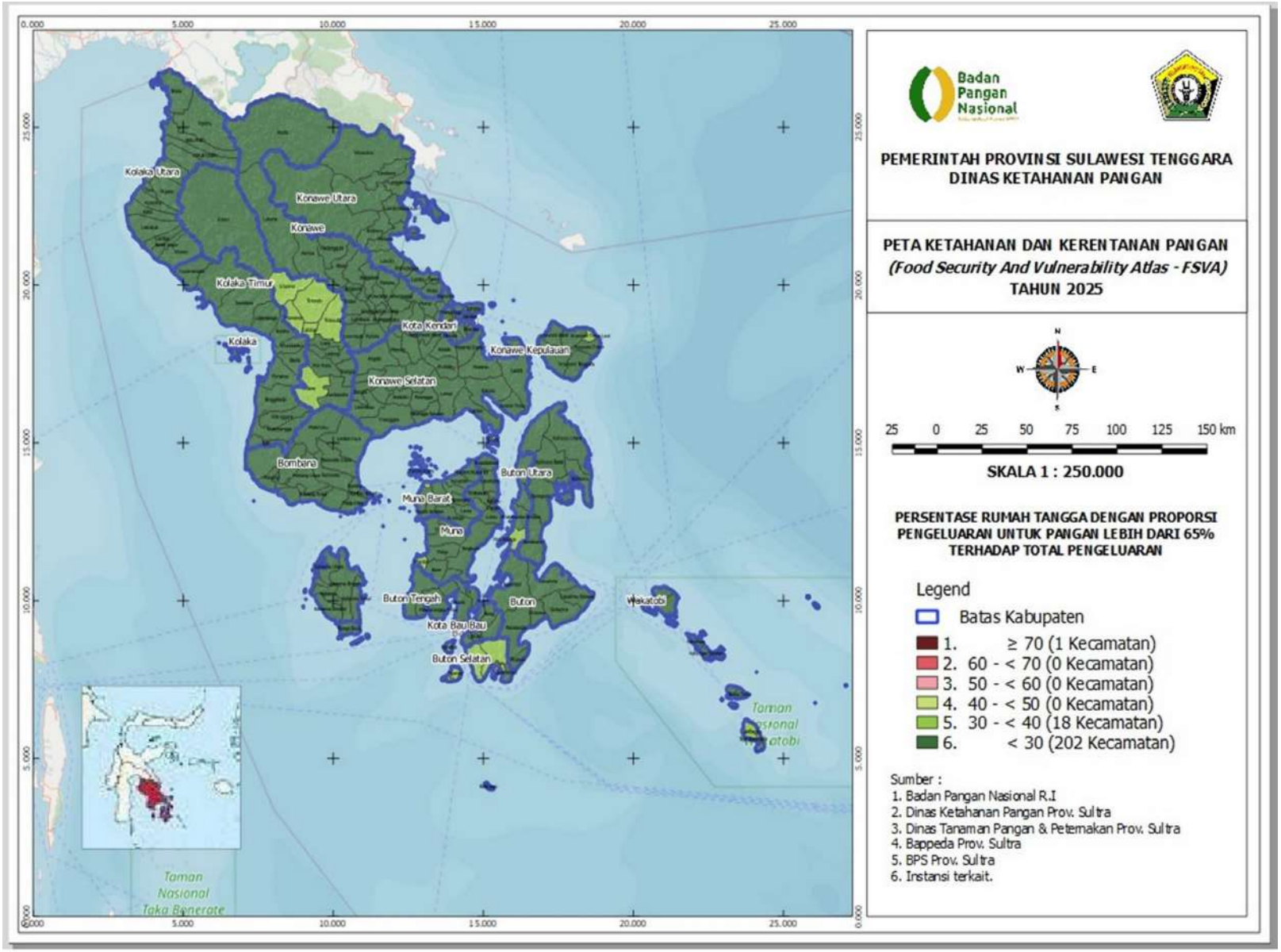
4.4 Tantangan Peningkatan Akses Pangan

Tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 peningkatan akses pangan yang perlu disikapi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan perintah Kabupaten/Kota ini disebabkan terjadinya Inflasi dimana harga pangan yang cenderung tidak stabil dan beberapa komoditas pangan yang kian mahal, kendati sempat turun namun tetap tidak siginifikan sehingga harga pangan tetap dinilai tinggi. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu mengambil sikap dalam penanganan masalah akses pangan dalam menghadapi inflasi komoditas pangan yang perlu intervensi pemerintah untuk menekannya.

Tingginya harga komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, minyak goreng, telur dan bahan pokok lainnya berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat pada warung-warung kecil dan UMKM di sektor makanan dan minuman yang paling terdampak sangat besar.


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA)
TAHUN 2025
SKALA 1 : 250.000
PERSENTASE RUMAH TANGGA TANPA AKSES LISTRIK
Legend
Batas Kabupaten
1. ≥ 50 (0 Kecamatan)
2. 40 - < 50 (0 Kecamatan)
3. 30 - < 40 (1 Kecamatan)
4. 30 - < 40 (3 Kecamatan)
5. 10 - < 20 (5 Kecamatan)
6. < 10 (212 Kecamatan)
Sumber :
1. Badan Pangan Nasional R.I
2. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra
3. Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Prov. Sultra
4. Bappeda Prov. Sultra
5. BPS Prov. Sultra
6. Instansi terkat.
Kolaka Utara
Kolaka
Kolaka Timur
Konawe Utara
Konawe
Konawe Selatan
Kota Kendari
Konawe Kepulauan
Bombana
Muna Barat
Buton Utara
Buton Tengah
Buton Selatan
Kota Baubau
Wakatobi


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA)
TAHUN 2025
SKALA 1 : 250.000
PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP
DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
Legend
Batas Kabupaten
1. ≥ 35 (11 Kecamatan)
2. 25 - < 35 (10 Kecamatan)
3. 20 - < 25 (3 Kecamatan)
4. 15 - < 20 (7 Kecamatan)
5. 10 - < 15 (21 Kecamatan)
6. < 10 (169 Kecamatan)
Sumber :
1. Badan Pangan Nasional R.I
2. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra
3. Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Prov. Sultra
4. Bappeda Prov. Sultra
5. BPS Prov. Sultra
6. Instansi terkait
Konawe Kepulauan
Konawe Utara
Konawe
Konawe Selatan
Kota Kendari
Kolaka Utara
Kolaka Timur
Kolaka
Bombana
Buton Utara
Buton
Buton Selatan
Kota Baubau
Buton Tengah
Muna Barat
Muna
Wakatobi
Taman Nasional


Badan Pangan Nasional
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA)
TAHUN 2025
N
W
E
S
25 0 25 50 75 100 125 150 km
SKALA 1 : 250.000
PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN PROPORSI PENGELUARAN UNTUK PANGAN LEBIH DARI 65% TERHADAP TOTAL PENGELUARAN
Legend
Batas Kabupaten
1. ≥ 70 (1 Kecamatan)
2. 60 - < 70 (0 Kecamatan)
3. 50 - < 60 (0 Kecamatan)
4. 40 - < 50 (0 Kecamatan)
5. 30 - < 40 (18 Kecamatan)
6. < 30 (202 Kecamatan)
Sumber :
1. Badan Pangan Nasional R.I
2. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra
3. Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Prov. Sultra
4. Bappeda Prov. Sultra
5. BPS Prov. Sultra
6. Instansi terkait.
Kolaka Utara
Konawe Utara
Konawe
Kolaka Timur
Kolaka
Kota Kendari
Konawe Kepulauan
Konawe Selatan
Bombana
Buton Utara
Muna Barat
Muna
Buton Tengah
Buton
Kota Bau Bau
Buton Selatan
Wakatobi
Taman Nasional Wakatobi
Taman Nasional Taka Bonerate

BAB V
PEMANFAATAN PANGAN

Pemanfaatan pangan yang efektif dan efisien merupakan strategi penting untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan secara optimal, kita dapat memenuhi kebutuhan pangan, mengurangi limbah, meningkatkan kualitas hidup dan membangun ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan teknologi pertanian modern, peningkatan produksi pangan lokal, pengurangan limbah pangan dan pengembangan industri pangan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan pangan umumnya dipahami sebagai cara tubuh manusia untuk memanfaatkan berbagai komponen gizi yang diperoleh dari makanan, yang pada akhirnya menentukan status gizi individu untuk menyerap zat gizi, pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh. Asupan gizi beragam seimbang sesuai dengan kecukupan kebutuhan tubuh untuk aktif dan produktif diperoleh dari pola makan yang baik, penyiapan makanan yang baik, keragaman diet/makanan, distribusi makanan antar anggota keluarga dalam rumah tangga, ketersediaan air bersih, tingkat kebersihan dan kesehatan tubuh, dan lain-lain.

Pemanfaatan pangan oleh rumah tangga tergantung pada fasilitas penyimpanan dan pengolahan makanan yang dimiliki oleh rumah tangga, pengetahuan dan praktek yang berhubungan dengan penyiapan makanan, pemberian makanan untuk balita dan anggota keluarga lainnya yang sedang sakit atau sudah tua dipengaruhi oleh

pengetahuan yang rendah dari ibu dan pengasuh, adat/kepercayaan dan tabu. Kondisi kesehatan masing-masing individu yang mungkin menurun karena penyakit, kebersihan, air dan sanitasi yang buruk dan kurangnya akses ke fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan. Asupan energi dan nutrisi yang cukup diperoleh dari pola makan yang baik, penyiapan makanan yang baik, keragaman makanan.

Hasil dari interaksi antara makanan yang dikonsumsi, metabolisme zat gizi makanan oleh tubuh dan lingkungan hidup di sekitarnya menentukan gambaran status gizi seseorang. Status gizi mempengaruhi kekebalan tubuh, ketahanan/kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Masalah gizi, terutama pada ibu/wanita saat ini, dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia pada generasi berikutnya. Dalam jangka panjang kekurangan gizi dapat mengakibatkan hilangnya potensi generasi muda yang cerdas dan berkualitas (*lost generation)* karena tidak produktif dan tidak mampu bersaing di masa depan. Terpenuhinya kebutuhan gizi akan menurunkan terjadinya kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga meningkatnya kualitas kesehatan individu. Aspek pemanfaatan pangan pada FSVA meliputi: a) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga, dan b) kemampuan individu untuk menyerap zat gizi. Pemanfaatan pangan didekati dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk;
- Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;
- Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun;
- Persentase balita stunting; dan
- Angka kesakitan.

5.1 Kecukupan Tenaga Kesehatan

Kecukupan tenaga kesehatan dalam FSVA merupakan faktor kunci untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Dengan tenaga kesehatan yang memadai, masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan berkualitas, mengurangi risiko

penyakit dan kematian, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan produktivitas dan kemampuan ekonomi. Dengan jumlah tenaga kesehatan yang memadai, kita dapat memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata.

Indikator ini mengukur sejauh mana kesesuaian ketersediaan tenaga kesehatan dan jumlah masyarakat yang dilayaninya. Ketersediaan Tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang cukup di suatu wilayah akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang pada gilirannya dapat menekan penyakit-penyakit infeksi yang berdampak pada masalah gizi, sekaligus mensosialisasikan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sosialisasi dan edukasi terkait dengan gizi dan perilaku hidup sehat juga menjadi tugas pelayanan tenaga kesehatan. Kesehatan masyarakat yang baik akan menunjang fungsi pemanfaatan pangan yang baik. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan kualitas sektor kesehatan harus terus diupayakan untuk meningkatkan status kesehatan setiap individu. Rasio antara jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan (Lubis 2010 dan Sofiati 2009). Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah penduduk di suatu wilayah dengan jumlah tenaga kesehatan. Hasilnya kemudian dibagi dengan kepadatan penduduk untuk memperoleh jumlah populasi terkoreksi yang dilayani per tenaga kesehatan. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin rentan daerah tersebut.

Ketersediaan tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga terapi fisik, dan tenaga keteknisian medis) yang cukup di suatu wilayah akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi keterkaitan dengan gizi dan perilaku hidup sehat juga menjadi tugas pelayanan tenaga kesehatan. Kesehatan masyarakat yang baik akan menunjang fungsi

pemanfaatan pangan yang baik. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan kualitas sektor kesehatan harus terus diupayakan untuk meningkatkan status kesehatan setiap individu diantaranya peningkatan Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk, jumlah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, persentase tenaga kesehatan

terlatih dan bersertifikat, distribusi tenaga kesehatan di wilayah luar dan perkotaan dan ketersediaan fasilitas kesehatan dasar.

Tabel. 5.1 Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk Hasil Analisis 2023 - 2024

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Jumlah Rasio PDDK per TENKES per DENSITY	Jumlah Penduduk Tahun 2024	Jumlah Rasio PDDK per TENKES per DENSITY
1	BUTON	120,21	37,19	123,85	37,18879
2	MUNA	224,69	72,96	231,27	72,96433
3	KONAWE	269,52	11.310,43	278,55	11237,22
4	KOLAKA	245,93	95,32	251,54	95,31825
5	KONAWE SELATAN	323,79	71,10	334,62	71,09764
6	BOMBANA	158,11	86,93	163,16	86,92714
7	WAKATOBI	116,45	10,60	120,04	10,60126
8	KOLAKA UTARA	145,64	6.035,14	151,36	6035,144
9	BUTON UTARA	68,95	17,62	70,62	17,6217
10	KONAWE UTARA	72,25	97,60	75,40	97,59999
11	KOLAKA TIMUR	125,77	44,19	129,31	46,81296
12	KONAWE KEPULAUAN	39,00	56,37	40,35	56,36937
13	MUNA BARAT	89,29	9,42	92,63	9,036127
14	BUTON TENGAH	119,46	7,78	123,11	7,784681
15	BUTON SELATAN	99,58	141,69	102,79	141,6885
16	KENDARI	364,22	0,32	377,27	0,323835
17	BAUBAU	166,15	9,24	170,89	9,240238

Sumber: Data BPS dan Hasil Analisis FSVA Kab/Kota Tahun 2025



Gambar 4. Grafik Hasil Analisis FSVA Tahun 2025

Secara umum, akses terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah cukup baik dengan tersedianya sarana kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat. Hasil analisis rasio tenaga kesehatan level kecamatan di wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan prioritas-1 (sangat buruk) sebanyak 39 kecamatan dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 40 kecamatan. Adapun prioritas-1 tahun 2025 wilayahnya meliputi Kabupaten Konawe, Kolaka Utara, dan Buton Selatan. Prioritas-2 (buruk) sebanyak 7 kecamatan meliputi Kabupaten Konawe, Kolaka, Konawe Utara, Kolaka Timur dan Buton Selatan. Prioritas-3 (agak buruk) sebanyak 6 kecamatan wilayahnya berada di kabupaten Bombana, Konawe, Kolaka, Buton Selatan dan Konawe Kepulauan. Prioritas-4 (agak baik) sebanyak 8 kecamatan, wilayahnya berada di kabupaten Bombana, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, dan Buton Selatan. Prioritas-5 (baik) sebanyak 22 kecamatan, wilayahnya berada di kabupaten Konawe, Kolaka, Konawe

Selatan, Bombana, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan. Adapun yang masuk Prioritas-6 (sangat baik) sebanyak 139 kecamatan, wilayahnya berada di kabupaten Buton, Muna, Kolaka, Konawe Selatan, Bombana,

Wakatobi, Buton Utara, Konawe Utara, Kolaka Timur, Konawe kepulauan, Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan, Kota Kendari, dan Kota Baubau.

5.2 Akses ke Air Bersih

Akses ke air bersih merupakan salah satu indikator penting dalam menilai ketahanan pangan dan kerentanan pangan di suatu wilayah. Berdasarkan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), akses ke air bersih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Air yang tidak bersih dapat menimbulkan penyakit dan menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi dan pada akhirnya mempengaruhi status gizi seseorang. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 meter. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan. Air yang tidak bersih akan meningkatkan angka kesakitan dan menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan dan pada akhirnya akan mempengaruhi status nutrisi seseorang. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa di daerah yang akses terhadap air bersihnya rendah maka ditemukan kejadian malnutrisi yang tinggi pula (DKP dan WFP 2009; Sofiati 2009). Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting dalam mengurangi masalah penyakit secara khusus diare, sehingga memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Pemprov NTT et al. 2015; Kavosi et al. 2014; Khan dan Gill 2009; Burger dan Esrey 1995; serta Thomas dan Strauss

1992). Semakin besar rasio rumah tangga tanpa akses air bersih diduga akan berpengaruh terhadap kerentanan pangan wilayah.

Hasil analisis indikator akses air bersih per kecamatan di beberapa Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tingkat akses air

bersih yang paling baik dimana kurang dari 50% rumah tangga sebanyak 205 kecamatan di wilayah yang dapat mengakses air bersih secara memadai berada di Kabupaten Buton, Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi, Kolaka Utara, Buton Utara, Konawe Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan, Kota Kendari dan Kota Baubau. Sedangkan wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten/kota yang mana wilayahnya tidak dapat mengakses ke air bersih lebih dari 50% sebanyak 16 kecamatan berada di Kabupaten Muna, Kolaka, Konawe Selatan, Wakatobi, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Adapun kabupaten/kota yang tidak dapat akses ke air bersih hasil analisis tahun 2025 masuk dalam prioritas 1-3 yaitu:

1. Kabupaten Muna;
   - Prioritas 1 sebanyak 1 Kecamatan yang berada di Kecamatan Towea.
   - Prioritas 2 sebanyak 2 Kecamatan yang berada di Kecamatan Marobo dan Kontukowuna.
2. Kabupaten Kolaka;
   - Prioritas 1 sebanyak 1 Kecamatan yang berada di Kecamatan Iwoimendaa.
3. Kabupaten Konawe Selatan;
   - Prioritas 1 sebanyak 1 Kecamatan yang berada di Kecamatan Wolasi.
4. Kabupaten Wakatobi;
   - Prioritas 1 sebanyak 3 Kecamatan yang berada di Kecamatan Binongko, Togo Binongko dan Tomia Timur.
5. Kabupaten Kolaka Timut;
   - Prioritas 3 sebanyak 1 Kecamatan berada di Kecamatan Dangia.
6. Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Prioritas 3 sebanyak 1 Kecamatan

7. Kabupaten Muna Barat;
   - Prioritas 1 sebanyak 1 Kecamatan yang berada di Kecamatan Barangka.

- Prioritas 2 sebanyak 1 Kecamatan yang berada di Kecamatan Tiworo Utara.
- Prioritas 3 sebanyak 1 Kecamatan yang berada di Kecamatan Sawerigadi.

8. Kabupaten Buton Selatan;
   - Prioritas 1 sebanyak 2 Kecamatan yang berada di Kecamatan Batu Atas dan Lapandewa.
   - Prioritas 2 sebanyak 1 Kecamatan yang berada di Kecamatan Kadatua.

Tabel. 5.2 Perbandingan Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Ke Air Bersih Tahun 2021-2024

No.	Nama Kabupaten	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	BUTON	90,79	20,86	4,40	19,11
2	MUNA	79,36	28,71	23,77	23,49
3	KONAWE	82,37	25,28	20,22	19,50
4	KONAWE SELATAN	79,01	9,73	14,55	20,66
5	BOMBANA	83,94	9,60	4,36	16,25
6	WAKATOBI	92,55	50,08	44,80	4,27
7	KOLAKA UTARA	49,60	0,00	0,05	44,83
8	BUTON UTARA	82,88	15,33	18,17	9,88
9	KONAWE UTARA	79,19	16,45	13,30	17,48
10	KOLAKA TIMUR	78,36	15,76	7,71	12,49
11	KONAWE KEPULAUAN	81,43	36,23	18,09	26,85
12	MUNA BARAT	86,10	34,42	30,21	23,61
13	BUTON TENGAH	73,08	11,52	8,01	34,09
14	BUTON SELATAN	83,73	58,84	52,17	7,99
15	KOLAKA	53,53	8,79	20,55	51,79
16	KENDARI	0,0	13,14	9,45	4,32
17	BAUBAU	0,0	11,84	0,25	5,56
	Sulawesi Tenggara	**69,17**	**21,56**	**17,06**	**20,13**

Sumber ; Dinkes Kab/kota, PDAM Kab/kota Data SAE

Dari hasil analisis persentase rumah tangga tanpa akses air bersih pada tingkat kecamatan dengan jumlah kecamatan pada kategori

sangat

baik, baik, dan agak baik berada di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

1. Agak Baik berada di Kabupaten Buton, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Buton Utara, dan Kolaka Timur.
2. Baik berada di Kabupaten Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Wakatobi, Buton Utara, Kolaka Timur, Muna Barat, Buton Selatan, dan Kota Baubau.
3. Sangat Baik berada di Kabupaten Buton, Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi, Kolaka Utara, Buton Utara, Konawe Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan, Kota Kendari, dan Kota Baubau.

5.3 Lama Sekolah Perempuan Berusia di Atas 15 Tahun

Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak tentang gizi berkorelasi kuat dengan status gizi anaknya (Abuya et al., 2012; Adnan and Muniandy, 2012; Miller and Rodgers,2009). Mekanisme hubungan antara tingkat pendidikan ibu dan status gizi serta kesehatan, yaitu; 1). Pendidikan formal secara langsung akan mentransfer pengetahuan terkait kesehatan kepada calon ibu; 2). Kemampuan membaca dan berhitung yang diperoleh perempuan di sekolah akan meningkatkan kemampuan mereka mengenali penyakit dan mencari pengobatan yang tepat untuk anak-anak mereka. Selain itu kemampuan membaca yang baik akan memudahkan mereka mengikuti instruksi medis untuk penanganan kesehatan dan menerapkannya; 3). Lamanya sekolah perempuan meningkatkan penerimaan mereka terhadap pengobatan modern. Perempuan yang bersekolah juga memiliki kemungkinan besar

untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, menikah dengan pria yang memiliki pendidikan dan gaji tinggi dilingkungan yang lebih baik sehingga mempengaruhi status kesehatan anak-anak mereka.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu di Indonesia adalah dengan melihat durasi pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan pengetahuan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009; Arif 2005; Molnar 1999; dan Mahmood et al. 1991). Lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesetaraan gender dan ketahanan pangan. FSVA menunjukkan bahwa perempuan dengan lama sekolah yang lebih tinggi memiliki:

1. Kemampuan ekonomi yang lebih baik.
2. Akses ke sumber daya dan informasi.
3. Kualitas hidup dan kesehatan yang lebih baik.
4. Partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan politik.
5. Kemampuan mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu di Indonesia adalah dengan melihat durasi pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun di setiap wilayah kecamatan di kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara berbeda beda, semakin lama durasi sekolah maka tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu diasumsikan semakin baik. Tabel 5.3 menunjukkan rata- rata lama sekolah tertinggi terdapat di wilayah Kota Kendari (12,04%), diikuti oleh Kota Baubau

(10,48%) dan Kabupaten Konawe Utara (9,47%).

Tabel 5.3 Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di atas 15 tahun

No.	Nama Kota	PERSENTASE FEMALE SCHOOL TAHUN 2021	PERSENTASE FEMALE SCHOOL TAHUN 2022	PERSENTASE FEMALE SCHOOL TAHUN 2023	PERSENTASE FEMALE SCHOOL TAHUN 2024
1	BUTON	5,58	11,49	8,86	9,22
2	MUNA	7,33	12,05	8,20	9,53
3	KONAWE	8,44	11,25	9,22	9,80
4	KOLAKA	6,36	11,17	9,36	9,44
5	KONAWE SELATAN	6,92	11,93	8,40	9,07
6	BOMBANA	6,89	11,94	8,61	9,14
7	WAKATOBI	3,99	11,99	8,43	9,21
8	KOLAKA UTARA	6,49	11,32	9,11	9,29
9	BUTON UTARA	7,11	11,33	8,80	9,57
10	KONAWE UTARA	7,12	10,91	9,47	9,75
11	KOLAKA TIMUR	6,74	11,98	8,85	8,91
12	KONAWE KEPULAUAN	6,39	10,99	9,38	10,14
13	MUNA BARAT	5,75	12,12	8,39	9,10
14	BUTON TENGAH	6,23	13,26	6,58	8,32
15	BUTON SELATAN	7,64	12,58	7,66	9,11
16	KENDARI	11,81	8,60	12,04	4,32
17	BAUBAU	10,51	10,02	10,48	5,56
Provinsi Sulawesi Tenggara		**7,14**	**23,57**	**8,93**	**8,79**

Sumber: Data SAE Bapanas. 2021 -2024

Selanjutnya rata-rata lama sekolah perempuan terpendek di Sulawesi Tenggara terdapat di Kabupaten Buton Tengah (6,58%), diikuti Kabupaten Buton Selatan (7,66%) dan Kabupaten Muna (8,2%).

5.4 Persentase Balita *Stunting*

Persentase balita stunting merupakan indikator penting kualitas hidup dan gizi balita dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi balita. Faktor-faktor yang mempengaruhi stunting meliputi: 1) Keterbatasan akses ke gizi seimbang, 2) Kurangnya perawatan kesehatan ibu dan anak, 3) Kondisi ekonomi dan pendidikan orang tua, 4) Faktor lingkungan dan sanitasi.

Status gizi dipengaruhi oleh penyebab langsung dan tidak langsung. Status ketahanan pangan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi anak, selain pola asuh dan akses terhadap fasilitas kesehatan dan air bersih. Sedangkan pola konsumsi makanan dan penyakit infeksi yang diderita berpengaruh langsung terhadap status gizi anak. Setiap faktor penyebab baik langsung ataupun tidak langsung akan saling mempengaruhi dan berinteraksi satu dengan lainnya. Sebagai contoh, anak yang konsumsi pangannya kurang baik maka daya tahan tubuhnya akan lemah, sehingga akan lebih mudah terserang infeksi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap status gizinya. Seorang anak dengan konsumsi pangan yang baikpun tidak serta merta memiliki status gizi yang baik. Jika anak tersebut sering menderita penyakit infeksi, maka situasi kesehatannya tersebut akan berpengaruh terhadap penyerapan zat gizi oleh tubuh yang berpengaruh terhadap status gizinya.

Status gizi balita diukur menggunakan 3 indikator, yaitu prevalensi *Stunting* (tingi badan menurut umur), *underweight* (berat badan menurut umur) dan wasting (berat badan menurut tinggi

badan).

1. Pendek atau *stunting*: rasio tinggi badan menurut umur -TB/U- di bawah -2 standar deviasi dari *mean* referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara terus-menerus, dalam jangka panjang dan kronis.

2. Gizi kurang dan buruk atau *underweight*: rasio berat badan menurut umur -BB/U- di bawah -2 standar deviasi dari *mean* referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi.
3. Kurus atau *wasting*: rasio berat badan menurut tinggi badan -BB/TB- di bawah -2 *mean* referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara akut atau baru terjadi.

WHO mengklasifikasikan masalah gizi sebagai masalah kesehatan berdasarkan prevelensi underweight, stunting, dan wasting dalam papulasi seperti pada Tabel.

Tabel. 5.4 Klasifikasi WHO untuk *Underweight, Stunting dan Wasting* dalam Populasi.

KLASIFIKASI	*UNDERWEIGH*	*STUNTING*	*WASTING*
Baik	*<10%*	*<20%*	*<5%*
Kurang	*10-19%*	*20-29%*	*5-9%*
Buruk	*20-29%*	*30-39%*	*10-14%*
Sangat Buruk	*≥30%*	≥40%	≥15%

Sumber: WHO 2000

Balita gizi kurang adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (BBU). Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok Penyerapan Pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita adalah situasi ketahanan pangan rumah tangga, status gizi dan kesehatan ibu, pendidikan ibu, pola asuh anak, akses terhadap air bersih, akses terhadap pelayanan kesehatan yang tepat waktu. Untuk mengetahui

apakah balita memiliki tinggi badan kurang atau tidak, maka harus dilakukan pengukuran tinggi badan dan pencatatan umur dalam bulan. Angka ini kemudian dibandingkan dengan standar internasional yang dikembangkan oleh badan *"National Centre for Health*

Statistics, Centers for Disease Control, USA (atau biasa disebut NCHS standard).

Prevalensi balita pendek (*Stunting*) secara nasional tercatat sebesar 27,7%, atau turun 3,1% dibanding tahun 2018. Namun demikian, WHO menetapkan batasan masalah gizi stunting tidak lebih dari 20%, menyebabkan Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki masalah stunting tinggi yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi. Secara teknis kesehatan, anak stunting adalah salah satu bentuk output dari kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama, yaitu sejak 1000 hari pertama kehidupan. Janin dalam kandungan membutuhkan asupan gizi yang cukup melalui ibunya. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan ibu hamil dan menyusui menjadi amat krusial menentukan kualitas bayi. Masalah gizi terdiri atas gizi lebih dan gizi kurang. Kekurangan gizi erat kaitannya dengan kemiskinan, kurang tersedianya bahan pangan, buruknya sanitasi, kesalahan pola asuh, rendahnya pemahaman terhadap menu seimbang dan masih terbatasnya fasilitasi infrastruktur. Namun demikian, masalah gizi juga dihadapi oleh masyarakat kelas menengah hingga tinggi yang tidak mengalami kendala akses ekonomi, teknologi, informasi dan jarak. Fenomena yang dihadapi saat ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang berkecukupan secara ekonomi belum disertai pemahaman yang cukup mengenai pengetahuan gizi, menu seimbang, maupun kesehatan. Oleh karena itu, program perbaikan gizi dan kesehatan yang dilaksanakan di wilayah kabupaten/kota pada level kecamatan khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara harus memperhatikan data dan informasi spesifikasi terkait permasalahan

yang dihadapi. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima manfaat sesuai dengan kebutuhannya, serta permasalahan gizi dan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat segera terselesaikan.

Prevalensi balita *stunting* di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam klasifikasi rata-rata di bawah 20% pada semua kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

Tabel. 5.5 Prevalensi *Stunting* Pada Balita per Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024

No.	Nama Kabupaten	*Stunting Tahun 2021*	*Stunting Tahun 2022*	*Stunting Tahun 2023*	*Stunting Tahun 2024*
1	BUTON	22,95	22,41	18,04	0,04
2	MUNA	17,38	7,44	0,32	0,03
3	KONAWE	8,63	0,39	4,84	0,01
4	KOLAKA	0	0,00	0,0	0,03
5	KONAWE SELATAN	15,66	0,40	0,08	0,04
6	BOMBANA	17,96	23,04	42,24	0,05
7	WAKATOBI	0,93	0,01	27,15	0,02
8	KOLAKA UTARA	14,10	7,55	3,97	0,01
9	BUTON UTARA	15,98	0,10	0	0,04
10	KONAWE UTARA	0,08	0,08	0,26	0,02
11	KOLAKA TIMUR	16,50	0,01	11,41	0,02
12	KONAWE KEPULAUAN	0,11	10,60	0	0,02
13	MUNA BARAT	15,49	6,46	5,43	0,02
14	BUTON TENGAH	25,74	22,23	22,21	0,03
15	BUTON SELATAN	0,30	0,02	26,16	0,05
16	KENDARI	0,97	0,11	1,67	4,32
17	BAUBAU	17,17	0,39	8,50	5,56
	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	**11,87**	**9,59**	**10,13**	**0,61**

Sumber: Dinkes Prov Sultra, Dinkes Kab/Kota Hasil analisis FSVA 2021-2024

5.5 Angka Kesakitan

Angka kesakitan merupakan indikator penting kualitas kesehatan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi morbiditas meliputi diantaranya 1) Akses ke pelayanan kesehatan, 2) Kualitas pelayanan kesehatan, 3) Kesadaran masyarakat akan kesehatan, 4) Faktor lingkungan dan sosial-ekonomi, dan 5) Ketersediaan sumber daya kesehatan.

Angka kesakitan/morbiditas/persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan

terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang

menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu.

Hasil analisis indikator Angka kesakitan/morbiditas/persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan masuk dalam prioritas 1-3 per kecamatan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara sebanyak 79 kecamatan sebagai berikut:

- **Prioritas 1**

1. Kabupaten Muna sebanyak 3 (Kecamatan Kontunaga, dan Lohia);
2. Kabupaten Wakatobi sebanyak 3 (Kecamatan Binongko, Togo binongko, dan Kaledupa);
3. Kabupaten Buton Utara sebanyak 5 (Kecamatan Bonegunu, Kambowa, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, dan Wakorumba Utara);
4. Kabupaten Konawe Utara sebanyak 1 (Kecamatan Landawe);
5. Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 3 (Kecamatan Wawonii Tenggara, Wawonii Timur, dan Wawonii Timur Laut);
6. Kabupaten Muna Barat sebanyak 6 (Kecamatan Barangka, Kusambi, Lawa, Sawerigadi, Wadaga, dan Napano Kusambi).

- **Prioritas 2**

1. Kabupaten Buton sebanyak 1 (Kecamatan Wabula);
2. Kabupaten Muna sebanyak 1 (Kecamatan Duruka);
3. Kabupaten Konawe sebanyak 3 (Kecamatan Abuki, Besulutu, dan Sampara);

4. Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 5 (Kecamatan Andoolo, Benua, Laonti, Moramo, dan Wolasi);
5. Kabupaten Bombana sebanyak 5 (Kecamatan Lantari Jaya, Poleang Barat, Poleang Tenggara, Rarowatu, dan Tontonunu);
6. Kabupaten Wakatobi sebanyak 1 (Kecamatan Tomia);
7. Kabupaten Buton Utara sebanyak 1 (Kecamatan Kulisusu);

8. Kabupaten Konawe Utara sebanyak 1 (Kecamatan Asera);
9. Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 3 (Kecamatan Wawonii Barat, Wawonii Tengah, dan Wawonii Utara);
10. Kabupaten Muna Barat sebanyak 2 (Kecamatan Maginti dan Tiworo Utara);
11. Kabupaten Buton Selatan sebanyak 1 (Kecamatan Kadatua).

- **Prioritas 3**

1. Kabupaten Buton sebanyak 2 (Kecamatan Lasalimu dan Siotapina);
2. Kabupaten Muna sebanyak 1 (Kecamatan Bone);
3. Kabupaten Konawe sebanyak 6 (Kecamatan Bondoala, Latoma, Onembute, Pondidaha, Uepai dan Wonggeduku);
4. Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 9 (Kecamatan Andoolo Barat, Angata, Baito, Kolono, Moramo Utara, Mowila, Palangga Selatan, Sabulakoa, dan Tinanggea);
5. Kabupaten Bombana sebanyak 2 (Kecamatan Poleang dan Poleang Selatan);
6. Kabupaten Wakatobi sebanyak 1 (Kecamatan Kaledupa Selatan);
7. Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 2 (Kecamatan Batu Putih dan Pakue Tengah);
8. Kabupaten Konawe Utara sebanyak 4 (Kecamatan Andowia, Motui, Sawa dan Wiwirano);
9. Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 3 (Kecamatan Lalolae, Mowewe dan Ueesi);
10. Kabupaten Muna Barat sebanyak 2 (Kecamatan Tiworo Kepulauan dan Tiworo Selatan);
11. Kabupaten Tengah sebanyak 1 (Kecamatan Talaga Raya);
12. Kabupaten Buton Selatan sebanyak 1 (Kecamatan Siompu Barat).

Adapun hasil analisis indikator Angka kesakitan/morbiditas/ persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan masuk dalam prioritas 4-6 per kecamatan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di

Sulawesi Tenggara sebanyak 142 kecamatan yaitu, kabupaten Buton (4 kecamatan), kabupaten Muna (17 kecamatan), kabupaten Konawe (19 kecamatan), kabupaten Kolaka (12 kecamatan), kabupaten Konawe Selatan (11 kecamatan), kabupaten Bombana (15 kecamatan), kabupaten Wakatobi (3 kecamatan), kabupaten Kolaka Utara (13 kecamatan), kabupaten Konawe Utara (7 kecamatan), kabupaten Kolaka Timur (9 kecamatan), kabupaten Konawe Kepulauan (1 kecamatan), kabupaten Muna Barat (1 kecamatan), kabupaten Buton Tengah (6 kecamatan), kabupaten Buton Selatan (5 kecamatan), kota Kendari (11 kecamatan), dan kota Baubau (8 kecamatan).

Tabel. 5.6 Angka Kesakitan tingkat Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2024

No.	Nama Kabupaten	Persentase Jumlah Angka KESAKITAN/Morbidity			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	BUTON	12,12	12,23	13,45	11,22
2	MUNA	14,15	15,72	9,12	10,62
3	KONAWE	10,29	16,25	12,00	10,93
4	KOLAKA	9,26	11,00	6,57	7,42
5	KONAWE SELATAN	12,02	19,62	10,70	12,10
6	BOMBANA	10,16	18,99	10,69	10,47
7	WAKATOBI	11,43	10,60	8,96	16,90
8	KOLAKA UTARA	12,24	42,54	12,92	9,13
9	BUTON UTARA	12,93	26,12	12,96	25,13
10	KONAWE UTARA	11,21	18,01	10,53	11,52
11	KOLAKA TIMUR	12,80	20,37	10,18	10,29
12	KONAWE KEPULAUAN	14,19	14,25	11,93	20,07
13	MUNA BARAT	15,20	11,56	11,86	17,56
14	BUTON TENGAH	19,35	12,65	11,13	8,85
15	BUTON SELATAN	15,49	13,01	10,09	9,30
16	KENDARI	13,97	18,50	9,45	4,32
17	BAUBAU	8,31	7,52	7,69	5,56
PROVINSI SULAWESI TENGGARA		**25,31**	**17,89**	**10,60**	**11,85**

Sumber: Data SAE 2021-2024

Rata-rata di Sulawesi Tenggara tahun 2024 yang mengeluh sakit mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023, pada umumnya penyakit ringan maupun berat dan penyakit yang umum. Perlu adanya pemahaman kepada masyarakat tentang pola hidup sehat. Peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit harus secara optimal sehingga dapat mengurangi masyarakat yang terpapar penyakit.

5.6 Tantangan Peningkatan Pemanfaatan Pangan

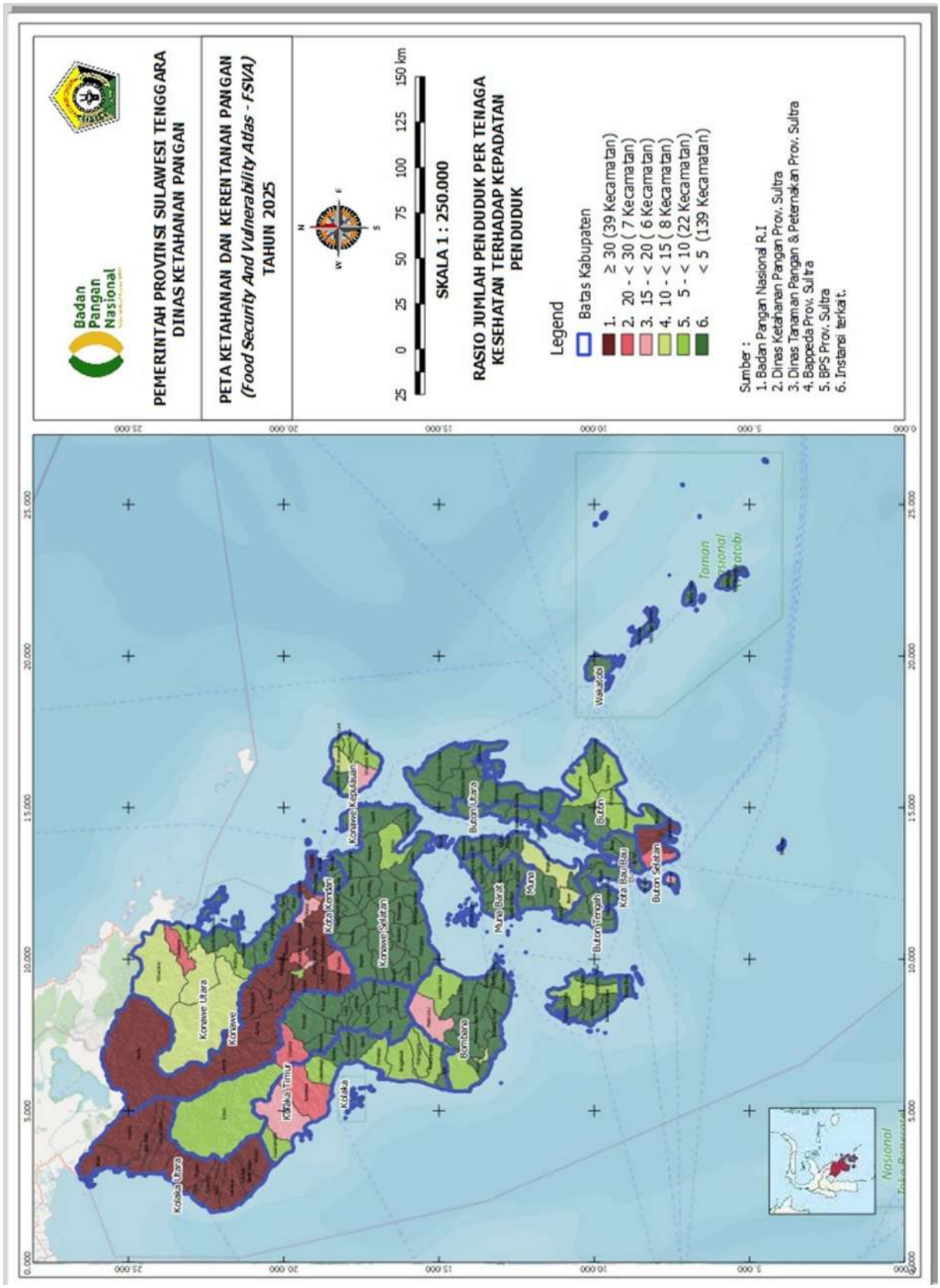
Tantangan yang dihadapi untuk peningkatan aspek pemanfaatan pangan adalah perilaku konsumsi yang menyebabkan pola konsumsi belum sesuai dengan kaidah Pola Pangan Harapan (PPH) dimana skor pola pangan harapan Sulawesi Tenggara sebesar 80,1 tahun 2023 sedangkan tahun 2024 75,18 berada dibawah skor PPH Nasional sebesar 92,8 yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Skor PPH mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat dan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan. Tergantungan terhadap sumber pangan tertentu terutama beras dan terigu, serta *food waste* yang masih tinggi. Konsumsi energi tahun 2023 sebesar 3.022,0 kkal/kap/hari sedangkan tahun 2024 sebesar 2.470 kkal/kap/hari. Selain itu, konsumsi protein tahun 2023 sebesar 61,48 gram/kap/hari sedangkan tahun 2024 sebesar 83,60 gram/kap/hari.

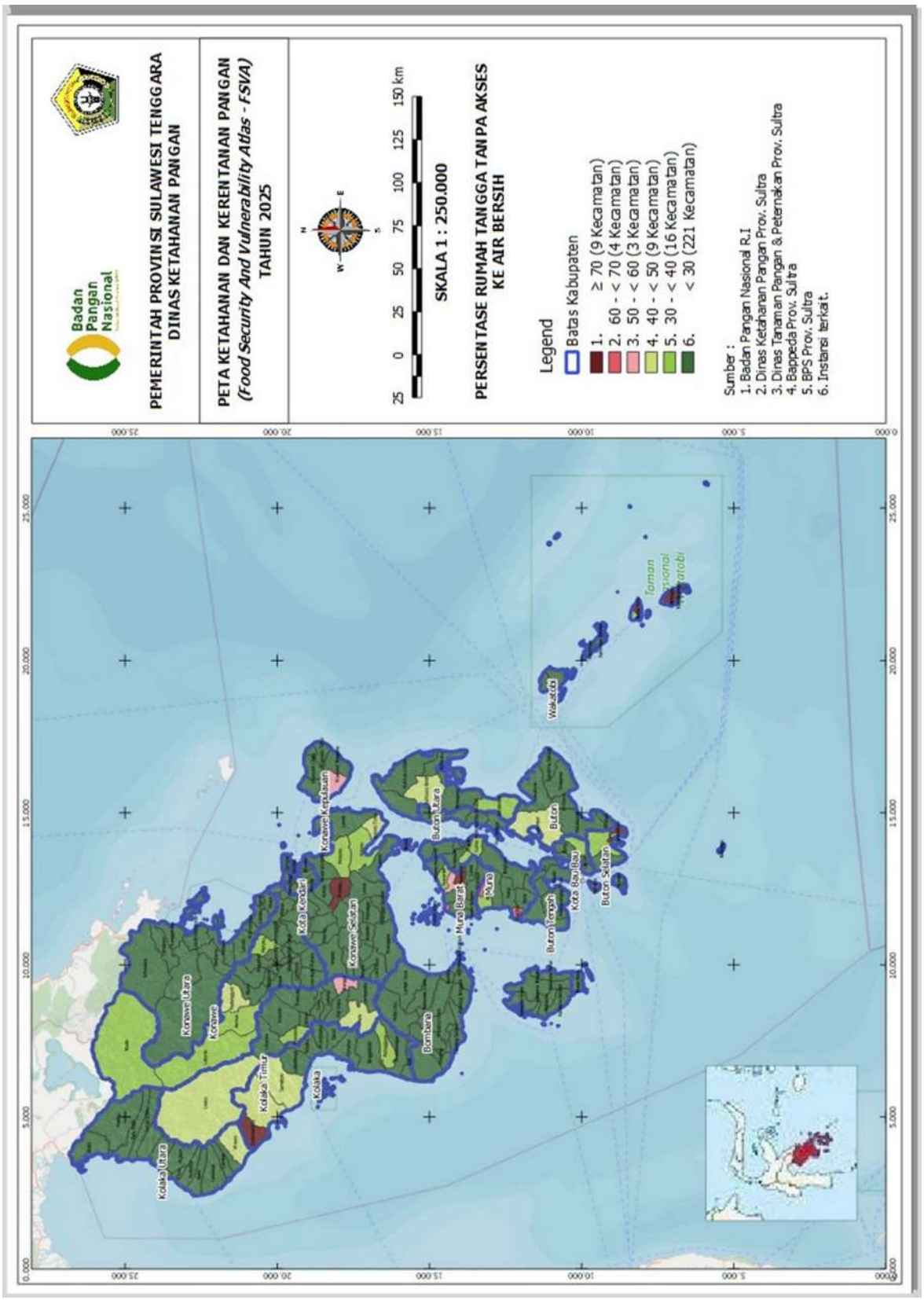
Meskipun konsumsi energi dan protein di Sulawesi Tenggara telah melebihi anjuran Angka Kecukupan Gizi (AKG), namun pemenuhan konsumsi pangan masih perlu memperhatikan keberagaman jenis dan jumlah pangan sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Skor pola pangan harapan yang dihitung dari keragaman

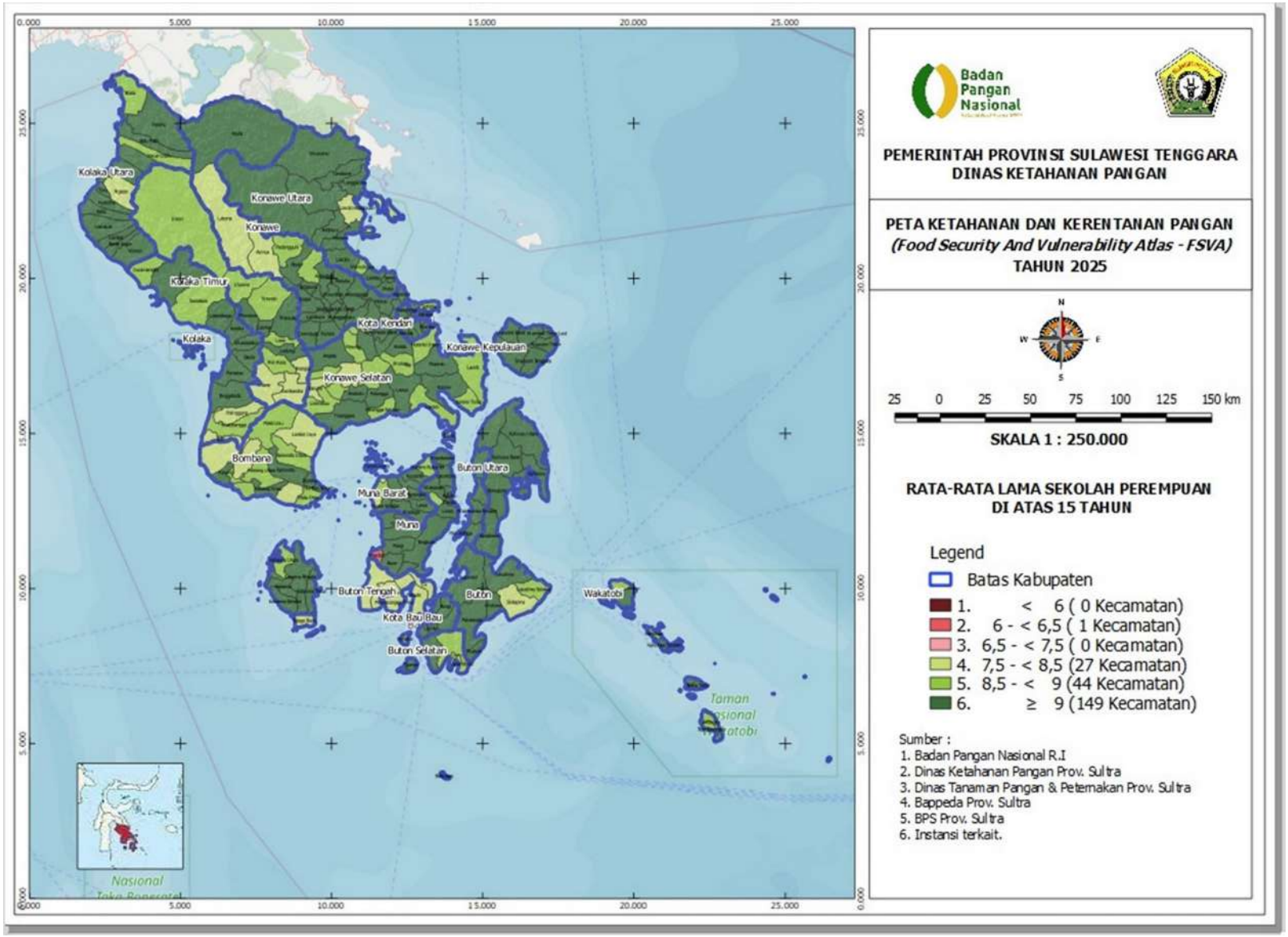
konsumsi pangan penduduk Sulawesi Tenggara. Konsumsi kelompok yang telah melebihi anjuran yaitu padi- padian, pangan hewani, minyak dan lemak, sedangkan konsumsi yang perlu ditingkatkan adalah umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah.

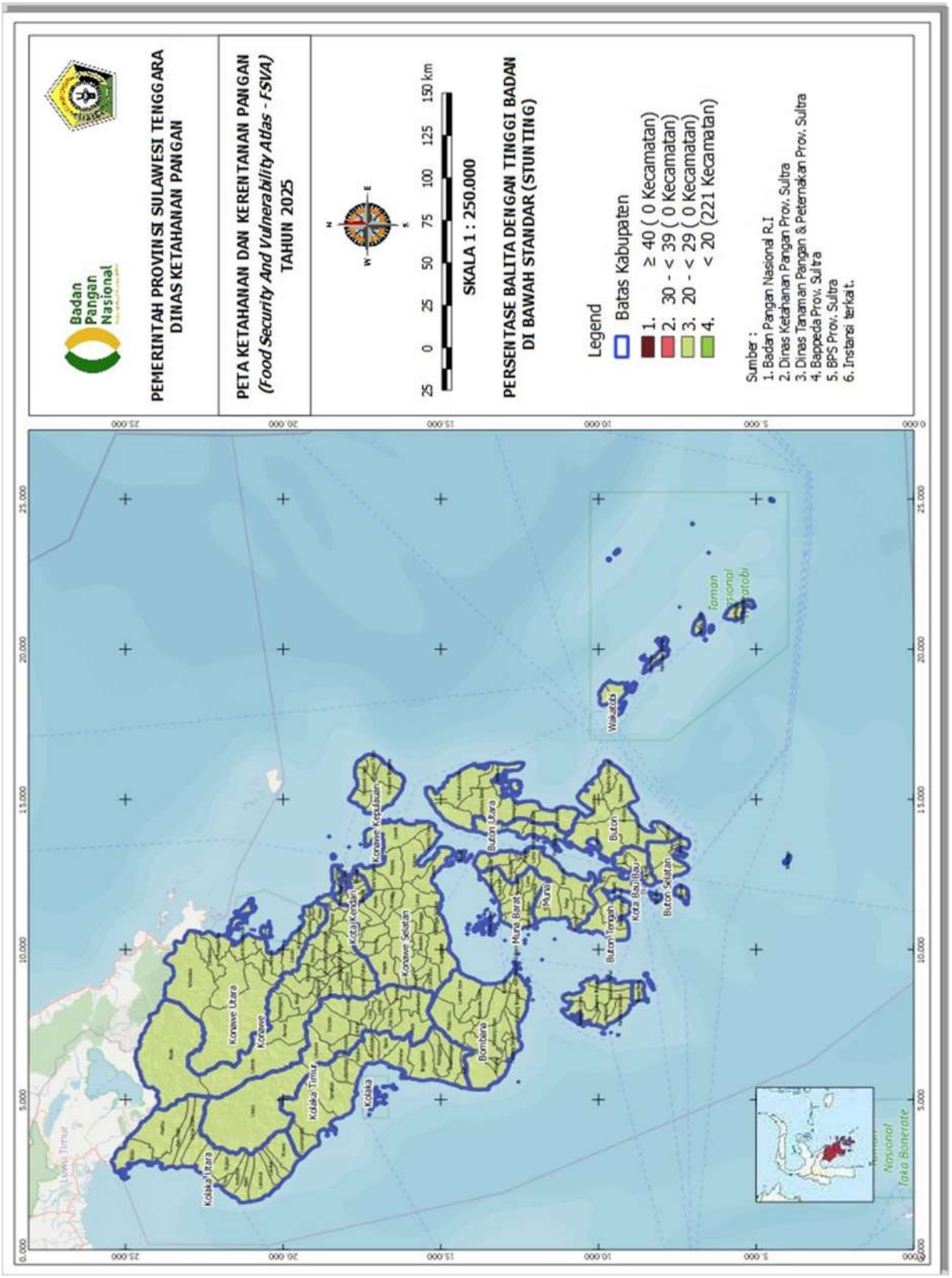
Ketergantungan terhadap jenis pangan tertentu akan berdampak pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menjaga agar pangan tersebut selalu tersedia. Sementara itu masyarakat Sulawesi Tenggara memiliki beragam pangan lokal yang dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat dan telah biasa dikonsumsi namun semakin menurun jumlah konsumsinya. Diversifikasi konsumsi pangan untuk mencapai Pola Pangan Harapan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan pemanfaatan pangan. Diperlukan upaya-upaya yang masif dan melibatkan multi sektor agar kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dilakukan oleh masyarakat.

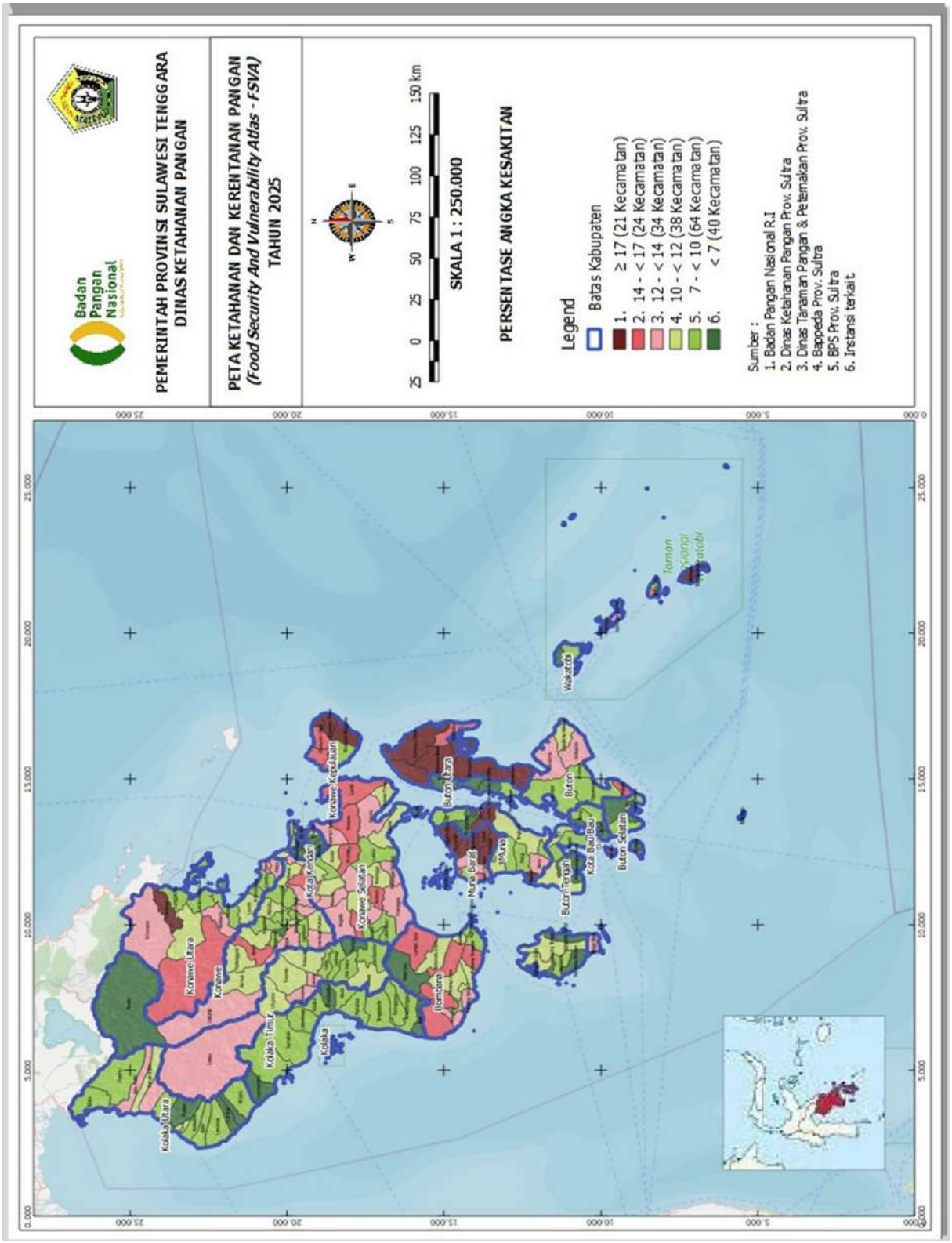
Tingginya *food wastage* (pemborosan makanan) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan. *Food Wastage* umumnya terjadi karena kurangnya perencanaan maupun kebiasaan membuang makanan pada saat konsumsi. *Food Wastage* dapat dikurangi melalui perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat pada umumnya.


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA)
TAHUN 2025
SKALA 1 : 250.000
RASIO JUMLAH PENDUDUK PER TENAGA KESEHATAN TERHADAP KEPADATAN PENDUDUK
Legend
Batas Kabupaten
1. ≥ 30 (39 Kecamatan)
2. 20 - < 30 (7 Kecamatan)
3. 15 - < 20 (6 Kecamatan)
4. 10 - < 15 (8 Kecamatan)
5. 5 - < 10 (22 Kecamatan)
6. < 5 (139 Kecamatan)
Sumber :
1. Badan Pangan Nasional R.I
2. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra
3. Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Prov. Sultra
4. Bappeda Prov. Sultra
5. BPS Prov. Sultra
6. Instansi terkait.
Konawe Kepulauan
Kota Kendari
Konawe Selatan
Konawe Utara
Konawe
Kolaka Timu
Kolaka
Kolaka Utara
Bombana
Muna Barat
Muna
Buton Utara
Buton
Buton Tengah
Kota Baubau
Buton Selatan
Wakatobi


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
Badan Pangan Nasional
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA)
TAHUN 2025
SKALA 1 : 250.000
25 0 25 50 75 100 125 150 km
PERSENTASE RUMAH TANGGA TANPA AKSES KE AIR BERSIH
Legend
Batas Kabupaten
1. ≥ 70 (9 Kecamatan)
2. 60 - < 70 (4 Kecamatan)
3. 50 - < 60 (3 Kecamatan)
4. 40 - < 50 (9 Kecamatan)
5. 30 - < 40 (16 Kecamatan)
6. < 30 (221 Kecamatan)
Sumber :
1. Badan Pangan Nasional R.I
2. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra
3. Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Prov. Sultra
4. Bappeda Prov. Sultra
5. BPS Prov. Sultra
6. Instansi terkait.
Wakatobi
Konawe Kepulauan
Buton Utara
Buton
Kota Kendari
Konawe Selatan
Muna Barat
Muna
Kota Baubau
Buton Selatan
Buton Tengah
Konawe Utara
Konawe
Bombana
Kolaka Timur
Kolaka
Kolaka Utara


Badan Pangan Nasional
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA)
TAHUN 2025
N
W
E
S
25 0 25 50 75 100 125 150 km
SKALA 1 : 250.000
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PEREMPUAN
DI ATAS 15 TAHUN
Legend
Batas Kabupaten
1. < 6 (0 Kecamatan)
2. 6 - < 6,5 (1 Kecamatan)
3. 6,5 - < 7,5 (0 Kecamatan)
4. 7,5 - < 8,5 (27 Kecamatan)
5. 8,5 - < 9 (44 Kecamatan)
6. ≥ 9 (149 Kecamatan)
Sumber :
1. Badan Pangan Nasional R.I
2. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra
3. Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Prov. Sultra
4. Bappeda Prov. Sultra
5. BPS Prov. Sultra
6. Instansi terkait.
Kolaka Utara
Konawe Utara
Konawe
Kolaka Timur
Kolaka
Kota Kendari
Konawe Kepulauan
Konawe Selatan
Bombana
Buton Utara
Muna Barat
Muna
Buton Tengah
Buton
Kota Bau Bau
Buton Selatan
Wakatobi
Nasional


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
Badan Pangan Nasional
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA)
TAHUN 2025
SKALA 1 : 250.000
PERSENTASE BALITA DENGAN TINGGI BADAN DI BAWAH STANDAR (STUNTING)
Legend
Batas Kabupaten
1. ≥ 40 (0 Kecamatan)
2. 30 - < 39 (0 Kecamatan)
3. 20 - < 29 (0 Kecamatan)
4. < 20 (221 Kecamatan)
Sumber :
1. Badan Pangan Nasional R.I
2. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra
3. Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Prov. Sultra
4. Bappeda Prov. Sultra
5. BPS Prov. Sultra
6. Instansi terkait.
Konawe Kepulauan
Buton Utara
Buton
Kota Baubau
Buton Selatan
Buton Tengah
Muna Barat
Muna
Wakatobi
Kota Kendari
Konawe Selatan
Konawe
Konawe Utara
Bombana
Kolaka
Kolaka Timur
Kolaka Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Taman Nasional Wakatobi
Taka Bonerate


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA)
TAHUN 2025
SKALA 1 : 250.000
PERSENTASE ANGKA KESAKITAN
Legend
Batas Kabupaten
1. ≥ 17 (21 Kecamatan)
2. 14 - < 17 (24 Kecamatan)
3. 12 - < 14 (34 Kecamatan)
4. 10 - < 12 (38 Kecamatan)
5. 7 - < 10 (64 Kecamatan)
6. < 7 (40 Kecamatan)
Sumber :
1. Badan Pangan Nasional R.I
2. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra
3. Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Prov. Sultra
4. Bappeda Prov. Sultra
5. BPS Prov. Sultra
6. Instansi terkait.
Wakatobi
Buton Utara
Buton
Kota Baubau
Buton Selatan
Buton Tengah
Muna
Muna Barat
Konawe Kepulauan
Kota Kendari
Konawe Selatan
Konawe
Konawe Utara
Bombana
Kolaka Timur
Kolaka
Kolaka Utara

BAB VI

SUMBERDAYA ALAM DAN KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA

Kerentanan terhadap bencana alam dan gangguan mendadak lainnya dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah baik bersifat sementara maupun jangka waktu panjang. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara sementara dikenal sebagai kerawanan pangan sementara *(transient food insecurity)*. Bencana alam yang terjadi tiba-tiba, maupun perubahan harga atau goncangan terhadap pasar, epidemik penyakit, konflik sosial dan lain-lain dapat menyebabkan terjadinya kerawanan pangan transien (sementara). Kerawanan pangan transien dapat berpengaruh terhadap satu atau semua aspek ketahanan pangan seperti ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan. Kondisi suatu wilayah menjadi rentan rawan pangan yang disebabkan oleh kejadian di suatu wilayah pada waktu tertentu yang menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan masyarakat.

Kerentanan pangan transien dibagi menjadi dua, yaitu **berulang (*cyclical*),** di mana terdapat suatu pola yang berulang terdapat kondisi rawan pangan, misalnya, “musim paceklik” yang terjadi dalam periode sebelum panen dan **temporal (*temporary*)**, yang merupakan hasil dari suatu gangguan mendadak dari luar pada jangka pendek, seperti kekeringan atau kejadian bencana. Konflik sipil juga termasuk dalam kategori goncangan (*shock*) temporal meskipun dampak negatifnya terhadap ketahanan pangan dapat berlanjut untuk jangka waktu lama.

Kerentanan transien pada terjadi pada masyarakat yang tinggal di wilayah rentan rawan pangan kronis dan juga masyarakat yang tinggal di wilayah tahan pangan. Faktor iklim dan lingkungan serta kemampuan *early warning, mitigasi,* dan *recovery* masyarakat terhadap goncangan sangat menentukan apakah

suatu wilayah dapat mempertahankan atau meningkatkan ketahanan pangan dan status gizinya.

Informasi mengenai potensi yang dapat menyebabkan kerentanan pangan transien yang digunakan yaitu:

- Data kejadian bencana alam yang terjadi di tingkat kabupaten;
- Estimasi kehilangan produksi padi dan jagung, akibat banjir, kekeringan dan organisme pengganggu Tanaman; dan
- Variabilitas curah hujan

6.1 Bencana Alam

Kejadian bencana alam merupakan salah satu penyebab terjadinya kerawanan pangan transien. Prakiraan BMKG Stasiun Klimatologi Konawe Selatan, beberapa wilayah yang diprakirakan memiliki curah hujan kategori Rendah. Meski begitu, juga terdapat beberapa wilayah seperti Kabupaten Bombana, Konawe Selatan, Buton Tengah, Buton Selatan dan Kota Baubau diprakirakan berpeluang mengalami curah hujan kategori Rendah (<=50 mm/dasarian).

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang sering mengalami banjir khususnya di daerah daratan harus melakukan langkah-langkah dalam memitigasi berbagai potensi bencana tersebut. Sinergi semua pihak perlu dilakukan mulai dari hulu dengan informasi kesiapsiagaan. La Nina dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi merupakan bencana menahun yang kerap terjadi baik pada musim hujan, transisi, maupun kemarau. Pada musim hujan, berpotensi terjadi banjir, banjir bandang dan tanah longsor, di masa transisi biasanya ditandai hujan

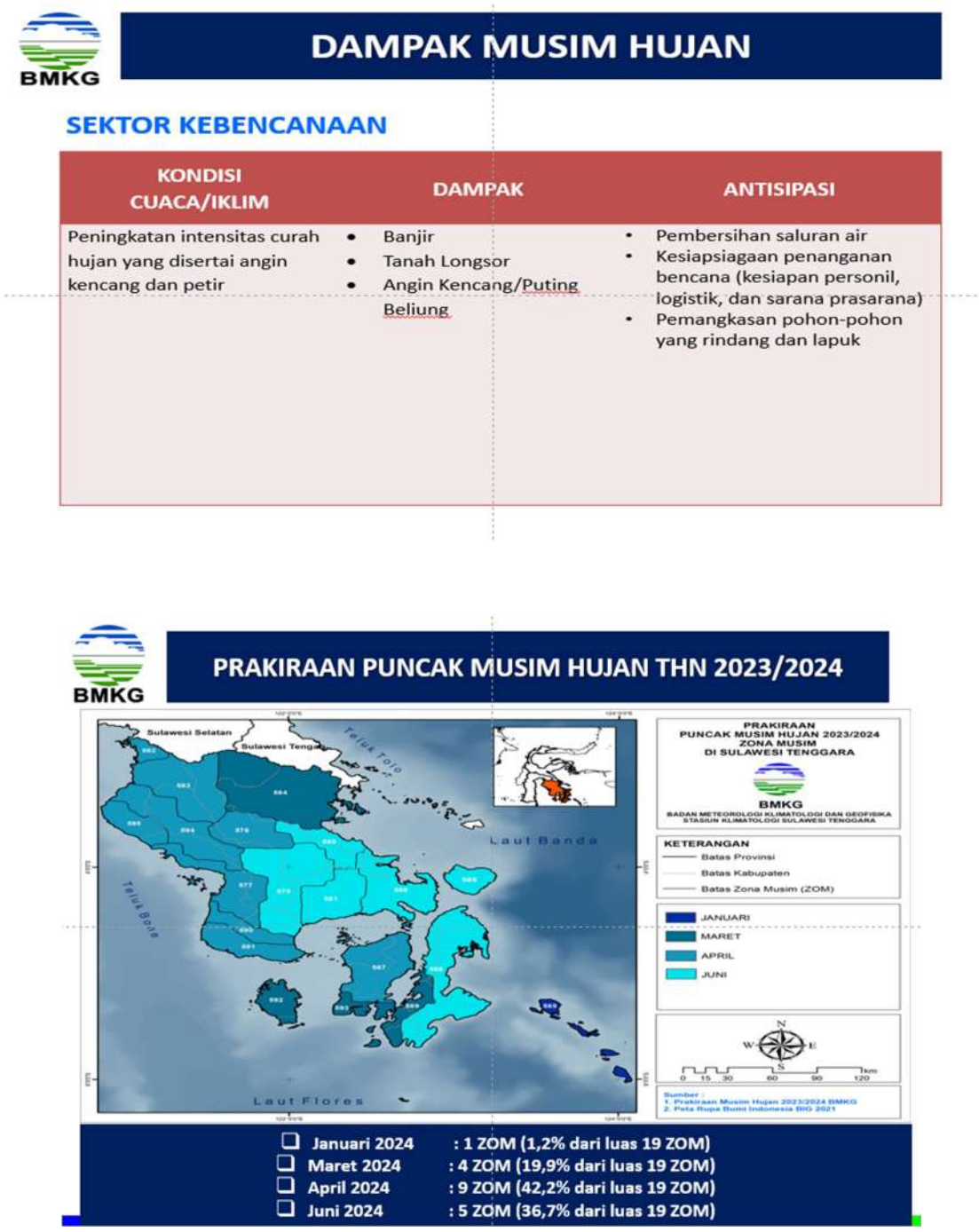
lebat pada periode singkat disertai angin kencang hingga hujan es. Sedangkan di musim kemarau potensi bencana yang dihadapi berupa karhutla dan gelombang tinggi.

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang sering mengalami banjir khususnya di daerah daratan harus

melakukan langkah-langkah dalam memitigasi berbagai potensi bencana tersebut.

1. Potensi daerah rawan banjir dengan kategori tinggi yaitu wilayah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Bau-bau dan Kota Kendari. Adapun kecamatan yang berpotensi rawan banjir dengan kategori tinggi berada di kecamatan Abuki, Amonggedo, Anggaberi, Bondoala, kapoiala, Lambuya, Latoma, Pondidaha, Puriala, Routa, Sampara, Tongauna, Unaaha, Wawotobi, dan Wanggeduku berada di Kabupaten Konawe, kecamatan yang berada di Kabupaten Kolaka Utara meliputi kecamatan Lasusua, kecamatan yang berada di Kabupaten Buton Selatan meliputi kecamatan Sampolawa, kemudian di Kabupaten Konawe Selatan meliputi kecamatan Andolo, Kolono, Konda, Laeya, Lainea, Lalembuu, Laonto, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan dan Tinanggea. Selanjutnya si kabupaten Konawe Utara meliputi kecamatan Andowia, Asera, Landawe, Langgikima, Oheo, dan Wiwirano. Di Kota Baubau meliputi kecamatan Bungi, dan Wolio. dan di Kota Kendari meliputi kecamatan Baruga, Kadia, Kambu, Kendari, Kendari Barat, Mandonga, Poasia, Wua-wua.
2. Sementara itu, Potensi daerah rawan banjir kategori rendah berpotensi terjadi di Kabupaten Bombana meliputi kecamatan Rumbia. Di Kabupaten Buton Selatan meliputi kecamatan Sompolawa. Berikutinya di Kabupaten Buton Utara meliputi kecamatan Bonegunu, di Kabupaten Konawe Selatan meliputi kecamatan Kolono, Lainea, Lalembuu, Laonti, Palangga Selatan,

dan tinanggea. Di Kabupaten Muna meliputi kecamatan Katobu dan Parigi terakhir di Kota Baubau meliputi kecamatan Bungi.



Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun 2023

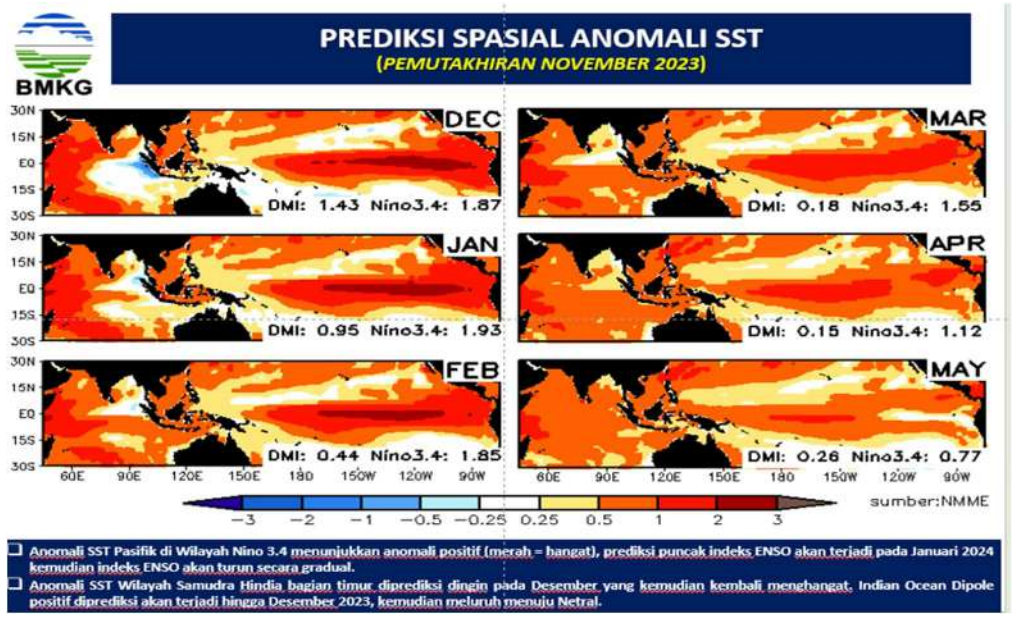
6.2 Variabilitas Iklim

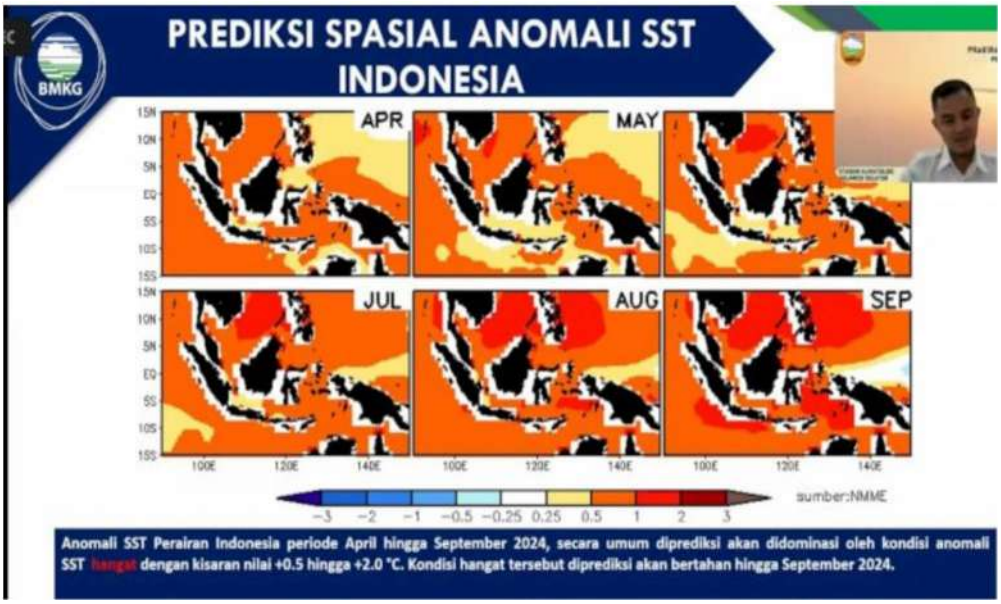
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, di kelilingi oleh Samudra Hindia dan Pasifik, serta merupakan negara yang dilalui oleh garis

khatulistiwa. Kondisi

ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki pola iklim tropis yang bervariasi. Dinamika iklim global ikut mempengaruhi pola dan intensitas cuaca dan iklim di Indonesia, seperti fenomena *El Nino/La Nina* dan *Dipole Mode.* Iklim Indonesia juga dipengaruhi oleh fenomena regional, seperti sirkulasi *monsoon* Asia-Autralia, daerah pertemuan angin antar tropi atau *Inter Tropical Convergence Zona* (ITCZ) yang merupakan daerah pertumbuhan awan, serta suhu permukaan laut sekitar wilayah Indonesia. Selain itu, kondisi topografi wilayah Indonesia yang bergunung, lembah dan berpantai juga turut menambah keragaman kondisi iklim di wilayah Indonesia.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi El Nino di Sulawesi Tenggara (Sultra) puncaknya bulan Desember 2023 dan mulai menurun Maret 2024. Adapun dampak dari ***El Nino*** yakni adanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun, karhutla atau titik panas ini jangan diartikan sebagai titik api, karena titik panas belum tentu api. Biasanya ada kasus saat pengecekan, titik panas itu hanya atap rumah warga yang menggunakan seng, di mana ketika terkena cahaya matahari seng tersebut menjadi sangat panas.





Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun 2024

6.3 Kehilangan Produksi Akibat Kekeringan, banjir dan OPT

Produksi dan produktivitas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca. Daerah yang rusak didefinisikan sebagai suatu daerah yang produksi pangannya menurun akibat bencana alam (banjir, kekeringan) dan penularan hama oleh Organisme Penganggu Tanaman (OPT). Kehilangan produksi terdiri dari kehilangan total (puso) dan

terdampak (ketika kehilangan kurang dari 50%). Proporsi kerusakan tanaman padi dan jagung terhadap luas area tanaman padi dan jagung yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan OPT di Sulawesi Tenggara.



BMKG

DAMPAK MUSIM HUJAN

SEKTOR PERTANIAN / PERKEBUNAN

KONDISI CUACA/IKLIM	DAMPAK	ANTISIPASI
Peningkatan intensitas curah hujan yang disertai angin kencang dan petir	• Meningkatnya OPT pada tanaman padi, palawija, dan hortikultura • Genangan/banjir pada lahan pertanian • Rusaknya komoditi tanaman tertentu akibat angin kencang Ketiga kondisi diatas berpotensi menyebabkan terjadinya gagal panen yang dapat menyebabkan menurunnya produksi pertanian tertentu dan pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan harga	• Mengatur sistem drainase lahan • Penyesuaian jenis tanaman • Pengaturan jadwal penanaman (kalender tanam)

BAB VII
REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil analisis komposit ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 total kecamatan sebanyak 221 kecamatan untuk beberapa kabupaten/kota yang masuk ke dalam Prioritas 1 sampai dengan 3 (rentan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 8 kecamatan (14,93%) yang tersebar di 17 Kabupaten/kota, adapun yang masuk dalam kategori Prioritas-1 (Sangat Rentan) sebanyak 2 kecamatan, Prioritas-2 (Rentan) sebanyak 6 kecamatan, Prioritas-3 (Agak Rentan) sebanyak 11 kecamatan. Kecamatan yang masuk ke dalam Prioritas 4 sampai dengan 6 (tahan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 188 kecamatan diantaranya meliputi kecamatan yang masuk dalam Prioritas-4 sebanyak 41 kecamatan (18,55%), Prioritas-5 sebanyak 19 kecamatan (8,60%), dan Prioritas-6 sebanyak 128 kecamatan (57,92%). Untuk level perkotaan total kecamatan yang masuk dalam Prioritas 1 sampai dengan 3 tidak ada kecamatan yang masuk daerah rentan terhadap kerawanan pangan. Kecamatan yang masuk dalam Prioritas 4 sampai dengan 6 (tahan terhadap kerawanan pangan) sebanyak 19 kecamatan (100%), meliputi kecamatan yang masuk dalam Prioritas-5 sebanyak 1 kecamatan dan Prioritas-6 sebanyak 18 kecamatan.

Hasil Analisis Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori kecamatan Prioritas-1 sampai dengan Prioritas-3 sebanyak 33 kecamatan berada di wilayah Kabupaten Buton sebanyak 3 kecamatan, Muna sebanyak 4 kecamatan, Konawe Selatan sebanyak 4 kecamatan, Wakatobi sebanyak
7 kecamatan, Kolaka Timur sebanyak 2 kecamatan, Konawe Kepulauan sebanyak 3 kecamatan, Muna Barat sebanyak 1 kecamatan, Buton

Tengah sebanyak 2 kecamatan dan Buton Selatan sebanyak 7 kecamatan. Sedangkan Kecamatan yang masuk Prioritas-4 sampai dengan Prioritas-6 sebanyak 188 kecamatan berada di wilayah Kabupaten Buton sebanyak 4 kecamatan, Kabupaten Muna sebanyak 18 kecamatan, Kabupaten Konawe sebanyak 28 kecamatan, Kabupaten Kolaka sebanyak 12 kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 21 kecamatan, Kabupaten Bombana

sebanyak 22 kecamatan, Kabupaten Wakatobi sebanyak 1 kecamatan, Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 15 kecamatan, Kabupaten Buton Utara sebanyak 6 kecamatan, Kabupaten Konawe Utara 13 kecamatan, Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 10 kecamatan, Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 4 kecamatan, Kabupaten Muna Barat sebanyak 10 kecamatan, Kabupaten Buton Tengah sebanyak 5 kecamatan, Kota Baubau sebanyak 8 kecamatan dan Kota Kendari sebanyak 11 kecamatan).

Penyebab Terjadi Rawan Pangan

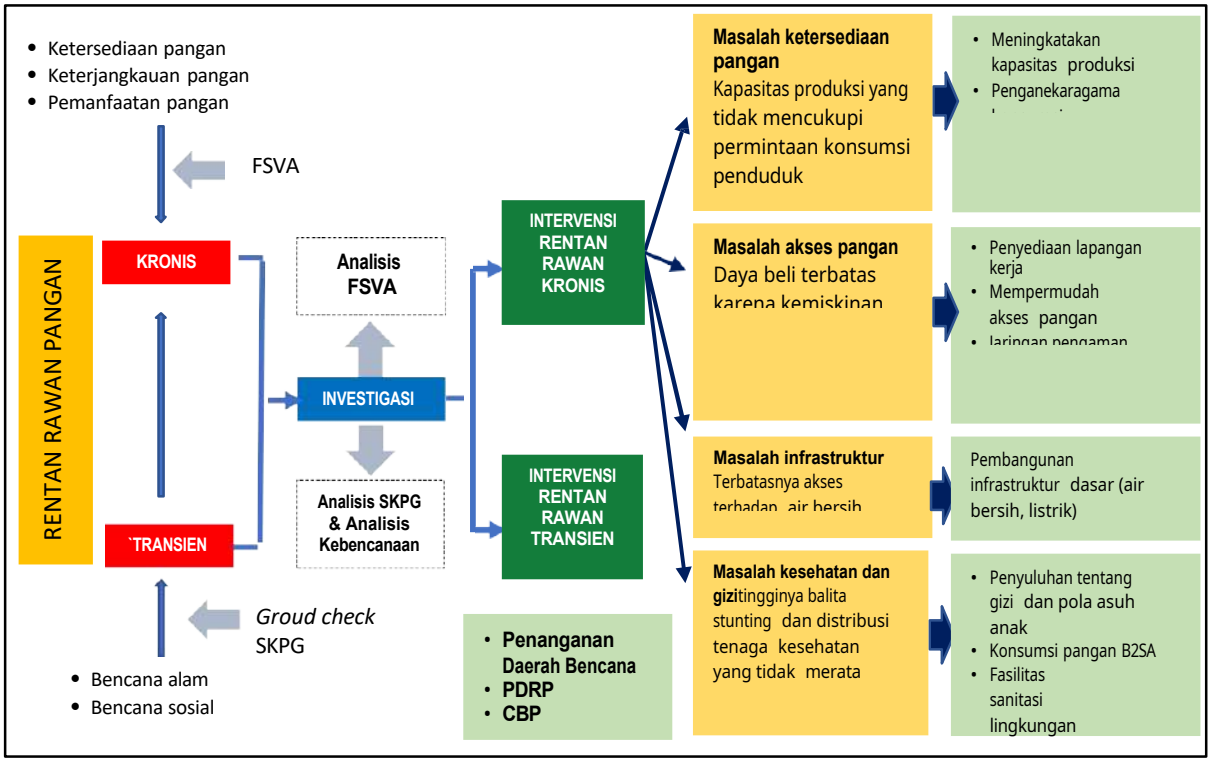
Penyebab terjadinya kondisi rentan rawan pangan di setiap wilayah kecamatan berbeda-beda, oleh karenanya intervensi program yang dilakukan idealnya bersifat spesifik lokal. Namun demikian, pendekatan pengentasan kerentanan terhadap kerawanan pangan secara umum dapat dibedakan antara wilayah kecamatan dengan pertimbangan:

1. Luas wilayah kecamatan berbeda-beda;
2. Kepadatan penduduk antar kecamatan berbeda;
3. Mata pencaharian penduduk kecamatan yang ada di kabupaten pada umumnya bergerak disektor agraris, sedangkan penduduk kecamatan yang ada di perkotaan pada umumnya bergerak disektor perdagangan dan jasa;
4. Tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk kecamatan yang ada di perkotaan relatif lebih baik;
5. Rata-rata pendapatan penduduk kecamatan yang berada di wilayah kabupaten relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan yang berada di wilayah perkotaan.
6. Keterbatasan akses ke pangan yang seimbang dan bergizi.

7. Kerentanan lingkungan dan perubahan iklim.
8. Kemiskinan dan keterbatasan sumber daya.
9. Kurangnya pengetahuan gizi dan kesadaran masyarakat.
10. Faktor sosial-ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan.

Intervensi pada wilayah kecamatan yang berada di daerah rentan rawan pangan didasarkan pada faktor yang menjadi penyebab kondisi tersebut. Jika permasalahan disebabkan oleh faktor ketersediaan, maka perlu upaya- upaya peningkatan dalam penyediaan ketersediaan pangan, baik melalui peningkatan produksi, cadangan pangan, maupun perbaikan pada sistem perdagangan antar wilayah. Permasalahan pada akses ekonomi/daya beli yang rendah dapat diatasi dengan penyediaan lapangan kerja atau jaring pengaman sosial dan gerakan pangan murah. Keterbatasan infrastruktur dapat diatasi dengan pembangunan dan peningkatan fasilitas penunjang seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan gudang, lumbung pangan masyarakat untuk penyimpanan stok pangan. Masalah kesehatan dan gizi diatasi dengan penyuluhan tentang gizi, konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman, sanitasi lingkungan serta pemerataan tenaga kesehatan.

Penanganan kerentanan pangan ***transien*** dapat dilakukan melalui intervensi penyaluran cadangan pangan pemerintah dan bantuan pangan pemerintah seperti program pasca bencana untuk meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat yang berdampak dengan bencana memerlukan respons cepat dan efektif. Pemerintah dan stakeholders harus bekerja sama untuk menyediakan bantuan pangan, meningkatkan akses ke pangan, dan memperkuat sistem ketahanan pangan. Strategi ini mencakup respons cepat dan efektif terhadap krisis pangan, peningkatan akses ke pangan yang seimbang dan bergizi, pengembangan sistem peringatan dini kerentanan pangan, peningkatan kemampuan petugas kesehatan dan pengembangan kebijakan dan peraturan pangan yang efektif.



Gambar 4. Kerangka Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan

7.1 Pengentasan Wilayah Kecamatan Rentan Rawan Pangan Per Kabupaten

Penyebab terjadinya kerentanan pangan di setiap wilayah kecamatan di beberapa kabupaten tidak selalu sama, oleh karena itu diperlukan pendekatan/program yang spesifik. Selain memetakan situasi ketahanan pangan wilayah kecamatan di suatu daerah, perlu juga menganalisis penyebab terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan. Oleh karena itu hasil rekomendasi FSVA dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan lokasi kegiatan ketahanan pangan sehingga lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil pemetaan FSVA tahun 2025, prioritas lokasi

pengentasan kerentanan pangan di wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara direkomendasikan pada:

1. Kecamatan-kecamatan di wilayah kepulauan yang tidak mempunyai produksi pangan.

2. Kecamatan-kecamatan yang terletak di wilayah kepulauan dengan tingkat indikator kemiskinan yang tinggi dan kurangnya infrastruktur pangan.
3. Kecamatan-kecamatan di wilayah kepulauan yang menghadapi kendala akses terhadap sumber-sumber pangan.
4. Kecamatan-kecamatan yang tinggi rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan bersih per kapita.
5. Kecamatan-kecamatan yang tinggi persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskina.
6. Kecamatan-kecamatan yang mempunyai prevalensi balita *stunting* yang tinggi dan rumah tangga tanpa air bersih yang tinggi.
7. Kecamatan-kecamatan yang tinggi angka kesakitannya.

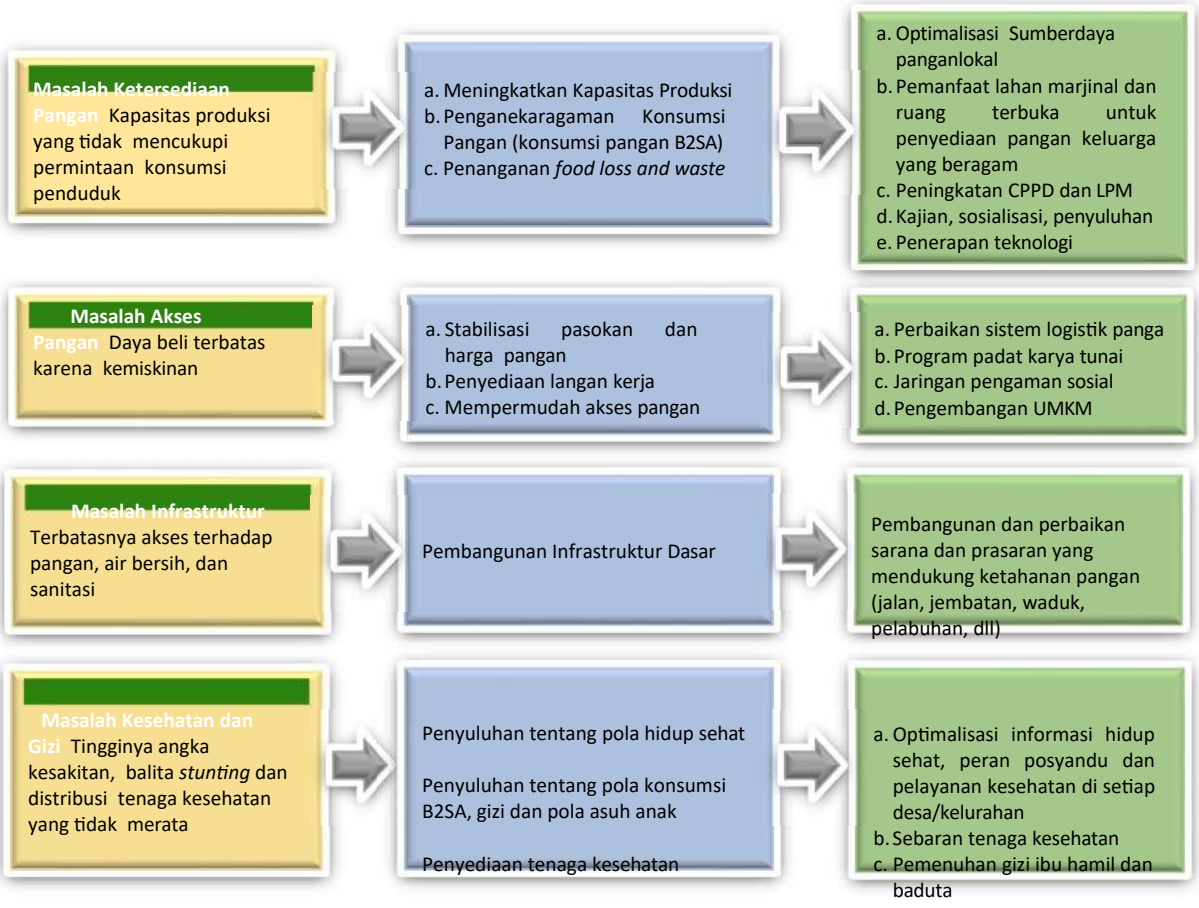
Program-program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan wilayah kecamatan rentan rawan pangan dapat diarahkan pada kegiatan:

a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra pangan dengan mengoptimalkan lahan marginal dan ruang terbuka untuk produksi sesuai potensi sumberdaya lokal.
b. Penyediaan BUMD pangan sebagai lembaga penyediaan komoditi pangan
c. Penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit)dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/ UMKN/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah untuk menurunkan kemiskinan.
d. Sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan bagi masyarakat;

e. Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak; penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan sanitasi untuk menurunkan prevalensi stunting dan peningkatan gizi masyarakat;

f. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih, sosialisasi dan penyuluhan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan secara umum ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di wilayah kecamatan seperti digambarkan pada Gambar:



Gambar 5. Kerangka Intervensi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Kabupaten Per Kecamatan

7.2 Pengentasan Wilayah Kecamatan Rentan Rawan Pangan di Perkotaan

Hasil analisis komposit ketahanan pangan dari 19 kecamatan yang berada di kota Kendari dan kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa kecamatan rentan rawan pangan Prioritas 1-3

tidak ada.

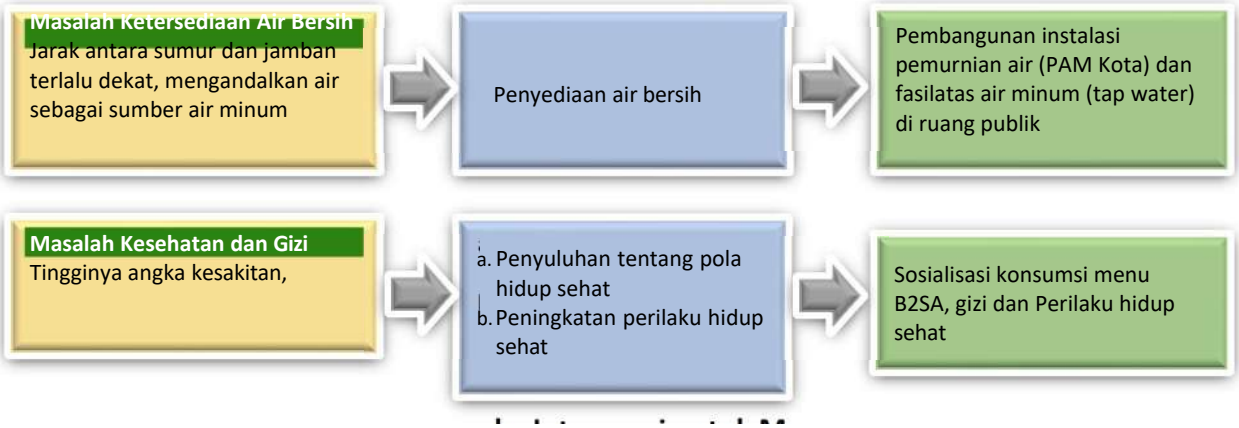
Adapun secara indikator masih terdapat beberapa kecamatan yang masuk Prioritas 1-3, yaitu Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dan persentase angka kesakitan. Kecamatan masuk dalam Prioritas 1-3 Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 10 kecamatan semuanya berada di Kota Kendari. Sedangkan persentase angka kesakitan sebanyak 4 kecamatan terdapat di Kota Kendari sebanyak 2 kecamatan dan Kota Baubau sebanyak 2 kecamatan.

Oleh karena itu, program-program pengentasan kerentanan pangan di wilayah kecamatan yang berada di daerah perkotaan diarahkan pada kegiatan:

1. Peningkatan ketersediaan pangan keluarga melalui pengembangan *urban farming*.
2. Penanganan balita *stunting* melalui intervensi program gizi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Intervensi spesifik dilakukan untuk mendukung kesehatan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) diantaranya adalah melalui pemberian vitamin yang dilengkapi zat besi, yodium, asam folat untuk ibu hamil, mendukung pemberian ASI esklusif usia 0-4 bulan, dan pemberian MP ASI untuk usia anak 7-23 bulan. Intervensi gizi sensitif yang diarahkan untuk penyediaan bahan pangan yang cukup dan beragam, akses air bersih, sanitasi, akses pelayanan kesehatan, pendidikan gizi, jaring pengaman sosial, dan peningkatan pendapatan keluarga.
3. Sosialisi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
4. Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan daya beli.

5. Peningkatan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi dan penyuluhan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan secara umum ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di kecamatan yang ada di perkotaan seperti digambar pada Gambar.



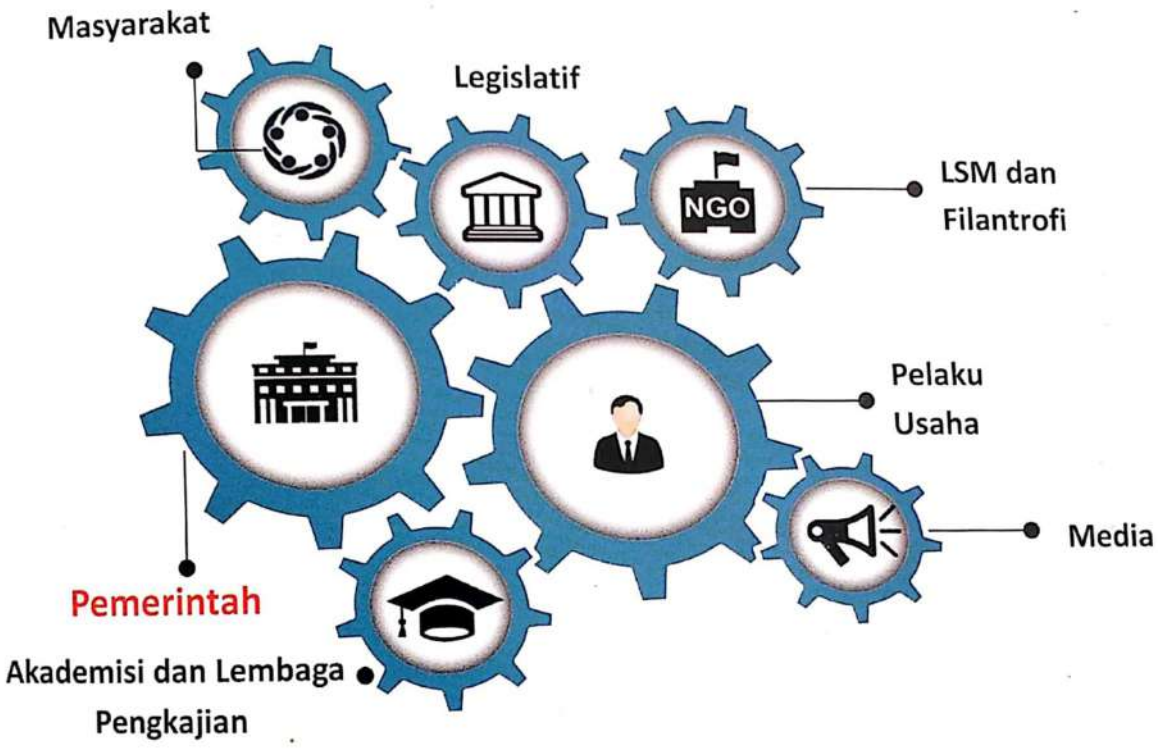
Gambar 6. Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Kecamatan di Perkotaan

7.3 Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi yang dilakukan harus mampu meningkatkan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan layanan kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012. Sementara kondisi kerentanan pangan dan gizi di suatu wilayah disebabkan oleh permasalahan yang bersifat multi-sektor dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan yaitu; pemerintah, pemerintah daerah, lembaga legislatif, pelaku usaha, filantrofi, LSM, media, akademisi dan lembaga pengkajian serta komunitas madani di pusat dan daerah yang bersinergi dalam bentuk program di tingkat lapangan

dalam penanganan pengentasan daerah rentan rawan pangan.

PARTISIPASI AKTIF SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN



Gambar 7. Peran Aktif Pemangku Kepentingan dalam Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah berperan aktif dalam pengentasan daerah rawan pangan melalui OPD terkait dengan membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan melalui Surat Keputusan Gubernur No.639 Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Satuan Tugas Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penanganan daerah rentan rawan pangan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Tim yaitu:

1. Memastikan dan monitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 bahan pangan;
2. Melakukan pemantauan dan pengawasan komoditi pangan

pokok dan strategi terhadap tindakan penimbunan oleh pedagang dan distributor/grosir;

3. Melakukan pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi harga pangan pokok dan pangan strategis dalam mengantisipasi terjadi kenaikan harga;
5. Melakukan pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
6. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar serta distribusi pangan lintas kabupaten/kota.

LAMPIRAN

SEBARAN PRIORITAS KECAMATAN BERDASARKAN INDIKATOR INDIVIDU & KOMPOSIT FSVA PROVINSI 2025

PERHITUNGAN PRIORITAS INDIKATOR INDIVIDU
Di Masing-masing Wilayah (Kecamatan)

Provinsi: SULAWESI TENGGARA

				KETERSEDIAAN			AKSES			PEMANFAATAN					
No.	Nama KAB_KOTA	Kode Kec Kemendagri	Nama KEC	1. PRIORITAS NCPR	2. PRIORITAS POVERTY	3. PRIORITAS FOOD EX	4. PRIORITAS NoELECTRIC	5. PRIORITAS NoWATER	6. PRIORITAS MOBIRDITY	7. PRIORITAS TENKES	8. PRIORITAS FSCHOOL	9. PRIORITAS STUNTING	IKP	RANK	PRIORITAS KOMPOSIT
1	Buton	74.04.22	Kapontori	1	6	6	6	4	5	6	6	4	56,72	188	3
2	Buton	74.04.23	Lasalimu	1	6	6	6	6	3	5	6	4	71,38	129	4
3	Buton	74.04.24	Lasalimu Selatan	1	6	6	6	6	4	6	5	4	61,05	180	3
4	Buton	74.04.11	Pasar Wajo	3	6	6	6	6	5	5	6	4	89,74	52	6
5	Buton	74.04.27	Siotapina	1	6	6	6	6	3	5	4	4	64,58	158	4
6	Buton	74.04.29	Wabula	1	6	6	6	6	2	6	6	4	63,51	167	4
7	Buton	74.04.28	Wolowa	1	6	6	6	6	5	5	6	4	62,03	176	3
8	Muna	74.03.15	Batalaiworu	1	6	6	6	6	6	6	6	4	65,48	155	4
9	Muna	74.03.34	Batukara	1	6	6	6	6	6	6	6	4	84,00	95	6
10	Muna	74.03.26	Bone	4	6	6	6	6	3	4	6	4	85,22	85	6
11	Muna	74.03.17	Duruka	1	6	6	6	6	2	6	6	4	77,76	119	5
12	Muna	74.03.23	Kabangka	1	6	6	6	5	4	6	6	4	71,62	128	5
13	Muna	74.03.24	Kabawo	4	6	6	6	6	5	6	6	4	89,57	55	6
14	Muna	74.03.16	Katobu	6	6	6	6	6	6	6	6	4	96,08	5	6

No.	Nama KAB_KOTA	Kode Kec Kemendagri	Nama KEC	1. PRIORITAS NCPR	2. PRIORITAS POVERTY	3. PRIORITAS FOOD EX	4. PRIORITAS NoELECTRIC	5. PRIORITAS NoWATER	6. PRIORITAS MOBIRDITY	7. PRIORITAS TENKES	8. PRIORITAS FSCHOOL	9. PRIORITAS STUNTING	IKP	RANK	PRIORITAS KOMPOSIT
15	Muna	74.03.30	Kontu Kowuna	5	6	6	6	2	5	6	6	4	77,19	121	5
16	Muna	74.03.20	Kontunaga	1	6	6	6	5	1	6	5	4	74,34	124	5
17	Muna	74.03.14	Lasalepa	4	6	6	6	6	5	6	6	4	85,69	80	6
18	Muna	74.03.18	Lohia	1	6	6	6	5	1	6	6	4	57,68	186	3
19	Muna	74.03.07	Maligano	1	6	6	6	6	6	6	6	4	68,26	140	4
20	Muna	74.03.31	Marobo	1	6	5	4	2	1	6	2	4	40,14	202	1
21	Muna	74.03.06	Napabalano	1	6	6	6	6	5	6	6	4	66,25	150	4
22	Muna	74.03.25	Parigi	4	6	6	6	6	5	6	6	4	90,08	50	6
23	Muna	74.03.33	Pasi Kolaga	1	6	6	6	6	6	6	6	4	84,78	89	6
24	Muna	74.03.28	Pasir Putih	1	6	5	6	6	5	6	6	4	64,31	160	4
25	Muna	74.03.27	Tongkuno	1	6	6	6	6	4	4	4	4	62,15	173	3
26	Muna	74.03.32	Tongkuno Selatan	1	6	6	6	6	5	6	6	4	63,63	165	4
27	Muna	74.03.37	Towea	1	6	5	4	1	3	6	4	4	46,02	198	2
28	Muna	74.03.13	Wakorumba Selatan	1	6	6	6	6	6	6	6	4	72,86	126	5
29	Muna	74.03.19	Watopute	1	6	6	6	6	6	6	6	4	63,79	164	4
30	Konawe	74.02.10	Abuki	6	4	6	4	6	2	1	6	4	86,26	75	6
31	Konawe	74.02.28	Amonggedo	6	2	6	6	6	5	1	6	4	86,98	72	6
32	Konawe	74.02.24	Anggaberi	6	5	6	6	6	5	1	6	4	94,66	17	6
33	Konawe	74.02.40	Anggalomoare	6	5	6	6	6	4	2	4	4	94,18	20	6
34	Konawe	74.02.31	Asinua	6	2	6	6	5	4	1	4	4	82,85	101	6

No.	Nama KAB_KOTA	Kode Kec Kemendagri	Nama KEC	1. PRIORITAS NCPR	2. PRIORITAS POVERTY	3. PRIORITAS FOOD EX	4. PRIORITAS NoELECTRIC	5. PRIORITAS NoWATER	6. PRIORITAS MOBIRDITY	7. PRIORITAS TENKES	8. PRIORITAS FSCHOOL	9. PRIORITAS STUNTING	IKP	RANK	PRIORITAS KOMPOSIT
35	Konawe	74.02.20	Besulutu	6	3	6	6	6	2	1	6	4	91,44	39	6
36	Konawe	74.02.21	Bondoala	6	4	6	6	6	3	1	6	4	91,34	40	6
37	Konawe	74.02.33	Kapoiala	6	6	6	6	6	4	1	6	4	93,04	24	6
38	Konawe	74.02.32	Konawe	6	5	6	6	6	4	3	6	4	91,98	33	6
39	Konawe	74.02.36	Lalonggasumeeto	6	5	6	6	6	5	1	6	4	91,71	35	6
40	Konawe	74.02.01	Lambuya	6	4	6	6	6	5	1	6	4	93,15	22	6
41	Konawe	74.02.16	Latoma	6	2	6	3	5	3	1	4	4	78,02	117	5
42	Konawe	74.02.25	Meluhu	6	5	6	6	5	4	1	6	4	85,94	78	6
43	Konawe	74.02.39	Morosi	6	6	6	6	6	4	3	6	4	94,03	21	6
44	Konawe	74.02.37	Onembute	6	3	6	6	6	3	1	6	4	87,04	71	6
45	Konawe	74.02.38	Padangguni	6	5	6	6	4	4	1	5	4	80,58	109	6
46	Konawe	74.02.04	Pondidaha	6	4	6	6	6	3	1	6	4	87,86	68	6
47	Konawe	74.02.17	Puriala	6	5	6	6	6	4	2	6	4	96,40	3	6
48	Konawe	74.02.23	Routa	6	2	6	5	5	6	1	6	4	82,74	102	6
49	Konawe	74.02.05	Sampara	6	6	6	6	6	2	1	6	4	90,16	49	6
50	Konawe	74.02.11	Soropia	6	4	6	6	6	4	1	5	4	87,89	67	6
51	Konawe	74.02.15	Tongauna	6	5	6	6	6	5	1	6	4	90,26	46	6
52	Konawe	74.02.42	Tongauna Utara	6	6	6	6	6	4	1	5	4	85,43	82	6
53	Konawe	74.02.18	Uepai	6	5	6	6	6	3	1	6	4	90,20	48	6
54	Konawe	74.02.02	Unaaha	6	6	6	6	6	6	5	6	4	95,96	7	6

No.	Nama KAB_KOTA	Kode Kec Kemendagri	Nama KEC	1. PRIORITAS NCPR	2. PRIORITAS POVERTY	3. PRIORITAS FOOD EX	4. PRIORITAS NoELECTRIC	5. PRIORITAS NoWATER	6. PRIORITAS MOBIRDITY	7. PRIORITAS TENKES	8. PRIORITAS FSCHOOL	9. PRIORITAS STUNTING	IKP	RANK	PRIORITAS KOMPOSIT
55	Konawe	74.02.03	Wawotobi	6	6	6	6	6	5	2	6	4	97,55	1	6
56	Konawe	74.02.19	Wonggeduku	6	5	6	6	6	3	1	6	4	88,30	66	6
57	Konawe	74.02.41	Wonggeduku Barat	6	5	6	6	6	5	1	6	4	95,63	9	6
58	Kolaka	74.01.12	Baula	6	6	6	6	6	5	6	6	4	94,87	15	6
59	Kolaka	74.01.27	Iwoimendaa	5	6	6	6	1	6	5	5	4	78,46	115	5
60	Kolaka	74.01.04	Kolaka	1	6	6	6	6	5	6	6	4	85,25	84	6
61	Kolaka	74.01.14	Latambaga	1	6	6	6	6	5	5	6	4	63,83	163	4
62	Kolaka	74.01.25	Polinggona	6	6	6	6	5	5	5	4	4	84,56	92	6
63	Kolaka	74.01.07	Pomalaa	4	4	6	6	6	5	5	6	4	92,71	27	6
64	Kolaka	74.01.20	Samaturu	6	6	6	6	4	5	2	5	4	83,53	97	6
65	Kolaka	74.01.18	Tanggetada	6	6	6	6	6	5	5	6	4	95,23	13	6
66	Kolaka	74.01.24	Toari	1	6	6	6	6	6	6	4	4	65,93	152	4
67	Kolaka	74.01.08	Watubangga	6	6	6	5	6	5	5	5	4	92,51	29	6
68	Kolaka	74.01.10	Wolo	6	6	6	6	4	5	3	6	4	83,39	100	6
69	Kolaka	74.01.01	Wundulako	6	6	6	6	6	6	6	6	4	96,27	4	6
70	Konawe Selatan	74.05.03	Andoolo	1	6	6	6	6	2	6	6	4	68,91	134	4
71	Konawe Selatan	74.05.25	Andoolo Barat	1	6	6	6	6	3	6	5	4	62,15	174	3
72	Konawe Selatan	74.05.02	Angata	1	6	6	6	6	3	6	6	4	79,43	113	5
73	Konawe Selatan	74.05.20	Baito	1	5	6	6	6	3	6	5	4	63,61	166	4
74	Konawe Selatan	74.05.21	Basala	5	5	6	6	6	5	6	4	4	92,00	32	6

No.	Nama KAB_KOTA	Kode Kec Kemendagri	Nama KEC	1. PRIORITAS NCPR	2. PRIORITAS POVERTY	3. PRIORITAS FOOD EX	4. PRIORITAS NoELECTRIC	5. PRIORITAS NoWATER	6. PRIORITAS MOBIRDITY	7. PRIORITAS TENKES	8. PRIORITAS FSCHOOL	9. PRIORITAS STUNTING	IKP	RANK	PRIORITAS KOMPOSIT
75	Konawe Selatan	74.05.13	Benua	1	6	6	6	6	2	6	5	4	64,83	157	4
76	Konawe Selatan	74.05.17	Buke	1	6	6	6	6	4	6	4	4	68,68	136	4
77	Konawe Selatan	74.05.09	Kolono	1	6	6	6	5	3	5	6	4	63,41	168	4
78	Konawe Selatan	74.05.23	Kolono Timur	1	6	6	6	4	4	6	5	4	56,69	189	3
79	Konawe Selatan	74.05.07	Konda	1	6	6	6	6	4	6	6	4	84,17	93	6
80	Konawe Selatan	74.05.19	Laeya	3	6	6	6	6	5	6	6	4	90,23	47	6
81	Konawe Selatan	74.05.06	Lainea	1	5	6	6	6	4	6	5	4	73,92	125	5
82	Konawe Selatan	74.05.12	Lalembuu	4	6	6	6	6	5	6	5	4	89,53	57	6
83	Konawe Selatan	74.05.05	Landono	1	6	6	6	6	4	6	6	4	66,85	144	4
84	Konawe Selatan	74.05.11	Laonti	1	6	6	6	6	2	6	5	4	64,16	161	4
85	Konawe Selatan	74.05.10	Moramo	1	6	6	6	5	2	6	6	4	61,94	177	3
86	Konawe Selatan	74.05.16	Moramo Utara	1	6	6	6	6	3	6	5	4	65,15	156	4
87	Konawe Selatan	74.05.15	Mowila	3	6	6	6	6	3	6	5	4	89,07	62	6
88	Konawe Selatan	74.05.04	Palangga	1	6	6	6	6	4	6	6	4	81,54	107	6
89	Konawe Selatan	74.05.14	Palangga Selatan	1	6	6	6	6	3	6	5	4	85,19	86	6
90	Konawe Selatan	74.05.08	Ranomeeto	1	6	6	6	6	5	6	6	4	69,15	133	4
91	Konawe Selatan	74.05.22	Ranomeeto Barat	1	6	6	6	6	4	6	6	4	63,85	162	4
92	Konawe Selatan	74.05.24	Sabulakoa	1	5	6	6	6	3	6	5	4	66,56	147	4
93	Konawe Selatan	74.05.01	Tinanggea	1	6	6	6	6	3	6	6	4	84,57	91	6
94	Konawe Selatan	74.05.18	Wolasi	1	6	6	6	1	2	6	5	4	50,92	194	2

No.	Nama KAB_KOTA	Kode Kec Kemendagri	Nama KEC	1. PRIORITAS NCPR	2. PRIORITAS POVERTY	3. PRIORITAS FOOD EX	4. PRIORITAS NoELECTRIC	5. PRIORITAS NoWATER	6. PRIORITAS MOBIRDITY	7. PRIORITAS TENKES	8. PRIORITAS FSCHOOL	9. PRIORITAS STUNTING	IKP	RANK	PRIORITAS KOMPOSIT
95	Bombana	74.06.05	Kabaena	1	6	6	6	6	5	6	6	4	68,86	135	4
96	Bombana	74.06.14	Kabaena Barat	1	6	6	6	6	6	6	6	4	67,76	141	4
97	Bombana	74.06.13	Kabaena Selatan	1	6	6	6	6	6	6	6	4	68,55	137	4
98	Bombana	74.06.16	Kabaena Tengah	1	6	6	6	6	4	5	6	4	67,03	143	4
99	Bombana	74.06.06	Kabaena Timur	1	6	6	6	6	6	6	6	4	68,51	138	4
100	Bombana	74.06.15	Kabaena Utara	1	6	6	6	6	4	6	5	4	65,88	153	4
101	Bombana	74.06.17	Kep. Masaloka Raya	1	6	6	6	6	5	6	4	4	66,06	151	4
102	Bombana	74.06.21	Lantari Jaya	6	6	6	6	6	2	5	4	4	94,45	19	6
103	Bombana	74.06.08	Mata Oleo	1	6	6	6	6	5	6	5	4	86,18	76	6
104	Bombana	74.06.22	Mata Usu	4	6	6	5	6	6	3	5	4	89,11	60	6
105	Bombana	74.06.01	Poleang	1	6	6	6	6	3	6	6	4	66,46	149	4
106	Bombana	74.06.07	Poleang Barat	1	6	6	6	6	2	5	4	4	69,21	131	4
107	Bombana	74.06.11	Poleang Selatan	1	6	6	6	6	3	6	5	4	64,52	159	4
108	Bombana	74.06.19	Poleang Tengah	1	6	6	6	6	5	4	5	4	66,48	148	4
109	Bombana	74.06.12	Poleang Tenggara	1	6	6	6	6	2	6	4	4	82,47	105	6
110	Bombana	74.06.02	Poleang Timur	6	6	6	6	6	4	4	6	4	97,17	2	6
111	Bombana	74.06.10	Poleang Utara	6	6	6	6	6	4	6	5	4	95,63	10	6
112	Bombana	74.06.03	Rarowatu	1	6	6	6	6	2	6	6	4	86,34	74	6
113	Bombana	74.06.09	Rarowatu Utara	6	6	6	6	6	4	6	5	4	95,27	12	6
114	Bombana	74.06.04	Rumbia	5	6	6	6	6	4	6	6	4	95,84	8	6

No.	Nama KAB_KOTA	Kode Kec Kemendagri	Nama KEC	1. PRIORITAS NCPR	2. PRIORITAS POVERTY	3. PRIORITAS FOOD EX	4. PRIORITAS NoELECTRIC	5. PRIORITAS NoWATER	6. PRIORITAS MOBIRDITY	7. PRIORITAS TENKES	8. PRIORITAS FSCHOOL	9. PRIORITAS STUNTING	IKP	RANK	PRIORITAS KOMPOSIT
115	Bombana	74.06.18	Rumbia Tengah	1	6	6	6	6	5	6	6	4	66,78	146	4
116	Bombana	74.06.20	Tontonunu	2	6	6	4	6	2	6	4	4	84,68	90	6
117	Wakatobi	74.07.04	Binongko	1	1	5	6	1	1	6	5	4	44,00	200	2
118	Wakatobi	74.07.02	Kaledupa	1	1	6	6	6	1	6	5	4	59,06	184	3
119	Wakatobi	74.07.06	Kaledupa Selatan	1	1	6	6	6	3	6	6	4	62,37	172	3
120	Wakatobi	74.07.08	Togo Binongko	1	1	5	6	1	1	6	5	4	44,48	199	2
121	Wakatobi	74.07.03	Tomia	1	1	6	6	5	2	6	6	4	56,53	190	3
122	Wakatobi	74.07.07	Tomia Timur	1	1	6	6	1	5	6	6	4	51,80	193	2
123	Wakatobi	74.07.05	Wangi Wangi Selatan	1	1	6	6	6	5	6	6	4	62,11	175	3
124	Wakatobi	74.07.01	Wangi-Wangi	1	1	6	6	6	6	6	5	4	65,61	154	4
125	Kolaka Utara	74.08.03	Batu Putih	6	6	6	6	6	3	1	6	4	91,51	37	6
126	Kolaka Utara	74.08.13	Katoi	6	6	6	6	6	5	1	6	4	89,54	56	6
127	Kolaka Utara	74.08.05	Kodeoha	6	6	6	6	6	5	1	6	4	92,06	30	6
128	Kolaka Utara	74.08.08	Lambai	6	6	6	6	6	6	1	6	4	90,38	45	6
129	Kolaka Utara	74.08.01	Lasusua	6	6	6	6	6	5	1	6	4	93,08	23	6
130	Kolaka Utara	74.08.06	Ngapa	6	6	6	6	6	6	1	4	4	90,94	43	6
131	Kolaka Utara	74.08.02	Pakue	6	6	6	6	6	5	1	6	4	88,79	64	6
132	Kolaka Utara	74.08.10	Pakue Tengah	6	6	6	6	6	3	1	6	4	90,64	44	6
133	Kolaka Utara	74.08.11	Pakue Utara	6	6	6	6	6	4	1	5	4	89,73	53	6
134	Kolaka Utara	74.08.12	Porehu	6	6	6	6	6	5	1	6	4	91,12	41	6

No.	Nama KAB_KOTA	Kode Kec Kemendagri	Nama KEC	1. PRIORITAS NCPR	2. PRIORITAS POVERTY	3. PRIORITAS FOOD EX	4. PRIORITAS NoELECTRIC	5. PRIORITAS NoWATER	6. PRIORITAS MOBIRDITY	7. PRIORITAS TENKES	8. PRIORITAS FSCHOOL	9. PRIORITAS STUNTING	IKP	RANK	PRIORITAS KOMPOSIT
135	Kolaka Utara	74.08.04	Rante Angin	6	6	6	6	6	6	1	6	4	92,06	31	6
136	Kolaka Utara	74.08.14	Tiwu	6	6	6	6	6	4	1	6	4	89,96	51	6
137	Kolaka Utara	74.08.15	Tolala	6	6	6	6	6	5	1	5	4	88,40	65	6
138	Kolaka Utara	74.08.09	Watunohu	6	6	6	6	6	6	1	6	4	95,18	14	6
139	Kolaka Utara	74.08.07	Wawo	6	6	6	6	4	5	1	6	4	82,48	104	6
140	Buton Utara	74.10.03	Bonegunu	3	2	6	6	6	1	6	6	4	84,03	94	6
141	Buton Utara	74.10.02	Kambowa	2	2	6	6	5	1	6	6	4	76,75	122	5
142	Buton Utara	74.10.01	Kulisusu	1	2	6	6	6	2	6	6	4	83,50	98	6
143	Buton Utara	74.10.04	Kulisusu Barat	3	3	6	6	4	1	6	6	4	78,04	116	5
144	Buton Utara	74.10.05	Kulisusu Utara	1	2	6	6	6	1	6	6	4	79,46	112	5
145	Buton Utara	74.10.06	Wakorumba Utara	1	5	6	6	6	1	6	6	4	86,07	77	6
146	Konawe Utara	74.09.09	Andowia	1	6	6	6	6	3	5	6	4	81,26	108	6
147	Konawe Utara	74.09.01	Asera	1	6	6	6	6	2	4	6	4	79,75	111	5
148	Konawe Utara	74.09.13	Landawe	4	6	6	6	6	1	2	6	4	85,84	79	6
149	Konawe Utara	74.09.03	Langgikima	1	6	6	6	6	5	5	6	4	85,69	81	6
150	Konawe Utara	74.09.05	Lasolo	5	6	6	6	6	4	6	6	4	91,06	42	6
151	Konawe Utara	74.09.12	Lasolo Kepulauan	6	6	6	6	6	5	6	4	4	91,77	34	6
152	Konawe Utara	74.09.06	Lembo	6	6	6	6	6	5	6	6	4	96,02	6	6
153	Konawe Utara	74.09.04	Molawe	6	6	6	6	6	5	6	6	4	94,47	18	6
154	Konawe Utara	74.09.10	Motui	6	6	6	6	6	3	6	6	4	92,90	25	6

No.	Nama KAB_KOTA	Kode Kec Kemendagri	Nama KEC	1. PRIORITAS NCPR	2. PRIORITAS POVERTY	3. PRIORITAS FOOD EX	4. PRIORITAS NoELECTRIC	5. PRIORITAS NoWATER	6. PRIORITAS MOBIRDITY	7. PRIORITAS TENKES	8. PRIORITAS FSCHOOL	9. PRIORITAS STUNTING	IKP	RANK	PRIORITAS KOMPOSIT
155	Konawe Utara	74.09.08	Oheo	6	6	6	6	6	4	4	6	4	94,72	16	6
156	Konawe Utara	74.09.07	Sawa	6	6	6	6	6	3	6	6	4	92,80	26	6
157	Konawe Utara	74.09.11	Wawolesea	6	6	6	6	6	5	6	5	4	91,61	36	6
158	Konawe Utara	74.09.02	Wiwirano	6	6	6	6	6	3	4	6	4	89,62	54	6
159	Kolaka Timur	74.11.10	Aere	6	6	5	5	4	4	6	4	4	82,49	103	6
160	Kolaka Timur	74.11.12	Dangia	6	6	6	6	3	6	6	4	4	82,33	106	6
161	Kolaka Timur	74.11.03	Ladongi	6	6	6	6	6	5	6	6	4	95,30	11	6
162	Kolaka Timur	74.11.06	Lalolae	6	6	5	6	6	3	6	6	4	86,98	73	6
163	Kolaka Timur	74.11.05	Lambandia	6	6	6	6	6	5	6	4	4	88,92	63	6
164	Kolaka Timur	74.11.02	Loea	6	6	6	6	6	5	6	5	4	89,10	61	6
165	Kolaka Timur	74.11.07	Mowewe	6	6	5	6	5	3	6	6	4	85,38	83	6
166	Kolaka Timur	74.11.04	Poli Polia	6	6	6	6	6	5	6	5	4	89,35	58	6
167	Kolaka Timur	74.11.09	Tinondo	6	6	5	6	6	4	6	5	4	87,59	69	6
168	Kolaka Timur	74.11.01	Tirawuta	6	6	5	6	6	4	6	6	4	92,58	28	6
169	Kolaka Timur	74.11.11	Ueesi	1	6	6	6	4	3	5	5	4	53,68	192	2
170	Kolaka Timur	74.11.08	Uluiwoi	1	6	5	6	6	4	2	5	4	60,74	181	3
171	Konawe Kepulauan	74.12.01	Wawonii Barat	1	6	6	6	6	2	6	6	4	63,18	169	4
172	Konawe Kepulauan	74.12.06	Wawonii Selatan	3	6	6	6	3	5	3	6	4	77,59	120	5
173	Konawe Kepulauan	74.12.07	Wawonii Tengah	1	6	6	6	6	2	5	6	4	59,53	183	3
174	Konawe Kepulauan	74.12.05	Wawonii Tenggara	1	6	6	6	6	1	5	6	4	57,37	187	3

No.	Nama KAB_KOTA	Kode Kec Kemendagri	Nama KEC	1. PRIORITAS NCPR	2. PRIORITAS POVERTY	3. PRIORITAS FOOD EX	4. PRIORITAS NoELECTRIC	5. PRIORITAS NoWATER	6. PRIORITAS MOBIRDITY	7. PRIORITAS TENKES	8. PRIORITAS FSCHOOL	9. PRIORITAS STUNTING	IKP	RANK	PRIORITAS KOMPOSIT
175	Konawe Kepulauan	74.12.04	Wawonii Timur	1	6	6	6	6	1	5	6	4	61,23	179	3
176	Konawe Kepulauan	74.12.03	Wawonii Timur Laut	4	6	6	6	6	1	5	6	4	85,14	87	6
177	Konawe Kepulauan	74.12.02	Wawonii Utara	1	6	6	6	6	2	4	6	4	74,98	123	5
178	Muna Barat	74.13.02	Barangka	1	6	6	6	1	1	6	6	4	69,75	130	4
179	Muna Barat	74.13.10	Kusambi	1	6	6	6	5	1	6	6	4	77,92	118	5
180	Muna Barat	74.13.03	Lawa	2	6	6	6	6	1	6	6	4	83,41	99	6
181	Muna Barat	74.13.06	Maginti	1	6	6	6	6	2	6	4	4	69,16	132	4
182	Muna Barat	74.13.11	Napano Kusambi	5	6	6	6	6	1	6	5	4	84,86	88	6
183	Muna Barat	74.13.01	Sawerigadi	5	6	6	6	3	1	6	6	4	78,76	114	5
184	Muna Barat	74.13.09	Tiworo Kepulauan	5	6	6	6	6	3	6	6	4	87,30	70	6
185	Muna Barat	74.13.05	Tiworo Selatan	5	6	6	6	6	3	6	6	4	91,49	38	6
186	Muna Barat	74.13.07	Tiworo Tengah	1	6	6	6	6	5	6	5	4	83,82	96	6
187	Muna Barat	74.13.08	Tiworo Utara	1	6	5	6	2	2	6	4	4	48,33	196	2
188	Muna Barat	74.13.04	Wadaga	5	6	6	6	6	1	6	6	4	89,24	59	6
189	Buton Tengah	74.14.06	Gu	1	6	6	6	6	4	6	4	4	61,29	178	3
190	Buton Tengah	74.14.01	Lakudo	1	6	6	6	6	5	6	4	4	79,90	110	6
191	Buton Tengah	74.14.04	Mawasangka	1	6	6	6	6	4	6	4	4	72,41	127	5
192	Buton Tengah	74.14.03	Mawasangka Tengah	1	6	6	6	6	6	6	4	4	67,04	142	4
193	Buton Tengah	74.14.02	Mawasangka Timur	1	6	6	6	6	6	6	4	4	66,82	145	4
194	Buton Tengah	74.14.07	Sangia Wambulu	1	6	6	6	6	5	6	6	4	68,26	139	4

No.	Nama KAB_KOTA	Kode Kec Kemendagri	Nama KEC	1. PRIORITAS NCPR	2. PRIORITAS POVERTY	3. PRIORITAS FOOD EX	4. PRIORITAS NoELECTRIC	5. PRIORITAS NoWATER	6. PRIORITAS MOBIRDITY	7. PRIORITAS TENKES	8. PRIORITAS FSCHOOL	9. PRIORITAS STUNTING	IKP	RANK	PRIORITAS KOMPOSIT
195	Buton Tengah	74.14.05	Talaga Raya	1	6	6	6	6	3	6	4	4	62,38	171	3
196	Buton Selatan	74.15.01	Batauga	1	4	5	6	6	5	2	6	4	58,21	185	3
197	Buton Selatan	74.15.04	Batu Atas	1	6	1	5	1	4	6	4	4	42,28	201	1
198	Buton Selatan	74.15.07	Kadatua	1	2	5	6	2	2	4	5	4	47,64	197	2
199	Buton Selatan	74.15.03	Lapandewa	1	5	6	6	1	5	1	5	4	48,94	195	2
200	Buton Selatan	74.15.02	Sampolawa	1	5	5	6	5	6	1	5	4	54,71	191	3
201	Buton Selatan	74.15.06	Siompu	1	6	5	6	6	6	3	6	4	62,68	170	3
202	Buton Selatan	74.15.05	Siompu Barat	1	4	5	6	6	3	6	6	4	60,37	182	3
203	Kendari	74.71.06	Abeli	0	6	6	6	6	5	6	6	4	95,69	10	6
204	Kendari	74.71.03	Baruga	0	6	6	6	6	6	6	6	4	99,74	2	6
205	Kendari	74.71.08	Kadia	0	6	6	6	6	6	6	6	4	99,84	1	6
206	Kendari	74.71.10	Kambu	0	6	6	6	6	6	6	6	4	99,68	3	6
207	Kendari	74.71.02	Kendari	0	6	6	6	6	5	6	6	4	97,97	8	6
208	Kendari	74.71.05	Kendari Barat	0	6	6	6	6	6	6	6	4	92,54	11	6
209	Kendari	74.71.01	Mandonga	0	6	6	6	6	6	6	6	4	98,89	7	6
210	Kendari	74.71.11	Nambo	0	6	6	6	6	4	6	6	4	74,81	18	6
211	Kendari	74.71.04	Poasia	0	6	6	6	6	6	6	6	4	99,67	4	6
212	Kendari	74.71.09	Puuwatu	0	6	6	6	6	6	6	6	4	98,98	6	6
213	Kendari	74.71.07	Wua-Wua	0	6	6	6	6	6	6	6	4	99,16	5	6
214	Baubau	74.72.08	Batupoaro	0	5	6	6	6	6	6	6	4	97,37	9	6

No.	Nama KAB_KOTA	Kode Kec Kemendagri	Nama KEC	1. PRIORITAS NCPR	2. PRIORITAS POVERTY	3. PRIORITAS FOOD EX	4. PRIORITAS NoELECTRIC	5. PRIORITAS NoWATER	6. PRIORITAS MOBIRDITY	7. PRIORITAS TENKES	8. PRIORITAS FSCHOOL	9. PRIORITAS STUNTING	IKP	RANK	PRIORITAS KOMPOSIT
215	Baubau	74.72.01	Betoambari	0	2	6	6	6	6	6	6	4	91,07	13	6
216	Baubau	74.72.04	Bungi	0	5	6	6	6	5	6	6	4	86,51	16	6
217	Baubau	74.72.05	Kokalukuna	0	1	6	6	6	6	6	6	4	88,18	14	6
218	Baubau	74.72.07	Lea-Lea	0	6	6	6	6	6	6	6	4	87,61	15	6
219	Baubau	74.72.06	Murhum	0	1	6	6	6	6	6	6	4	91,88	12	6
220	Baubau	74.72.03	Sorawolio	0	5	6	6	5	5	6	6	4	66,03	19	5
221	Baubau	74.72.02	Wolio	0	1	6	6	6	6	6	6	4	82,65	17	6

JUMLAH PRIORITAS PER KECAMATAN
HASIL ANALISIS FSVA TAHUN 2025

No.	KABUPATEN	PRIORITAS 1	PRIORITAS 2	PRIORITAS 3	PRIORITAS 4	PRIORITAS 5	PRIORITAS 6	JUMLAH KECAMATAN
1	BUTON	0	0	3	3	0	1	7
2	MUNA	1	1	2	6	5	7	22
3	KONAWE	0	0	0	0	1	27	28
4	KOLAKA	0	0	0	2	1	9	12
5	KONAWE SELATAN	0	1	3	11	2	8	25
6	BOMBANA	0	0	0	12	0	10	22
7	WAKATOBI	0	3	4	1	0	0	8
8	KOLAKA UTARA	0	0	0	0	0	15	15
9	BUTON UTARA	0	0	0	0	3	3	6
10	KONAWE UTARA	0	0	0	0	1	12	13
11	KOLAKA TIMUR	0	1	1	0	0	10	12
12	KONAWE KEPULAUAN	0	0	3	1	2	1	7
13	MUNA BARAT	0	1	0	2	2	6	11
14	BUTON TENGAH	0	0	2	3	1	1	7
15	BUTON SELATAN	1	2	4	0	0	0	7
16	KOTA KENDARI	0	0	0	0	0	11	11
17	KOTA BAUBAU	0	0	0	0	1	7	8
	JUMLAH	2	9	22	41	19	152	221

KETERANGAN:

Prioritas-1 : Sangat Rentan
Prioritas-2 : Rentan
Prioritas-3 : Agak Rentan
Prioritas-4 : Agak Tahan
Prioritas-5 : Tahan
Prioritas-6 : Sangat Tahan

PROVINSI SULAWESI TENGGARA